

KAREL SADSUITUBUN

Oleh :
FRANS HITIPEUW



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI SEJARAH NASIONAL
JAKARTA
1985

MILIK DEPDIKBUD
TIDAK DIPERDAGANGKAN

KAREL SADSUITUBUN

Oleh:
Frans Hitipeuw

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI SEJARAH NASIONAL
JAKARTA
1985

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

KAREL SABOURTUBON

By
Rene Hilber

UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS
CHICAGO, ILL. 60607
1987

**COPYRIGHT PADA
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI
SEJARAH NASIONAL DIREKTORAT SEJARAH DAN
NILAI TRADISIONAL**

**Cetakan I tahun 1981
Cetakan II tahun 1985**

**SAMBUTAN
DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN**

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional (IDSN) yang berada pada Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan telah berhasil menerbitkan seri buku biografi dan kesejarahan. Saya menyambut dengan gembira hasil penerbitan tersebut.

Buku-buku tersebut dapat diselesaikan berkat adanya kerja sama antara para penulis dengan tenaga-tenaga di dalam proyek. Karena baru merupakan langkah pertama, maka dalam buku-buku hasil Proyek IDSN itu masih terdapat kelemahan dan kekurangan. Diharapkan hal itu dapat disempurnakan pada masa yang akan datang.

Usaha penulisan buku-buku kesejarahan wajib kita tingkatkan mengingat perlunya kita untuk senantiasa memupuk, memperkaya dan memberi corak pada kebudayaan nasional dengan tetap memelihara dan membina tradisi dan peninggalan sejarah yang mempunyai nilai perjuangan bangsa, kebanggaan serta kemanfaatan nasional.

Saya mengharapkan dengan terbitnya buku-buku ini dapat ditambah sarana penelitian dan kepustakaan yang diperlukan untuk pembangunan bangsa dan negara, khususnya pembangunan kebudayaan.

Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penerbitan ini.

Jakarta, Agustus 1985
Direktur Jenderal Kebudayaan



Prof. Dr. Haryati Soebadio
NIP. 130119123

KATA PENGANTAR

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional merupakan salah satu proyek dalam lingkungan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang antara lain menggarap penulisan biografi "pahlawan nasional" yang sudah memperoleh pengesahan dari pemerintah. Ketentuan umum bagi "pahlawan nasional", ialah seseorang yang pada masa hidupnya, karena terdorong oleh rasa cinta tanah air, sangat berjasa dalam memimpin suatu kegiatan yang teratur guna menentang penjajahan di Indonesia, melawan musuh dari luar negeri ataupun sangat berjasa baik dalam lapangan politik, ketatanegaraan, sosial-ekonomi, kebudayaan, maupun dalam lapangan ilmu pengetahuan yang erat hubungannya dengan perjuangan kemerdekaan dan perkembangan Indonesia.

Tujuan utama dari penulisan biografi pahlawan nasional ini ialah membina persatuan dan kesatuan bangsa, membangkitkan kebanggaan nasional, mengungkapkan nilai-nilai budaya bangsa, dan melestarikan jiwa dan semangat kepahlawanan dalam kehidupan bangsa dan negara.

Di samping itu penulisan biografi pahlawan nasional yang juga bertujuan untuk mengungkapkan kisah kehidupan para pahlawan nasional yang berguna sebagai suri teladan bagi generasi

penerus dan masyarakat pada umumnya. Penulisan itu sendiri merupakan kegiatan memelihara kenangan tentang para pahlawan nasional yang telah memberikan dharmabaktinya kepada nusa dan bangsa, sekaligus juga bermakna sebagai ikhtiar untuk meningkatkan kesadaran dan minat akan sejarah bangsa dan tanah air.

Selanjutnya penulisan biografi pahlawan nasional merupakan usaha dan kegiatan pembangunan yang dapat dimanfaatkan bagi pengembangan pribadi warga negara, serta manfaat bagi pembangunan seluruh masyarakat Indonesia.

Jakarta, September 1981

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional

**KATA PENGANTAR
CETAKAN KEDUA**

Mengingat besarnya perhatian serta banyaknya permintaan masyarakat atas buku-buku hasil terbitan Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional (IDSN), maka pada tahun anggaran 1985/1986 Proyek melaksanakan penerbitan/pencetakan ulang atas beberapa buku yang sudah tidak ada persediaan.

Pada cetakan ulang ini telah dilakukan beberapa perubahan redaksional maupun penambahan data dan gambar yang diperlukan.

Semoga tujuan dan sasaran yang diharapkan dapat dicapai.

Jakarta, Mei 1985

**Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi
Sejarah Nasional**

Penyunting :

1. Sutrisno Kutoyo

2. Drs. M. Soenjata Kartadarmadja

KATA PENGANTAR
CETAKAN KEDUA

Keberhasilan belajar sangat dipengaruhi oleh kemampuan dan ketekunan siswa. Oleh karena itu, dalam proses belajar mengajar, guru harus memperhatikan kemampuan dan ketekunan siswa. Untuk itu, guru harus menggunakan berbagai metode dan media yang dapat meningkatkan kemampuan dan ketekunan siswa. Salah satu metode yang dapat digunakan adalah metode diskusi. Metode diskusi adalah metode pembelajaran yang menekankan pada interaksi antara siswa. Dengan menggunakan metode diskusi, siswa dapat meningkatkan kemampuan komunikasi, kemampuan berfikir kritis, dan kemampuan berkolaborasi. Oleh karena itu, metode diskusi sangat penting untuk digunakan dalam proses belajar mengajar. Dengan menggunakan metode diskusi, guru dapat meningkatkan kemampuan dan ketekunan siswa. Oleh karena itu, guru harus memperhatikan kemampuan dan ketekunan siswa dalam memilih metode dan media pembelajaran. Dengan memperhatikan kemampuan dan ketekunan siswa, guru dapat meningkatkan keberhasilan belajar siswa.

Surabaya, Mei 1982

Penyunting dan Koordinator
Sutrisno Kutoyo

Gambar Kulit :

M. S. Karta.

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMBUTAN DIREKTUR JENDRAL KEBUDAYAAN	v
KATA PENGANTAR	vii
KATA PENGANTAR CETAKAN KEDUA	ix
PENDAHULUAN	1
Bab I Tinjauan Sepintas Daerah Maluku	4
1.1 Sejarah Singkat Daerah Maluku	4
1.1.1 Masa lampau	4
1.1.2 Masa Pergerakan Nasional	8
1.1.3. Masa pendudukan Jepang	11
1.1.4 Masa revolusi fisik sampai sekarang	12
1.2 Pemerintah daerah	18
1.2.1 Maluku Tenggara	21
1.2.2 Maluku Utara	22
1.2.3 Maluku Tengah	22
1.2.4 Kotamadya Ambon	23
1.2.5 Halmahera Tengah	23

Bab II	Sejarah singkat Perkembangan Brimob di Indonesia	25
2.1	Organisasi Brimob	25
2.1.1	Reorganisasi Pertama	26
2.1.2	Reorganisasi Kedua	26
2.1.3	Reorganisasi Ketiga	26
2.1.4	Reorganisasi Keempat	27
2.2.	Perkembangan Brimob pada zaman revolusi fisik	28
2.2.1	Perjuangan Polisi di Jawa Timur	29
2.2.2	Peristiwa Front Demokrasi Rakyat	32
2.2.3	Perkembangan Brimob di Jawa Barat	36
2.2.4	Perkembangan Brimob di Jawa Tengah	41
2.2.5	Perkembangan Brimob di Sumatra	42
2.2.6	Perkembangan Brimob di Maluku	45
2.3	Perkembangan Brimob pada tahun 1950–1955	51
2.3.1	Penumpasan terhadap golongan APRA	51
2.3.2	Penumpasan terhadap pemberontakan Andi Aziz	52
2.3.3	Penumpasan terhadap pemberontakan RMS di Maluku	52
2.3.5	Penumpasan terhadap DI TII	53
2.4	Perkembangan Brimob Tahun 1956 – 1966	60
2.4.1	Penumpasan PRRI/Permesta	60
2.4.2	Trikora (Tri Komando Rakyat)	62
2.4.3	Dwikora (Dwi Komando Rakyat)	65
2.4.4	Peristiwa Cikini	65
2.4.5	Peristiwa Maukar	66
2.4.6	Peristiwa Idhul Adha	66
2.4.7	Detasemen pengawal Pribadi Presiden	66
2.4.8.	Peristiwa percobaan pembunuhan atas Presiden di Makasar	67

Bab III	Kelahiran, kehidupan keluar dan kepribadian Karel Sadsuitubun	69
3.1	Kelahiran	69
3.2	Kehidupan keluarga	74
3.3	Kepribadian Karel Sadsuitubun	77
3.4	Karel Sadsuitubun memasuki Dinas Angkatan Kepolisian Republik Indonesia	80
3.4.1	Perkembangan karier di Maluku	80
3.4.2	Perkembangan karier di Jawa	82
3.4.3	Perkembangan karier di Sumatra	82
3.4.4	Perkembangan karier di Sulawesi	83
3.4.5	Penumpasan PRRI/Permesta	83
3.4.6	Trikora	84
3.4.7	Tugas pengawalan Wakil Perdana Menteri II Dr. Johannes Leimena	85
Bab IV	Gugurnya Karel Sadsuitubun akibat G30S/PKI ..	87
4.1	Tinjauan Sepintas G30S/PKI	87
4.2	Peristiwa Gugurnya Brigadir Polisi Karel Sad- suitubun	99
Bab V	Penutup	102
	Lampiran	103
	Daftar sumber	122

PENDAHULUAN

Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati para pahlawannya. Negara Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 lahir atas jasa para pahlawan bangsa di seluruh pelosok tanah air, dari Sabang hingga Merauke. Luka-derita, cucuran keringat, darah serta tetesan air mata yang mengalir membasahi bumi persada Indonesia merupakan keunikan perjuangan mencapai cita-cita kemerdekaan.

Jasa para pahlawan yang gugur di medan juang bagaikan kusenma bangsa tidak mungkin terlupakan dalam tiap bentuk dan goresan lembaran Sejarah Indonesia sepanjang masa. Oleh karena itu sudah sepantasnya bila nama-nama pahlawan bangsa, baik yang sudah dikenal maupun yang belum, terpahat dengan tinta emas dalam tonggak-tonggak Sejarah Indonesia sesuai dimensi serta gerak dinamika perjuangannya. Dari Surat-surat Keputusan Presiden RI kita kenal enam kategori gelar kepahlawanan yaitu: Pahlawan Perjuangan Kemerdekaan, Pahlawan Nasional, Pahlawan Pembela Kemerdekaan Nasional, Pahlawan Revolusi, Pahlawan Kemerdekaan Nasional, dan Pahlawan Pergerakan Nasional.

Salah satu di antara mereka terdapat nama Pahlawan Revolusi Aipda Anumerta Karel Sadsuitubun. Ia hidup dalam tahun 1928—1965, sebagai seorang bhayangkara Negara Republik Indonesia, abdi negara dan abdi masyarakat.

Ia seorang pemeluk agama Kristen-Katolik yang taat kepada agamanya dan rajin beribadah sejak kecilnya. Ia dilahirkan dan dibesarkan dalam masa penjajahan, karena itu ia sangat anti kepada penjajahan dan penindasan kolonial Belanda. Hal inilah yang mendorong ia memasuki Angkatan Kepolisian Republik Indonesia di Maluku (Ambon), walaupun pada saat itu masa penjajahan Belanda telah berlalu.

Karel Sadsuitubun masuk pendidikan calon agen polisi pada Sekolah Polisi Negara Ambon tanggal 1 Agustus 1951, kemudian diangkat sebagai agen polisi II pada Mobrig DNS Ambon pada 1 Februari 1952, selanjutnya ia dipindahkan pada Mobrig DKN di Jakarta (Cilincing). Sesudah mengikuti Sekolah Mobrig tiga bulan pada SPN Cabang Megamendung, ia ditugaskan untuk sementara selama tiga bulan di Kantor Polisi Propinsi Sumatra Utara (Aceh) (18-2-1955). Kemudian masa tugasnya ini diperpanjang lagi selama tiga bulan (18-5-1955). Sesudah itu ditarik lagi ke Jakarta, ditempatkan di Ciputat. Kurang lebih tiga tahun di Ciputat ia ditugaskan lagi selama enam bulan di Sulawesi Selatan (23-7-1958) kemudian kembali ke Jakarta ditempatkan di Kedunghalang Bogor (1-9-1959). Dari Kedunghalang, Bogor, ia ditugaskan pula ke Sumatra Barat dalam rangka pengamanan PRR1/Permesta selama enam bulan (2-10-1960). Dari sini kembali pula ke Kedunghalang Bogor.

Pada 18 Maret 1963 ditugaskan dalam tugas Trikora selama 10 bulan di perbatasan Irian Barat (Irian Jaya). Sehabis tugas Trikora ditarik lagi ke Kedunghalang dengan kenaikan pangkat brigadir polisi pada 1 November 1963. Selanjutnya ia mendapat tugas untuk pengamanan/pengawalan Wakil Perdana Menteri II (Waperdam II) Dr. J. Leimena di Jl. Teuku Umar, Jakarta. Pada tanggal 30 September 1965 malam, menjelang pagi hari, tanggal 1 Oktober 1965 ia telah berjuang mati-matian menentang pasukan bersenjata Gerakan 30 September/PKI di tempat tugas Pengawalan Waperdam II Dr. Leimena. Menurut keterangan kawannya Lussy, ia berhasil menentang pasukan itu dengan jalan menembak mereka, sehingga gugur pula salah seorang di antara pasukan ini, walaupun ia sendiri telah tertembak, dan dalam beberapa menit kemudian ia terjatuh dan menghembuskan nafas terakhir di tem-

pat tugasnya dengan disaksikan oleh Lussy yang saat itu sedang bersembunyi dalam keadaan siap untuk menembak pula bila gerombolan ini bergerak menuju pintu rumah Dr. J. Leimena.

Karel Sadsuitubun dilahirkan dan dibesarkan di tengah-tengah masyarakat Maluku, oleh karena itu penulisan biografi pahlawan revolusi ini dimulai dengan tinjauan sepintas tentang daerah Maluku, di mana pada mulanya ia memasuki Angkatan Kepolisian Republik Indonesia dan khususnya di Maluku pada saat itu.

Agar diperoleh gambaran yang jelas betapa besarnya pengabdian Karel Sadsuitubun kepada nusa dan bangsa, dalam penyusunan biografi ini juga diuraikan tentang masa tugasnya pada Angkatan Kepolisian Republik Indonesia (Brimob), sejarah singkat G 30 S/PKI dan perjuangan Karel Sadsuitubun menentang G 30 S/PKI sampai akhir hidupnya dan wajarlah bila berdasarkan Surat Keputusan Presiden/Panglima Tertinggi ABRI/Koti tanggal 5 Oktober 1965 No. 114/Kori/1965 secara resmi telah menganugerahkan Pangkat *Ajun Inspektur Polisi II (Aipda) Anumerta dan Gelar Pahlawan Revolusi pada Almarhum Karel Sadsuitubun* yang telah gugur dalam peristiwa Gerakan 30 September/PKI, guna mempertahankan tetap tegak dan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

BAB I. TINJAUAN SEPINTAS DAERAH MALUKU

1.1 *Sejarah Singkat Daerah Maluku*

1.1.1 *Masa Lampau*

Maluku sebagai daerah perebutan bangsa-bangsa Barat oleh karena rempah-rempah dari Daerah Maluku merupakan *luxu artikelen* (1, p.101-120) atau barang mewah, sehingga menarik bangsa-bangsa Barat berlomba-lomba mencari daerah asal cengkih dan pala itu.

Menurut Baron Van Hoevel, cengkih dan pala itu telah dikenal di Negeri Cina sejak tahun 226 S.M. (2, p. 57-59). Sedangkan di Eropa baru dikenal pada abad ke-13, dan ramai diperdagangkan dengan harga yang sangat tinggi, dan pada saat itu hanya digunakan di dapur-dapur orang kaya dan sebagai obat di apotik. Seandainya apa yang dikatakan oleh Baron Van Hoevel itu benar, maka jelas hubungan Maluku dengan Cina sudah ada sejak dahulu kala. Kemungkinan bukan saja dengan Cina, tetapi juga dengan India, Gujarat, dan sebagainya, karena ada pula pendapat bahwa hubungan dagang Indonesia dengan India jauh lebih tua daripada hubungan dengan Cina.

Timbul pertanyaan apakah orang Maluku sendiri yang membawa cengkih ke Cina ataukah orang Cina yang datang ke Maluku

untuk mengambilnya. Hal ini memerlukan perhatian dan penelitian yang mendalam. Yang jelas menurut sumber-sumber yang ada bahwa sejak zaman Sriwijaya, pedagang-pedagang Sumatra (Palembang), Jawa, dan Bugis-Makasar telah ramai mengadakan hubungan dengan Maluku. Para pedagang inilah yang membawa cengkih dan pala ke Makasar (Ujungpandang), Jawa, Sumatra (Palembang) dan seterusnya ke Maluku. Sebaliknya mereka ini pula yang membawa beras, kain-kain, porselin, kayu cendana dan sebagainya ke Maluku. (9, p. 1-10).

Di permulaan abad ke-15, dinasti di Cina giat mengadakan ekspansi lautan untuk meluaskan wilayah-wilayah kekuasaannya serta menguasai jalan dagang. Tepat pada saat ini bangsa Eropa sedang haus akan rempah-rempah itu, di awal abad ke-16, dan motivasi inilah yang menyebabkan bangsa-bangsa Barat menemukan Indonesia. Mula-mula Portugis, Spanyol kemudian Belanda, disusul dengan Inggris, Perancis dan sebagainya. Muncullah tokoh Columbus mencari jalan ke India, disusul Vasco de Gama, Albuquerque, Anthonie d'Abrue, Magelhaens, dan lain-lain.

Timbullah persaingan yang hebat antara mereka. Cengkih dan pala membawa berkat kekayaan bagi daerah dan rakyat Maluku karena pamor dan harganya menjulang tinggi di mata dunia internasional. Tetapi cengkih dan pala juga membawa bencana bagi daerah dan rakyat Maluku, oleh karena sejak tibanya bangsa Barat di Maluku selalu timbul huru-hara dan peperangan antara bangsa Barat itu dan antara bangsa Barat dengan orang Maluku, serta antara rakyat dengan rakyat Maluku sendiri, juga antara keluarga dengan keluarga, orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, saudara dengan saudara dan sebagainya (17, p. 351-363). Peperangan melawan bangsa Portugis, Spanyol, Inggris dan Belanda selama ratusan tahun, menyebabkan martabat kejayaan kerajaan-kerajaan Maluku di masa lampau menjadi suram, penuh luka derita dan azab sengsara serta rintihan jiwa. Belanda melaksanakan bumi hangus terhadap tanaman cengkih dan pala rakyat Maluku dalam Perang Hongi (*Hongitochten*) yang mengakibatkan turunnya harga rempah-rempah itu di pasaran dunia. Selama 350 tahun Belanda bercokol di Maluku, Maluku kehilangan pamor dan kejayaannya sama sekali di mata internasional. Pendidikan sangat

kurang diperhatikan, ekonomi hancur sama sekali, industri tidak ada, pertanian dan peternakan diterlantarkan sama sekali.

Pemerintah Kolonial Belanda mulai mengubah pandangan ke arah tanah-tanah harapan, yaitu Jawa dan Sumatra yang memberikan kemungkinan bagi eksploitasi yang menguntungkan Pemerintah Kolonial Belanda. Maluku sudah dianggap sepele dan tak berarti bagi Belanda, Maluku sudah tidak punya arti ekonomis untuk kepentingannya.

Maluku adalah masa lampau dalam kaca mata Pemerintah Kolonial Belanda, muncullah kata-kata bersayap bangsa penjajah mengenai peranan Maluku di mata kaum kolonial yang dilukiskan sebagai berikut, "*Maluku is het verleden, Java is het heden, Sumatra is de toekomst*" (13, p.19) artinya, Maluku itu masa lalu, Jawa masa sekarang, dan Sumatra itu masa depan atau masa harapan.

Demikianlah luka derita serta azab sengsara telah menimpa Daerah Maluku ini selama 3½ abad lamanya. Penindasan dan penekanan kolonialisme Belanda di Maluku inilah yang menyebabkan rakyat Maluku bangkit melawan penjajahan ini terus-menerus. Api peperangan berkobar di sana-sini tiada henti-hentinya, walaupun perlawanan rakyat ini seluruhnya dapat dipatahkan oleh Pemerintah Belanda, dan tidak menghasilkan kemerdekaan. Tetapi jelas Perang Majiras/Hoamual, Perang Iha, Perang Alaka/Hatuhaha Amarima, Perang Hitu dan akhirnya Perang Lease Sapa-rua/Perang Pattimura di bawah pimpinan Thomas Matulesy Kapitan Pattimura telah berhasil menanamkan patriotisme, idealisme serta nasionalisme di dalam dada dan darah rakyat Maluku yang kemudian muncul bersama seluruh saudara-saudaranya dari segenap lapisan bumi Persada Indonesia di dalam perjuangan yang terorganisasi menuntut kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Muncullah kemudian Sarekat Ambon, Inatuni, *Yong Ambon*, dan sebagainya dalam perjuangan nasional.

Peperangan melawan kolonialisme di Maluku dilukiskan oleh datuk-datuk rakyat Maluku dengan lagu-lagu perjuangan menentang Kompeni. Menurut Dra. MR. Lestaluhu, salah satu lagu tua yang ditemukan dalam bahasa daerah Maluku tersebut adalah sebagai berikut:

"Kumpanyia, Kuraing Hongi"

"Nusa Ina Laihalat Ria Huanualo,
 Lawaloto Hatawano Kuraing Ama Ohalo,
 Hatuhaha Amarima Lounusa Loto Alaka,
 Lawa hale Kapahaha Halenusa Hituo,
 Yami Pana Nono Upu Lahato,
 Isi Pa-la-ne waayami Lahano,
 Kupunya Iarai Kuraing Hongi ale,
 Puna leka rahamate sioh,
 Puna leka Huamual Rahato,
 Amaihal Kapahaha Lahano,
 Puna tihi basudara ale,
 Isi lawa Hari nusa sioh,
 Lawa Hanu Hiti Were,
 Baka-bala Kuraing Kapitang,
 Tombak Kura Salawuku tantang ia Kumpanyia,
 Kumpanyia Kuraing Hongi Irai mala lokono,
 Aha Toone upu Palane wayami".

Lagu tua tersebut di atas mengisahkan "Perang melawan VOC dengan Hongitochtennya". "Sebelah Barat Pulau Seram di Jazirah Hoamual, di jazirah Hatawano dengan Kerajaan Ijanya, Lima Negeri di Hatuhaha yang terpusat di Bukit Alaka, begitu pula di Kapahaha yang terletak di jazirah itu, kami dengar cerita dari para leluhur kami, VOC datang dengan Hongitochtennya membawa malapetaka, dihancurkan Hoamual, Kerajaan IHA, Hatuhaha, dan Kapahaha, memutuskan persaudaraan sehingga mereka tinggalkan kampung halaman. Lari bangun bangkit berdiri penduduk negeri dengan pemimpinnya, bersenjatakan tombak parang dan salawaku menentang VOC, VOC dengan *Hongitochtennya* mendatangkan kemelaratan, demikian para leluhur/datuk bercerita kepada kami", salah satu dari lagu-lagu perjuangan rakyat Maluku dalam menentang penjajahan Belanda yang dilukiskan dalam *bahasa tanah* (bahasa daerah) Maluku, diterjemahkan oleh Dra. MR. Lestaluhu.

Fakta nyata bekas benteng-benteng Kompeni di Luhu Hoamual, *Duurstede* di Saparua, *Nieuw Victoria* di Ambon, *Nieuw Hoarn* di Hatuhaha, *Beverwyk* di Sila Leinitu (Nusalaut), Saupaulo di

Ternate, merupakan bukti-bukti mutlak adanya perlawanan rakyat Maluku menentang kolonialisme Belanda di Maluku. Benteng-benteng Belanda ini dibuat karena Belanda takut terhadap penyerangan sewaktu-waktu oleh rakyat Maluku. Jelas Maluku tertindas dan tertekan, karena rakyat Maluku dianggap satu-satunya suku bangsa di Indonesia yang suka melawan dan sukar untuk dikendalikan. Belanda mulai berpikir bagaimana agar kelebihan tenaga dan kekuatan rakyat Maluku dapat dialihkan sebagai alat politik penjajah ini untuk menaklukkan daerah-daerah lain di Indonesia.

Itulah sebabnya rakyat Maluku diperalat sebagai kekuatan militer Belanda, sehingga kita kenal serdadu-serdadu Belanda ini sebagian besar adalah orang Maluku, yang mereka sendiri pada saat itu belum menyadari bahwa mereka itu diperbudak dan dijadikan kuda beban penjajah semata-mata.

1.1.2 *Masa Pergerakan Nasional*

Pada masa pergerakan nasional, rakyat Maluku tidak lagi menggunakan tombak, parang (golok) dan *selawaku* untuk menentang Belanda. Pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia khususnya pemimpin-pemimpin suku Maluku sudah mempunyai pengalaman dan telah banyak mengalami kegagalan pada masa yang lampau, karena itu mereka mulai berpikir secara baru serta melihat perkembangan-perkembangan akibat peningkatan taraf berpikir melalui pendidikan Barat yang mereka peroleh.

Mereka mulai menggunakan cara-cara yang moderen serta menerapkan pola pikir Barat dalam hal berserikat dan berkumpul serta menyusun organisasi-organisasi berskala nasional, lugas serta demokrasi. Dengan demikian tumbuhlah di Maluku organisasi-organisasi massa, partai-partai politik sosial ini merupakan organisasi-organisasi perjuangan yang bersifat kedaerahan bertujuan mempersatukan putera-puteri Indonesia asal Maluku dan secara bersama-sama dengan organisasi-organisasi lain dari segenap suku bangsa secara nasional berjuang untuk mencapai kemerdekaan Negara Republik Indonesia.

Pada halaman ini tokoh-tokoh Maluku yang terkenal adalah Alexander Yakob Patty, D. Ayawaila, E.U. Pupela, Dr. Sitanala, Dr. Latumeten, Mr. J. Latuharhary, Dr. J. Leimena, Dr. M. Haulusy, Dr. Kayadu, Dr. JD. Siahaya, Ir. M. Putuhena, Dr. G. Siwabesy, J. de Fretes, Dr. Westplat, A.E. Kayadu, JMM. Hetaharia,

PR de Queljoe, JL. Matulatuwa, RM Mochtar, Abraham Barmella, AA. Parera, CF. Rhibok, Dominggus Syaranamual dan lain-lain.

Kalau di Jawa terkenal Chairil Anwar, maka di Maluku terkenal Dominggus Syaranamual seorang pujangga dalam perjuangan nasional di Maluku, dengan sajak-sajak perjuangannya (Surat dari Laut, Pelarian Terakhir, Gema Pulau Sagu). "Sarekat Ambon" dipimpin Alexander Yacob Patty berdiri di Semarang pada tanggal 9 Mei 1920. Organisasi ini merupakan organisasi politik pertama kali didirikan oleh putra-putri Maluku dalam perjuangan mencapai kemerdekaan. Tujuan organisasi ini adalah untuk menyejahterakan rakyat Maluku. Untuk mencapai tujuan ini, dilancarkan seruan bahwa sangat diperlukan suatu persatuan dan kesatuan Ambon dan Le Lease (Haruku, Saparua, Nusalaut). Karenanya diperjuangkan berdirinya *Ambon Raad* pada tahun 1921.

Sedikit demi sedikit Sarekat Ambon ini diarahkan oleh Alexander Yacob Patty ke arah nasionalisme seperti ide-ide yang telah ditanamkan oleh *Indische Partij*. Sarekat Ambon merupakan organisasi yang sangat radikal dalam menentang pemerintahan kolonial. Organisasi ini berkembang sangat pesat di seluruh Pulau Jawa dan Sumatra bagi putra/putri Maluku. Organisasi wanita dari Sarekat Ambon bernama *Ina Tuni* turut berpartisipasi dalam pergerakan nasional.

Semua gagasan dan cita-cita perjuangan Sarekat Ambon dan Ina Tuni disalurkan melalui masa media *Mena Muria*. Tahun 1923 Alexander Yacob Patty tiba di Ambon dan mempropagandakan ide Sarekat Ambon. Ide ini mendapat sambutan hangat dari seluruh pemimpin-pemimpin organisasi sosial yang telah ada, misalnya *Nusa Ina*, *Ambonsche Studiefonds* Cabang Ambon en *Christelyk*, *Ambonsche Studiefonds*, *Christelyk Ambons Volkbonde* *Sou Maloekoe*, *Inlandsch Leeraarsbonde*, Persatuan Guru Hindia Belanda dan sebagainya.

Dengan cepat sekali ide Sarekat Ambon berkembang dan Alexander Yacob Patty disambut hangat oleh segenap lapisan masyarakat Maluku. Namun lawan dari AJ. Patty juga cukup banyak, yaitu sebagian raja/patih dari negeri-negeri yang masih setia kepada kolonialisme yang takut kehilangan peranan dan kekuasaannya di tengah-tengah rakyatnya.

AJ. Patty berjuang dan pada tahun 1924 ia dengan beberapa kawannya dilantik sebagai anggota *Ambon Raad*. Musuh-musuh AJ. Patty mulai melancarkan isu dan fitnah terhadap diri AJ. Patty dan menuduh bahwa AJ. Patty dan teman-temannya telah bertindak melawan hukum. AJ. Patty ditangkap dan diadili oleh *Raad Van Justitie* yang berkedudukan di Makasar pada tahun 1924. Kemudian dengan keputusan Gubernur Jenderal tahun 1925 ia dibuang ke Bengkulu, dan terakhir dibuang ke Boven/Digul, ke Bandung, dan di sanalah ia meninggal. Sejak saat penangkapan dan pembuangan AJ. Patty, maka tokoh-tokoh Sarekat Ambon terancam dan selalu diburu-buru dan dikejar-kejar. Sarekat Ambon berada dalam keadaan gawat. Dengan Surat Kabar *Soera Ambon*, Sarekat Ambon tetap memelihara kekompakan anggota-anggotanya melalui pembinaan ide organisasi ini. Walaupun dikejar-kejar, para tokoh maupun anggota Sarekat Ambon tetap berjuang dan anti Belanda. Mereka banyak yang ditangkap dan ditekan. Muncullah tokoh muda pengganti Alexander Yacob Patty untuk memimpin Sarekat Ambon di Jawa.

Tokoh muda penuh semangat perjuangan, cerdas pandai, genius dan intelek. Dia adalah Mr. Johanus Latuharhary yang sehari-harinya terkenal dengan nama Oom Janes. Dengan segala kewibawaan dan kemampuan serta kepintaran yang ada padanya, ia berhasil melanjutkan usaha Alexander Yacob Patty dalam memimpin Sarekat Ambon di tengah-tengah pergerakan nasional.

Sarekat Ambon di bawah pimpinan Mr. J. Latuharhary ini berjuang bersama-sama gerakan-gerakan politik lainnya. Suku-suku bangsa lainnya di Indonesia ini, di samping partai-partai politik maupun organisasi-organisasi massa lainnya. (13, p.20-21)

Sarekat Ambon di bawah pimpinan Mr. J. Latuharhary berkembang begitu pesat sehingga pada tahun 1926 organisasi Sarekat Ambon ini dapat mempersatukan seluruh pemuda/pemudi Maluku di seluruh Indonesia di dalam satu organisasi besar yang disebut *Jong Ambon* atau *Pemuda Ambon*. *Jong Ambon* ini muncul bergandengan dengan munculnya *Jong Java*, *Jong Sumatera*, *Jong Celebes*, Pemuda Pasundan dan lain sebagainya datang turut memberi andil dalam Kongres Pemuda Indonesia di Jakarta tahun 1928, serta turut mencetuskan ikrar dan Sumpah Pemuda tahun

1928. Empat belas hari sebelum Sumpah Pemuda, tepatnya tanggal 14 Oktober 1928 lahirlah Karel Sadsuitubun di Rumadian, Debut, Maluku Tenggara.

Selanjutnya di Ambon sendiri Sarekat Ambon dipimpin oleh J.L. Matulatua, kemudian diganti oleh D. Ayawaila seorang tokoh nasionalis yang sangat luar biasa pengaruhnya. Tahun 1929 D. Ayawaila meninggal akibat tekanan Belanda dan diganti oleh E.U. Pupela seorang nasionalis/republiken. Pupela inilah yang mengembangkan Partai Nasional Indonesia (PNI) di Maluku, yang semula disebut *Partai Indonesia Merdeka*. Ia juga memberikan arah serta membantu dalam banyak hal di bidang pendidikan dan kebudayaan serta adat-istiadat daerah Maluku. Pengaruhnya di dalam politik maupun bidang pendidikan dan kebudayaan meluas ke Ternate, Maluku Utara, Maluku Tengah dan sampai ke Maluku Tenggara.

1.1.3 Masa Pendudukan Jepang

Pada masa ini tidak banyak yang dapat dicatat, karena pendudukan Jepang selama 3½ tahun ini terlalu singkat. Yang jelas sistem pemerintahan maupun sistem politik pada saat ini diarahkan untuk kepentingan perang Asia Timur Raya. Pada saat ini pemerintah Jepang di Maluku diatur menurut pembagian wilayah kekuasaan, yaitu: Pemerintahan Angkatan Laut yang berpusat di Biak.

Dalam 3½ tahun ini Jepang berusaha keras untuk menjepangkan rakyat Maluku. Pendidikan olahraga (*taiso*) dan pendidikan militer *heiho* diciptakan di tengah-tengah masyarakat, khususnya pemuda, agar para pemuda mencintai Jepang. Selain itu banyak tentara Belanda (KNIL) asal Maluku maupun para pensiunan Belanda dibunuh secara kejam. Para pendeta dituduh mengajar ajaran-ajaran Belanda di gereja-gereja pada setiap Minggu karena itu para pendeta juga diawasi dan ada pula yang mati dibunuh. Persatuan para pensiunan terkenal juga dengan *Persatuan Timur Besar* sangat dimusuhi. Kira-kira dua bulan sebelum bom atom jatuh di Hiroshima dan Nagasaki, Jepang telah mendirikan rumah-rumah pelacuran (*rumah panjang*) untuk membinasakan gadis-gadis muda di Maluku.

Selain itu mereka merencanakan untuk membunuh semua orang dewasa (tua). Sedangkan yang dapat dibiarkan hidup hanya

generasi muda, yang telah dididik berbahasa Jepang maupun yang masih kecil yang belum tahu apa-apa. Hal ini membangkitkan kebencian dan kemarahan rakyat Maluku yang luar biasa, terhadap Jepang, sehingga hampir saja timbul perang besar antara rakyat Maluku dengan Jepang.

Pada saat Jepang akan melaksanakan ide dan cita-citanya yang buruk ini, turunlah anugerah dan karunia Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang bagi bangsa Indonesia, dan rakyat Maluku khususnya. Jepang diserang oleh tentara Sekutu. Bom atom jatuh di Hiroshima dan Nagasaki, Jepang menyerah tanpa syarat. Tentara Sekutu/Australia masuk dan mengambil alih pemerintahan di Maluku kemudian diserahkan kepada Belanda lagi. Rakyat Maluku mulai marah kembali, mengingat Kota Ambon telah habis dimakan api, kemiskinan dan kemelaratan sangat terasa di kalangan rakyat Maluku, akibat kehilangan rumah dan harta benda dan banyak jiwa kekasih-kekasihnya telah gugur akibat kekejaman Jepang.

1.1.4 *Masa Revolusi Fisik Sampai Sekarang*

Setelah Jepang menyerah kepada Sekutu, maka di Maluku kekuasaan diserahkan kepada tentara Sekutu (Australia) untuk sementara waktu. Kemudian secara bertahap Sekutu menyerahkan kembali kekuasaan itu kepada pemerintah Belanda (NICA). Rakyat Maluku yang pada umumnya sudah tidak senang kepada Belanda, mulai mengadakan gerakan-gerakan.

Partai-partai politik tetap memainkan peranannya dan sebagian besar rakyat anti Belanda. Yang menginginkan Belanda kembali hanya golongan raja/patih dan orang kaya. Mereka ini selalu bertolak belakang dengan kemauan rakyat, oleh karena mereka takut akan kehilangan kedudukan, kewibawaan serta kekuasaan mereka yang secara turun-temurun itu.

Rakyat berusaha membrontak terhadap Belanda, tetapi selalu perjuangan mereka dipatahkan oleh Belanda dengan bermacam-kelihain dan tipu muslihat politiknya. Kemudian Maluku masuk di dalam Negara Indonesia Timur (NIT) dan pada saat itu diperintah oleh seorang Residen. Residen yang memerintah pada waktu itu adalah Residen M. Pelaupessy yang berkedudukan semacam gubernur. Perjuangan pada masa revolusi fisik

di Maluku ini selalu mengikuti arah dan gerak perjuangan nasional yang berpusat di Jawa. Setelah pengakuan kedaulatan 27 Desember 1949 kepada rakyat Indonesia, maka keadaan di Maluku sangat genting.

Timbul bermacam-macam isu Belanda yang dilancarkan oleh kaki tangan politik yang pada umumnya mengadudombakan suku dengan suku, sehingga putus hubungan sama sekali antara Jawa dan Maluku. Pengawasan terhadap tokoh-tokoh politik diperketat. Belanda berusaha sekuat tenaga untuk tetap menanamkan kembali kekuasaannya di Maluku. Beberapa orang inteligensia Maluku diperalat untuk menentang aspirasi, inspirasi dan motivasi cita-cita kemerdekaan Negara RI.

Usaha separatisme yang didukung oleh kekuatan-kekuatan KNIL yang berada di Ambon berhasil melahirkan *Republik Maluku Selatan* atau *RMS*. Masalah ini disebabkan karena setelah tercapai persetujuan KMB, di kalangan bangsa Belanda (anggota-anggota KNIL) umumnya, dan anggota-anggota KNIL yang berasal dari daerah Maluku Selatan khususnya dipengaruhi Belanda begitu hebat, sehingga di antara mereka timbullah keresahan-keresahan. Anggota-anggota KNIL dipengaruhi, bahwa mereka tidak akan mendapat tempat di dalam Angkatan Perang RIS (APRIS), mereka pasti akan dirugikan. Tentu mereka ini marah dan takut kehilangan pekerjaan. Kekhawatiran mereka makin bertambah lagi, setelah Belanda melancarkan propaganda yang menyesatkan sehingga situasi di Maluku menjadi gawat. Belanda dan kaki tangannya telah memberikan pengertian yang salah terhadap bekas anggota-anggota KNIL itu. Di antara beberapa oknum itu yang paling memainkan peranan dan menjadi buronan pemerintah RIS adalah Mr. Dr. Ch. RS. Soumokil dan Ir. Manusama. Pembontakan RMS itu sebetulnya merupakan bagian lanjutan dari pemberontakan Andi Azis di Makasar. (22, p.418-426)

Mr. Dr. Soumokil adalah seorang "federalis fanatik" yang tetap membela atau mempertahankan berdirinya Negara Indonesia Timur, walaupun harus menggunakan kekerasan senjata atau cara lain, asal saja NIT harus terpisah dari RI. Dr. Soumokil pada waktu itu berkedudukan selaku Jaksa Agung NIT di Makasar (sekarang Ujungpandang). Dan dia pula merupakan salah seorang tokoh dalam pemberontakan Andi Azis di Makasar menentang RIS.

Pada waktu dilakukan penumpasan terhadap Pembrontakan Andi Azis, Soumokil berhasil melarikan diri ke Ambon, dengan menumpang sebuah pesawat KLM milik perusahaan penerbangan Belanda lewat Manado. Dan dari Manado lewat Ternate, Soumokil tiba di Ambon.

Insiden-insiden ini sebenarnya mulai terjadi di Ambon pada saat Konferensi Meja Bundar di Den Haag antara RI dengan Belanda pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949, di mana Belanda akhirnya mengakui kedaulatan RI. Setelah pengakuan kedaulatan kepada RI tanggal 27 Desember 1949 maka pada tanggal 17 Agustus 1950 secara resmi RIS diganti dengan Republik Indonesia, dan Maluku yang tadinya merupakan salah satu propinsi di dalam RIS otomatis menjadi salah satu propinsi dari Republik Indonesia, oleh karena setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan berdirinya Negara Republik Indonesia, maka secara *de jure* daerah Maluku adalah wilayah Republik Indonesia. Secara *de facto* memang pada saat itu Maluku belum dapat diduduki oleh pemerintah RI maupun TNI, karena setelah Jepang menyerah, NICA (pemerintah Belanda) telah membonceng pada tentara Sekutu untuk menduduki kembali daerah Maluku, dan setahap demi setahap mengambil-alih kekuasaan/pemerintahan. Hal ini menyebabkan pemerintah Propinsi Maluku dalam negara RI untuk sementara harus berkedudukan di ibukota Jakarta, kemudian pindah ke Yogyakarta di bawah pimpinan Mr. Johanis Latuharhary selaku gubernur Propinsi Maluku I sesudah Proklamasi Kemerdekaan.

Keadaan politik pada saat itu sangat menguntungkan Mr. Dr. Soumokil untuk lebih meruncingkan situasi serta berhasil menanamkan pengaruhnya. Bentrokan-bentrokan fisik mulai terjadi di Ambon pada tanggal 17 Januari 1950, yaitu pada saat tentara KNIL (baret hijau) tiba di Ambon. Tanggal 18 Januari 1950 terjadi rapat raksasa di kota Ambon di mana hadir seluruh masyarakat termasuk seluruh anggota Persatuan Timur Besar (pensiunan-pensiunan KNIL).

Dalam rapat raksasa ini Ir. Manusama mengatakan bahwa Maluku dapat berdiri sendiri dan tidak mau dijajah oleh golongan-golongan lain (Republik Indonesia). Dikatakan juga bahwa Republik Indonesia itu adalah ciptaan Jepang, sehingga wajarlah kalau Maluku tidak menerima TNI memasuki wilayahnya, dan

Maluku tidak mengakui RI hasil ciptaan Jepang itu. Di samping itu Mr. Dr. Soumokil selalu melanjutkan usaha kontra revolusi dengan mendapatkan dukungan dan dorongan penuh dari kolonialis Belanda dan antek-anteknya. Keadaan makin lama makin genting, dan akhirnya diproklamasikannya "Republik Maluku Selatan" (RMS) pada tanggal 25 April 1950 sebagai negara yang tidak mempunyai hubungan sama sekali dengan RIS maupun NIT, dengan Presiden Manuhutu dan Perdana Menteri A. Wairisal, Gasperan selaku Menteri Dalam Negeri RMS. Dapat dikatakan mulai saat itu RMS merupakan suatu pemerintahan yang memberontak terhadap negara RIS yang sah, dan hal ini merupakan "negara di dalam negara". Pada waktu itu Soumokil dan kawan-kawannya telah menggunakan kekerasan senjata terhadap semua orang di Maluku yang tak mau mendukung RMS.

Untuk menyelesaikan masalah ini secara baik, dengan menghindari pertumpahan darah, mengingat banyaknya korban di Maluku pada Perang Dunia II, maka pemerintah RIS tidaklah gegabah untuk bertindak. Pemerintah RIS berusaha menyelesaikan masalah ini secara baik dengan jalan damai. Untuk itu pemerintah RIS mengirimkan utusan yang terdiri dari tokoh-tokoh Maluku di Jakarta, yaitu Dr. J. Leimena selaku ketua delegasi, dengan anggota-anggotanya Ir. M. Putuhena, M. Pelaupessy dan Dr. Rehata yang berangkat dari Jakarta ke Ambon dengan kapal laut. Tiba di Ambon, mereka minta berunding dengan para pemimpin RMS, tetapi mereka menolak tawaran Leimena dan kawan-kawannya itu. Delegasi ini tidak berhasil dan kembali ke Jakarta. Usaha pemerintah RIS tidak berhasil menempuh jalan damai, maka tidak ada jalan lain lagi selain mengadakan blokade dan operasi militer dari lautan, daratan maupun udara terhadap RMS ini. Untuk itu diberangkatkan Kolonel AE. Kawilarang, Panglima Tentara dan Teritorium Indonesia Timur, di samping dipersiapkan pula Divisi Siliwangi dan pasukan-pasukannya yang terdiri dari Batalyon "3 Mei", Batalyon "Lucas" dan Batalyon "AW 3", maupun batalyon-batalyon dari Jawa Tengah, Nusa Tenggara, Sumatra Selatan dan sebagainya berjumlah 11 batalyon dibagi atas dua kompi. Pendaratan pertama dilakukan di Pulau Buru, tanggal 14 Juli 1950 dan dua hari kemudian berhasil direbut TNI.

Kemudian TNI mendarat di Pulau Seram, Tanimbar, Aru, Kei dan pulau-pulau kecil terselatan. Menurut keterangan Kapten TNI AD Purnawirawan Jony Yudo yang turut berjuang saat itu, tanggal 28 September 1950 dimulai operasi pendaratan pertama kalinya di Pulau Ambon, dipimpin oleh Kolonel Kawilarang, Panglima Tentara dan Teritorium Indonesia Timur itu.

Langkah pertama berhasil mendaratkan 3000 prajurit TNI di sebelah utara Pulau Ambon, yaitu di Hitu dan Tulehu. Kemudian dari sini mereka secara perlahan-lahan melancarkan serangan ke Passo sebagai sentral dari Pulau Ambon. Di sini TNI mengalami kelambatan menduduki kota Ambon, karena memang KNIL Ambon ini terkenal dalam pertempuran-pertempuran hingga kuat juga pertahanannya. Operasi militer lanjutan dibagi atas tiga grup, yaitu Grup 1 sebagai grup gabungan, Grup 2 dan Grup 3 di bawah pimpinan Mayor Suryo Subandrio dengan Batalyon Banteng Merah yang mendarat di Hitu, dan Grup 2 di bawah komando Letnan Kolonel Slamet Rijadi dengan Batalyon-batalyon Worang Claproth 3 Mei, Machmud dan 352 mendarat di Tulehu.

Ambon dikepung dari segala jurusan. Begitu pula AURIS menembak dari udara terhadap kubu-kubu pertahanan RMS dengan pesawat Harvard dan pembom B-25. Tanggal 3 Oktober 1950 terjadi serangan besar-besaran, tetapi APRIS belum berhasil menduduki kota Ambon. Banyak anggota TNI yang meninggal akibat serang-menyerang dan RMS mempertahankan mati-matian kedudukannya di kota Ambon.

Tanggal 11 Oktober 1950 datang lagi pasukan-pasukan tambahan APRIS dari Jawa diterbangkan ke Namlea untuk menyerbu kota Ambon. Tanggal 3 November 1950 penyerangan TNI diatur sedemikian rupa sehingga terbentuk pasukan gabungan, yaitu Grup 2 menyerang dari Hitu, dan Grup 3 menyerang dari Tulehu dengan dibantu Grup 1, panzer dan tank-tank dan senjata berat menembak jarak jauh, akhirnya RMS tidak bisa bertahan. RMS mundur, kota Ambon dapat direbut. Namun RMS masih tetap berusaha melawan juga, sehingga masih terjadi pertempuran seorang lawan seorang oleh Grup 1 di bawah pimpinan Mayor Achmad Wiranatakusumah untuk selanjutnya Grup 1 ini melanjutkan penggemuruhannya ke Benteng *Nieuw Victoria*, basis pertahanan terakhir RMS, dan dapat merebutnya dari pihak RMS.

RMS menggunakan siasat perang gerilya dengan jalan menyamar serta menggunakan pakaian dan tanda pangkat TNI beserta bendera merah putih, kemudian tiba-tiba menyerang TNI, sehingga tidak bisa dipastikan mana TNI mana RMS, mana kawan mana lawan. Keadaan ini sangat kacau tatkala pihak Grup 2 yang dipimpin Letkol Slamet Rijadi memasuki kota Ambon. Oleh karena sukar membedakan mana kawan mana lawan, Letkol Slamet Rijadi pada waktu itu tidak menyangka bahwa dalam mobil pasukan yang menggunakan pakaian TNI dan membawa bendera merah putih melewati depan *Nieuw Victoria* itu adalah RMS. Kebetulan ia berada di depan benteng dan tidak segera menghindarkan diri dari depan benteng, sehingga dapat ditembak oleh pasukan RMS, mengakibatkan Letkol Slamet Rijadi luka parah, dan meninggal pada saat itu juga. Hal ini menyebabkan APRIS/TNI lebih marah lagi dan mengatur operasi pembersihan besar-besaran di kota Ambon dan sekitarnya. RMS tidak bisa bertahan, mereka mundur ke daerah Kayuputih dan Soya untuk berusaha melakukan serangan gerilya lagi, tetapi akhirnya dilumpuhkan sama sekali oleh TNI. RMS mundur ke Pulau Haruku, Saparua dan Nusalaut (Kepulauan Lease). Kemudian Haruku, Saparua dan Nusalaut ini direbut pula oleh TNI.

Pasukan RMS dan Mr. Dr. Soumokil lari ke pedalaman Pulau Seram, dan berusaha untuk menanamkan kewibawaannya sebagai pemimpin RMS dengan jalan teror kepada rakyat. Cukup lama juga RMS ini bertahan di pedalaman Seram, yaitu 13 tahun barulah Mr. Dr. Soumokil tertangkap. Setelah kota Ambon berada di tangan TNI, maka keamanan ibu kota Propinsi Maluku ini setahap demi setahap dapat dipulihkan dan pemerintah daerah mulai diatur dengan tibanya Gubernur Maluku I Mr. Johanis Latuharhary dari Jakarta dan pengangkatan Letkol Sokowati selaku Komandan Resimen Pattimura I (waktu itu belum ada Kodam XV Pattimura) kemudian tidak lama diganti dengan Kolonel Herman Pietersz selaku Pangdam XV/Pattimura I (pertama).

Mr. Dr. Soumokil dan sisa-sisa RMS di pedalaman Pulau Seram tetap menjadi buronan TNI dan Mobile Brigade (Mobrig) di bawah pimpinan Komisaris Polisi Karamoy (pimpinan Mobrig I di Maluku). Berkat anugerah Tuhan dan jasa-jasanya Kodam Sili-

wangi tanggal 10 Mei 1963 Brigif 15/Tirtayasa di bawah pimpinan Letkol Musa Natakusumah dengan pasukan Yon 310, 315 dan 320 diperintahkan untuk menyelesaikan petualangan Mr. Dr. Soumokil dan sisa-sisa RMS di pedalaman Seram itu. Waktu itu Panglima Kodam XV/Pattimura adalah Brigjen Busiri.

Begitu tangkas dan cekatannya putra-putra Siliwangi ini dalam hal beroperasi, maka pada tanggal 12 Desember 1963 Peleton II Kompi II Yon 320 di bawah pimpinan Pelda Ruchyat berhasil menangkap hidup-hidup Mr. Dr. Soumokil di Wahai (Seram Utara). Soumokil dibawa ke Ambon dan diserahkan kepada Pangdam XV/Pattimura Brigjen Busiri, dan selanjutnya Soumokil diterbangkan ke Jakarta, diadili oleh Mahkamah Militer Luar Biasa di Jakarta pada pertengahan tahun 1965 dan dijatuhi hukuman mati, kemudian atas perintah Dr. Subandrio menjelang pecahnya G 30 S/PKI Soumokil ditembak mati di Pulau Seribu setelah selesai didoakan oleh Pendeta A. Souisa. Berkat karunia Tuhan dan jasa-jasa Peleton II Kompi II Yon 320 Korps Siliwangi dalam pembersihan sisa-sisa RMS di Pulau Seram itu maka daerah Maluku aman sampai sekarang.

Dengan demikian tidak ada lagi pengaruh RMS di Maluku hingga tidak perlu lagi dicurigai, bahwa daerah Maluku masih merupakan daerah rawan, karena masih belum bersih dari pengaruh sisa-sisa RMS. Hal ini terbukti jelas dengan pernyataan DPRD I Maluku yang telah menyatakan mengutuki apa yang menamakan dirinya RMS di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Tidak ada seorang pun di antara rakyat Maluku yang tidak setia dan tunduk pada pemerintah yang sah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

1.2 *Pemerintah Daerah*

Sejak abad ke-18 sampai dengan tahun 1934, sebelum Perang Dunia II, Maluku berstatus propinsi. Sejak tahun 1925 Propinsi Maluku dibagi dalam dua keresidenan, yaitu Keresidenan Ternate dan Keresidenan Ambon, diperintah oleh seorang gubernur. Keresidenan Ambon dibagi atas 15 *onderafdeeling*, dan keresidenan (*Afdeeling*) Ternate atas 12 *onderafdeeling*. Keresidenan diperintah oleh seorang residen, sedangkan *onderafdeeling* diperintah oleh seorang asisten residen.

Di samping itu terdapat Pemerintah Kotamadya Ambon (*Staatsgemeente Ambonia*) yang diperintah *burgemeester*. Di Kota Ambon pada saat itu terdapat suatu badan yang menyuarakan suara dari para raja/patih (*latupatih*) yang disebut *Ambonraad* merupakan gabungan dari *Regentenbond* (dewan legislatif). Daerah-daerah yang termasuk dalam wilayah Pemerintahan Propinsi Maluku (*Grote Oost*) ini adalah bagian-bagian dari wilayah Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, Irian Jaya (*Iramasuka*).

Keadaan pemerintahan Propinsi Maluku pembentukan Kolonial Belanda ini berlangsung sampai dengan tahun 1938 (sebelum Perang Dunia II). Sejak tahun 1938 ditambah lagi satu keresidenan, yaitu Keresidenan Tual dengan ibu kotanya Tual yang diperintah seorang residen. Di Maluku Utara dibentuk tiga swapraja, yaitu Kesultanan Ternate, Tidore dan Bacan yang melaksanakan *Zelbestuur Regeling*, dan pemerintahan semacam ini berlaku sampai masuknya tentara Jepang di Maluku.

Sewaktu pendudukan Jepang, tata pemerintahan tidak banyak berubah. Hanya pemerintahan pada zaman pendudukan Jepang ini lebih bersifat militer. Tentu ada juga para pejabat pemerintahan sipil (*Minseibo Cokan*) tetapi pemerintahan militer Jepang selalu membatasi pemerintahan sipil itu, sehingga wewenang pemerintahan sipil itu boleh saja dikatakan tidak ada sampai berakhir pemerintahan Jepang di Maluku.

Dengan masuknya NICA (Belanda) membonceng pada tentara Sekutu Jepang (Jepang menyerah), maka kekuasaan diambil alih secara bertahap dari tangan Jepang. Pemerintahan saat NICA ini dipimpin oleh seorang pimpinan *Conica* yang juga merangkap jabatan residen untuk Maluku Utara dan Maluku Selatan. Di Maluku Selatan residen merangkap pula sebagai Ketua Dewan Maluku Selatan, sedangkan di Maluku Utara Dewan Maluku Utara dipimpin oleh asisten residen. Pembentukan Dewan Perwakilan dan pembagian daerah Maluku Utara dan Maluku Selatan ini diteruskan pula oleh NIT, berdasarkan undang-undang NIT No. 44 tahun 1950 mengenai otonomi daerah wilayah Maluku Selatan pada saat NIT meliputi Maluku Tengah dan Maluku Tenggara. Setelah dileburkannya RIS menjadi RI pada tanggal 17 Agustus 1950 dan

RIS dilumpuhkan, maka sejak tahun 1952 dikeluarkannya peraturan-peraturan dan undang-undang mengenai pembentukan daerah-daerah otonom di Maluku antara lain pembentukan Daerah Tingkat II Maluku Tengah dan Tenggara selaku daerah otonomi berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 1952, wilayah Ambon dengan PP No. 15 tahun 1955, Maluku Utara dengan Undang-undang No. 15 tahun 1956. Dan pada tahun 1957 dikeluarkan Undang-undang Darurat No. 22 tahun 1957 tentang pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku, sebagai pelaksanaan daripada Undang-undang No. 1 tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah yang menetapkan Pemerintahan Daerah Maluku berkedudukan di Ambon.

Dewan Perwakilan Rakyat beranggotakan 30 orang, DPD (Dewan Pemerintahan Daerah) beranggotakan lima orang tidak termasuk Kepala Daerah. Dengan Undang-undang Darurat No. 22 tahun 1957 yang disahkan menjadi Undang-undang, merupakan dasar dari pembentukan Daerah Otonom Tingkat I Maluku, gubernur-gubernur Maluku sejak tahun 1950 sampai dengan sekarang adalah:

1. Mr. J. Latuharhary (1950–1955)
2. SM. Djosan (1956–1960)
3. M. Padang (1960–1965)
4. Kolonel G.L. Latumahina (1966–1968)
5. Kolonel Sumitro (1969–1973)
6. Brigjen Sumeru (1974–1976)
7. Mayjen Hasan Slamet (1976–sekarang)

Sebagai Lembaga Legislatif dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tingkat I Maluku. Di daerah-daerah tingkat II dibentuk DPRD Tingkat II Maluku Utara, Maluku Tengah, Maluku Tenggara dan Kotamadya Ambon. Sekarang Pemerintah Daerah Tingkat I memimpin empat Daerah Tingkat II dan satu daerah administratif, yaitu :

- a. Kabupaten Maluku Utara, dengan ibukota Ternate;
- b. Kabupaten Maluku Tengah, dengan ibukota Masohi;
- c. Kabupaten Maluku Tenggara, dengan ibukota Tual;
- d. Kabupateri Kotamadya Ambon, dengan ibukota Ambon; dan
- e. Daerah Administratif Halmahera Tengah, dengan ibukota Soa Siu.

Dan sesuai dengan perkembangan daerah berdasarkan usul DPRD Tingkat I Maluku tanggal 28 Agustus 1972, maka gubernur Maluku mengeluarkan Keputusan Gubernur Maluku No. Kpts. 40/GMAL/73 mengenai pembentukan Daerah Koordinasi Pulau Buru (Tapol) dengan ibukotanya Namlea.

Selain kedudukan gubernur terdapat anggota-anggota BPH sebanyak lima orang yang bertugas membantu/menyampaikan saran dan pendapat pada gubernur baik diminta maupun tidak diminta. BPH ini berlaku sampai dengan tahun 1973, juga terdapat seorang sekretaris daerah (sekda) sekarang disebut sekwilda. Jabatan wakil gubernur Maluku tidak ada. Luas daerah Maluku seluruhnya 85.728 km² dengan jumlah penduduk pada tahun 1968 berjumlah 1.095.942 orang. Dinas-dinas otonom ada delapan yaitu Dinas Otonom Pertanian Rakyat, Kesehatan, Perikanan Darat, Kehutanan, Pekerjaan Umum, Pengolahan Kekayaan Laut, Peternakan, dan Dinas P dan K. Juga terdapat perusahaan-perusahaan daerah yang berusaha di lapangan pelayaran, perhotelan, perbankan dan perusahaan kayu, misalnya PD Berdikari, Hotel Anggrek, Bank Pembangunan Daerah Maluku, dan PD Panca Karya.

Di daerah-daerah tingkat dua terdapat berbagai Perusahaan Daerah Tingkat II, misalnya Prajakarya di Maluku Tengah, dan Gamakarya di Maluku Utara. Secara singkat penulis ingin memberikan juga sedikit gambaran di bidang Pemerintahan Daerah-daerah Tingkat II, baik mengenai luasnya, penduduk dan kecamatan-kecamatan serta jumlah desa.

1.2.1 *Maluku Tenggara.*

Bupati Kepala Daerah: Drs. DC. Far-Far kini telah diganti dengan Letkol Damiri. Luas daerah 27.723 km² dengan relief berbukit-bukit dan rawa-rawa. Kabupaten Maluku Tenggara meliputi delapan kecamatan, yaitu:

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| 1. Kecamatan Kei Besar | : 106 kampung, 43.880 penduduk |
| 2. Kecamatan Kei Kecil | : 103 kampung, 46.904 penduduk |
| 3. Kecamatan PP. Aru | : 109 kampung, 34.667 penduduk |
| 4. Kecamatan Tanimbar Utara | : 39 kampung, 25.504 penduduk |
| 5. Kecamatan Tanimbar Selatan | : 35 kampung, 28.145 penduduk |
| 6. Kecamatan Kisar | : 55 kampung, 20.144 penduduk |
| 7. Kecamatan PP. Baban | : 57 kampung, 18.458 penduduk |
| 8. Kecamatan Serwaru | : 25 kampung, 16.657 penduduk |

1.2.2 *Maluku Utara*

Bupati Kepala Daerah J. Mansur, B.A., baru saja diganti dengan Letkol Polisi Royani. Luas daerah 29.830 km² (termasuk daerah administratif Halmahera Tengah) dengan relief bergunung-gunung dan dataran rendah. Kabupaten Maluku Utara meliputi 20 kecamatan, yaitu:

1. Kecamatan Kota Ternate	: 10 kampung,	30.837 penduduk
2. Kecamatan Makian	: 20 kampung,	29.774 penduduk
3. Kecamatan Gane Barat	: 26 kampung,	7.863 penduduk
4. Kecamatan Gane Timur	: 12 kampung,	5.131 penduduk
5. Kecamatan Jailolo	: 47 kampung,	18.712 penduduk
6. Kecamatan Sahu	: 29 kampung,	7.399 penduduk
7. Kecamatan Lolola	: 37 kampung,	11.832 penduduk
8. Kecamatan Ibu	: 39 kampung,	11.950 penduduk
9. Kecamatan Tolelo	: 24 kampung,	18.059 penduduk
10. Kecamatan Galela	: 22 kampung,	9.920 penduduk
11. Kecamatan Kajoa	: 26 kampung,	17.957 penduduk
12. Kecamatan Kao	: 38 kampung,	10.097 penduduk
13. Kecamatan Obi	: 20 kampung,	8.661 penduduk
14. Kecamatan Bacan	: 74 kampung,	27.981 penduduk
15. Kecamatan Taliabu Barat	: 20 kampung,	5.028 penduduk
16. Kecamatan Taliabu Timur	: 16 kampung,	6.462 penduduk
17. Kecamatan Sahana	: 38 kampung,	33.853 penduduk
18. Kecamatan Morotai Selatan	: 30 kampung,	16.643 penduduk
19. Kecamatan Morotai Utara	: 17 kampung,	8.172 penduduk
20. Kecamatan P. Ternate	: 31 kampung,	13.839 penduduk

1.2.3 *Maluku Tengah*

Bupati Kepala Daerah: Letkol Polisi R. Ubay Suriadimadja kini diganti dengan Letkol TNI (AD) Soegiharto. Luas daerah 28.171 km². dengan relief berupa pegunungan, berbukit-bukit dan dataran-dataran rendah. Kabupaten Maluku Tengah meliputi 16 kecamatan, yaitu:

1. Kecamatan P. Ambon	: 45 kampung,	108.976 penduduk
2. Kecamatan Saparua	: 24 kampung,	45.271 penduduk
3. Kecamatan Buru Utara	: 45 kampung,	26.227 penduduk
4. Kecamatan Buru Selatan	: 53 kampung,	11.083 penduduk
5. Kecamatan Seram Utara	: 49 kampung,	13.847 penduduk

6. Kecamatan Taniwal	: 34 kampung,	8.000 penduduk
7. Kecamatan Seram Barat	: 40 kampung,	34.704 penduduk
8. Kecamatan Seram Timur	: 38 kampung,	45.672 penduduk
9. Kecamatan Bula	: 8 kampung,	3.903 penduduk
10. Kecamatan Toharu	: 20 kampung,	12.700 penduduk
11. Kecamatan Amahai	: 20 kampung,	13.181 penduduk
12. Kecamatan Werinama	: 34 kampung,	6.390 penduduk
13. Kecamatan Kairatu	: 29 kampung,	17.831 penduduk
14. Kecamatan P. Haruku	: 11 kampung,	22.548 penduduk
15. Kecamatan Teon Nila Serua	: 16 kampung,	3.967 penduduk
16. Kecamatan Banda	: 12 kampung,	13.820 penduduk

1.2.4 Kotamadya Ambon

Walikota Kepala Daerah Tingkat II Kotamadya Ambon adalah Kolonel TNI (AL) MH. Manuputy kini diganti Letkol TNI (AL) Alberth Porwayla. Luas daerah 4 km², dengan relief berupa dataran rendah. Kotamadya Ambon meliputi satu kecamatan yaitu Kecamatan Kota Ambon yang mempunyai 6 kampung (lingkungan) dengan penduduk berjumlah 100.231 orang.

1.2.5 Halmahera Tengah

Dipimpin oleh Drs. A. Malawat (almarhum), kini diganti Drs. Toekan. Luas daerah sudah termasuk dalam Kabupaten Maluku Utara, dengan relief berupa dataran rendah dan bukit-bukit, meliputi 6 kecamatan, yaitu:

1. Kecamatan Tidore	: 26 kampung,	33.027 penduduk
2. Kecamatan Weda	: 15 kampung,	6.955 penduduk
3. Kecamatan Wasile	: 14 kampung,	6.277 penduduk
4. Kecamatan Maba	: 18 kampung,	7.937 penduduk
5. Kecamatan Oba	: 15 kampung,	10.109 penduduk
6. Kecamatan Petani/Gebe	: 13 kampung,	7.842 penduduk ¹⁶⁾

Dalam kehidupan kebudayaan dan kesenian, alam Maluku turut mempengaruhi. Daerah yang cukup luas lautannya itu dibandingkan dengan daratannya tentu sekali mempunyai beraneka ragam adat-istiadat, bahasa daerah (*bahasa tanah*) aneka ragam seni suara, seni pahat, cara berpakaian, mata pencaharian, langgam bicara dan sebagainya. Hal ini turut memberikan corak kebudayaan serta kesenian yang ada di daerah Maluku. Kebudayaan dan kesenian daerah ini dimiliki dan diwarisi oleh rakyat Maluku dari

satu generasi ke generasi berikutnya. Adat-istiadat di Maluku masih kuat dipertahankan dan telah melembaga.

Begitu kuatnya pengaruh kebudayaan tradisional ini sehingga sulit untuk dimasukkan kebudayaan Barat atau kebudayaan asing. Di kota-kota, unsur-unsur kebudayaan daerah tetap saja nampak, walaupun telah terjadi *cultural change* sebagai akibat komunikasi dan teknologi modern. Ini disebabkan karena komunikasi maupun perhubungan di Maluku belum begitu mantap, juga karena ikatan-ikatan batin maupun ikatan-ikatan kekeluargaan tetap terpelihara seutuhnya. Rakyat Maluku masih hidup sederhana, dan sebagian besar bergantung pada alam dan lingkungan sekitarnya.

BAB II. SEJARAH SINGKAT PERKEMBANGAN BRIMOB DI INDONESIA

2.1 *Organisasi Brimob*

Sejak Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, maka Polisi Jepang di Pusat (*Kosatsutai*) maupun di Daerah (*Tokubetsu Keisatsutai*) dengan segera secara spontan meleburkan diri menjadi Pasukan Polisi Istimewa atau katakan saja Polisi Khusus yang sangat dihormati. Pada umumnya dasarnya tetap sama dengan dasar susunan yang lama, yaitu tiap seksi terdiri dari 18 sampai dengan 20 orang anggota, satu seksi terdiri dari empat regu, dan satu kompi terbagi atas seksi.

Di tiap-tiap daerah terdapat satu kompi beranggotakan 300 orang anggota dengan perlengkapan yang sempurna, dan personalia yang cukup terlatih di bidang ini. Pasukan-pasukan inilah yang nanti menjadi dasar pembentukan Brigade Mobil. Susunan struktur organisasi Brimob ini selalu mengalami perubahan dan selalu mendapatkan perhatian serius oleh pemerintah. Hal ini disesuaikan dengan tuntutan kepentingan perjuangan/keamanan negara yang tiap saat diperlukan dan meningkat. Brimob lahir dan berkembang pada zaman revolusi. Susunan struktur organisasi Brimob selalu disesuaikan dengan tujuan dan kepentingan perjuangan mencapai cita-cita kemerdekaan, karena itu struktur organisasi Brimob di Indonesia selalu mengikuti perkembangan dan tujuan revolusi. Dalam perkembangan Brimob di Indonesia kita alami beberapa fase.

2.1.1 *Reorganisasi Pertama*

Sesuai jalan revolusi serta operasi dan inspirasi yang timbul di masyarakat khususnya di daerah-daerah tertentu, maka dengan surat keputusan Kepala Muda Kepolisian Nomor Pol. 12/78/91, tanggal 14-11-1946 ditetapkan bahwa Pasukan Polisi Istimewa dan lain-lain nama sebutan Korp Kepolisian Istimewa pada waktu itu, terhitung mulai saat itu dikonsolidasi dan diberi nama baru *Mobile Brigade* (11, p. 176-184)

Pada tiap keresidenan dibentuk dan disusunlah Mobile Brigade tingkat keresidenan. Daerah Banyumas, Solo dan Surabaya dibentuk Mobile Besar, langsung berada di bawah Kepala Jawatan Kepolisian Negara, kecuali Karesidenan Solo dipimpin oleh kepala polisi. Keresidenan Solo dan Surabaya dipimpin oleh kepala kepolisian Keresidenan Surabaya. Struktur organisasi pertama kali ini berlangsung sampai dengan tahun 1951.

2.1.2 *Reorganisasi Kedua*

Sesuai Surat Keputusan Kepala Kepolisian tanggal 9 Juli 1951 Nomor 04 dan disusuli pula dengan Surat Perintah Kepala Kepolisian Negara Nomor 26/XII/52 tanggal 6 Mei 1952, maka Korp Mobile Brigade direorganisasi dan dalam reorganisasi kedua kali ini dinyatakan adanya pimpinan teknis yang terdiri atas: (1) Tingkat pusat dikepalai oleh Kepala Bagian Inspeksi Mobile Brigade Jawatan Kepolisian Negara; (2) Tingkat propinsi dikepalai oleh Koordinator Inspektur Mobile Brigade; dan (3) Tingkat keresidenan dikepalai oleh Mobile Brigade Rayon. Pimpinan teknis pada Mobile Brigade tetap berada di bawah Kepala Kepolisian Keresidenan, terkecuali Pasukan Mobile Brigade Reserve.

2.1.3 *Reorganisasi Ketiga*

Hal ini disebabkan oleh karena reorganisasi kedua kurang relevan sehingga Mobile Brigade sebagai *slag-kracht* Kepolisian Negara tidak dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan, misalnya:

- a. Perlu mengadakan *Combined/joint operation* ;
- b. Hubungan kerja antara Mobile Brigade dengan Kepala Kepolisian Daerah tidak tegas, karenanya menghambat tugas-tugas Mobile Brigade secara berhasil guna dan berdaya guna ;
- c. Penggunaan tenaga kompi-kompi Mobile Brigade secara mendadak.

Reorganisasi ketiga kalinya ini berdasarkan Surat Kepala Kepolisian Negara Nomor Pol. 13/MB/1959 tanggal 25 April 1959 sebagai berikut: (1) Di tingkat jawatan kepolisian negara terdapat komando Mobile Brigade dengan staf lengkap dan jaminan peralatan lengkap; (2) Di tingkat propinsi terdapat Komando Mobile Brigade dengan staf lengkap dan organisasi tiga batalyon bersenjata sebagai pelaksana tugas; dan (3) Di tingkat keresidenan terdapat Kesatuan Mobile Brigade yang didasarkan atas kebutuhan dan lokasi pasukan saja.

Dalam reorganisasi ketiga ini terjadi penggantian nama Mobile Brigade kepada Brigade Mobil. Satuan Korps Mobile Brigade ini oleh Presiden Republik Indonesia diganti dengan Brigade Mobile pada tanggal 14 November 1961, bertepatan dengan hari ulang tahun Brimob. Pada 14 November 1961 ini pula Brigade Mobil mendapatkan penghargaan dari negara berupa *Nugraha Sakanti Jana Utama* berdasarkan pertimbangan pemerintah bahwa Korps Brigade Mobil ini dalam kurun waktu 15 tahun sejak berdirinya tanggal 14 November 1945 telah menunjukkan darma baktinya, kesungguhan dan kemampuannya.

Tugas-tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya dalam rangka mengemban tugas-tugas kepolisian negara telah dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan selalu siap siaga penuh kewaspadaan sehingga Brigade Mobile dapat menjadikan dirinya kesatuan terpercaya pemerintah dan dapat dijadikan suri teladan. Brigade Mobile ini telah dapat memelihara dan meningkatkan sifat-sifat hakiki korps kepolisian yang murni. Dengan Keputusan Presiden RI tahun 1961 No. 591/61 Korps Brigade Mobil ditetapkan sebagai salah satu kesatuan/angkatan yang pada pertama kalinya mendapatkan anugerah negara/penghargaan dari pemerintah.

2.1.4 *Reorganisasi Keempat*

Meningkatkan perjuangan bangsa Indonesia tentu mengakibatkan konsekuensi logis dalam peningkatan taraf hidup bangsa Indonesia. Dalam peningkatan perjuangan itu memerlukan kekuatan atau alat-alat yang tangguh serta mampu untuk mengimbangi serta menanggulangi semua masalah, karenanya memerlukan pula struktur organisasi yang tepat.

Di dalam Brigade Mobil hal ini terasa sekali, sehingga perlu diimbangi dengan satu struktur organisasi yang status, fungsi, kedudukan dan wewenang pengerahan korps ini harus ditingkatkan pula, karena sudah tidak relevan dengan situasi dan kondisi serta tuntutan revolusi. Atas dasar pemikiran itu maka disusunlah struktur organisasi Brigade Mobil yang cocok dan berlaku sampai sekarang. Di tingkat pusat Komando Brigade Mobil Pusat dengan staf lengkap dengan segala peralatan yang kuat dan servis pengoperasian yang terjamin berada di bawah kepala kepolisian negara. Di tingkat daerah Komando Brigade Mobil dengan staf lengkap dengan segala peralatan dan jaminan yang lengkap serta berada di bawah kepala daerah kepolisian propinsi. Di daerah tingkat dua diatur oleh komando brigade mobil propinsi sesuai kebutuhan dan letak daerah operasi.

2.2 *Perkembangan Brimob pada Zaman Revolusi Fisik (1945–1949)*

Dari buku sumber *20 Tahun Perkembangan AKRI* yang diterbitkan oleh Inkopak tahun 1967 serta wawancara dengan berbagai pihak pembesar kepolisian RI diperoleh keterangan bahwa, setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dikumandangkan oleh Sukarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia ke seluruh pelosok tanah air dan dunia, maka secara spontan mendapatkan sambutan hangat dari seluruh bangsa Indonesia. Maka bangkitlah semangat juang yang berkobar-kobar dengan bersemboyan *Merdeka atau Mati*. Semangat juang yang meluap-luap bangkit di seluruh pelosok tanah air untuk membebaskan diri dari pendudukan Jepang. Di mana-mana timbul perlawanan dan perampokan senjata dari tangan Jepang serta setahap demi setahap bangsa Indonesia mengambil alih kekuasaan dengan jalan perebutan pemerintah dari tangan Jepang sebagai dasar kekuatan untuk meneruskan cita-cita kemerdekaan.

Luka-derita, pengorbanan jiwa dan harta-benda, penumpahan darah dan keringat menyebabkan bangkitnya patriotisme idealisme serta nasionalisme bangsa Indonesia untuk tetap berjuang mempertahankan Proklamasi 17 Agustus 1945. Di dalam perjuangan bangsa Indonesia untuk mempertahankan tegak dirinya Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945

itu, sedikit-banyaknya korps kepolisian Republik Indonesia juga mempunyai andil.

Kita ingat pada saat ini anggota-anggota polisi kita yang berdinasi pada Pemerintah Pendudukan Jepang bangkit berjuang bersama-sama bangsa menentang Jepang. Tenaga-tenaga inti kepolisian yang tergabung dalam *Tokubetsu Keisatsu* melaksanakan pengempuran-pengempuran regional (kedaerahan) merebutkan persenjataan Jepang serta meneruskan perlawanan melawan tentara Sekutu dan NICA (tentara Belanda) yang setahap demi setahap akan mengambil alih kekuasaan kembali dari tangan Sekutu.

Polisi Istimewa bersama-sama angkatan-angkatan lainnya, organisasi-organisasi massa, tokoh-tokoh masyarakat, partai-partai politik dan seluruh rakyat serentak bangkit menentang Sekutu/NICA yang akan meneruskan/penjajahan kembali atas tumpah darah Indonesia. Pada Zaman Revolusi Fisik perkembangan Brimob dapat dilukiskan sebagai berikut:

2.2.1 *Perjuangan Polisi di Jawa Timur*

Polisi Istimewa hasil peleburan dari *Shii Keisatsu Tai* dan *Shuu Keisatsu Tai* di bawah pimpinan Inspektur Polisi Tingkat II Soetjipto Danoekoesoemo (pernah menjadi menteri/panglima Angkatan Kepolisian RI) bersama dengan pasukan perjuangan polisi pimpinan Mohamad Yasin (sekarang mayor jenderal polisi) berjuang melawan Jepang dan tentara Sekutu bersama-sama dengan para pemuda, organisasi-organisasi massa dan seluruh rakyat di Jawa Timur.

Pada waktu Sekutu/tentara Belanda mengibarkan kembali bendera Belanda di Hotel Oranje Surabaya tanggal 18 September 1945 menimbulkan kemarahan rakyat yang luar biasa. Muncullah bentrokan dan rakyat menyerbu Hotel Oranje dengan dibantu oleh Pasukan Polisi Istimewa dan P3 dengan tank-tank dan panserpansernya sehingga berhasil menurunkan bendera Belanda dan menaikkan kembali Sang Saka Merah Putih. Pada saat ini Polisi Istimewa dan P3 menjadi pelopor serta mengajak rakyat untuk melucuti senjata dari tangan Jepang dengan jalan memasuki asrama-asrama militer Jepang, misalnya Markas Besar Divisi Jepang di Embongwungu, Kazerne Angkatan Laut Jepang (*Kai Gun*) di Gubeng, Morokrengan, di rumah-rumah sakit dan asrama Ang-

katan Laut di Karangmenjangan, Markas Besar Kempetai dan di lain-lain tempat pula, sehingga masyarakat dapat memiliki senjata untuk melawan *Sekutu/Gurkha*. Kejadian serupa terjadi pula di Bondowoso, di mana Inspektur Polisi Soetjipto Joedodihardjo (pernah memangku jabatan panglima angkatan kepolisian) beserta R. Soekari memimpin rakyat untuk melucuti senjata tentara Jepang di markas-markasnya antara lain di daerah Besuki seperti di markas *Kempeitei* Jember juga mengadakan tindakan pengamanan terhadap tentara-tentara Jepang yang telah menyerah (tawanan-tawanan Jepang) di daerah Jember dan sekitarnya.

Pada tanggal 25 Oktober 1945 tentara Sekutu mendarat di Surabaya. Tempat-tempat yang diincer Sekutu adalah tempat-tempat penting misalnya Internatio, RRI, Kebun Binatang dan sebagainya, menimbulkan kecurigaan dan kemarahan rakyat terhadap Sekutu/Gurkha ini. Maka dengan bantuan Polisi Istimewa dan P3 rakyat dan polisi membunuh Gurkha. Dengan kejadian ini Jenderal Mansergh pimpinan tentara Sekutu mengumumkan perintah kepada seluruh rakyat yang memiliki senjata supaya segera menyerah kepada tentara Sekutu dalam batas waktu tertentu.

Ultimatum ini tidak digubris sedikit pun oleh rakyat, maka perlawanan terhadap Sekutu makin besar di seluruh kampung-kampung, lorong-lorong, jalan-jalan raya, pasar-pasar, toko-toko, dengan jalan membentuk barikade-barikade. Oleh karena gawatnya situasi di Jawa Timur ini, maka tanggal 10 November 1945 Inggris melancarkan serangan dari laut dan udara menembaki dan membombardir secara ganas Kota Surabaya pada tempat-tempat yang dianggap membahayakan tentara Sekutu (tempat-tempat pertahanan rakyat).

Markas Besar Polisi Istimewa menjadi sasaran khusus pembombardiran Sekutu; karenanya Sekutu menjadi musuh Polisi Istimewa dan rakyat. Setelah Inggris menembaki dari laut maupun dari darat secara jarak jauh di samping membombardir dari udara daerah-daerah pertahanan rakyat, pemuda dan Polisi Istimewa serta P3 (Pasukan Polisi Perjuangan) maka tentara Sekutu mulai berusaha untuk menghalaukan rakyat dan Polisi Istimewa dan P3. Polisi Istimewa dan P3 tetap bertahan di Kedungdoro (Daerah Surabaya Tengah dan Barat), Pasar Blauran, dan Bubutan. Inggris berhasil menduduki Kota Surabaya namun pertempuran berjalan terus.

Pemerintah RI, Polisi Istimewa, P3 dan seluruh massa rakyat mundur dari Kota Surabaya untuk selanjutnya menyusun kekuatan dan pertahanan. Markas Polisi Istimewa ditempatkan di sepanjang jalan dibagi atas dua pasukan yang satu untuk mempertahankan Surabaya Utara di sekitar Tandes dipimpin oleh Iman Bachri Hadipranoto guna mencegah Sekutu masuk ke arah lapangan. Satu pasukan lagi dipimpin oleh Soetjipto Danoekoesoemo untuk mencegah gerak Sekutu menuju arah Mojokerto, mempertahankan Surabaya Barat (pertahanan sekitar Kedurus). Pasukan Polisi Perjuangan P3 bermarkas di Sidoharjo, mengadakan perlawanan dan pertahanan di Surabaya Selatan untuk membatasi gerakan tentara Sekutu.

Tentara Sekutu tetap bergerak maju dan menghancurkan markas-markas pertahanan ini mendesak pertahanan rakyat dan polisi harus mundur ke Mojokerto, dan Gempol/Porong. Di tempat-tempat ini pasukan Polisi mengadakan konsolidasi yang lebih hebat lagi. Kemudian mendirikan Markas Besar Polisi di Malang dengan basis pertahanan Surabaya Selatan Sidoharjo (P3), sedangkan Polisi Istimewa Surabaya bermarkas besar di Mojokerto dengan basis pertahanan Surabaya Utara dan Barat/Krian—Gresik.

Dalam perang kemerdekaan pertama pasukan Brimob aktif sekali dalam segenap front pertempuran. Tentu saja Brimob berjuang bersama dengan TKR maupun organisasi-organisasi politik dan tentara perjuangan serta para pemuda dan rakyat seluruhnya. Dengan adanya Persetujuan Renville, maka pasukan-pasukan Mobile Brigade diwajibkan untuk meninggalkan tempat-tempat mereka bergerilya dan harus berpindah tempat. Polisi Istimewa Besuki di bawah pimpinan Soetjipto Judodihardjo diwajibkan bergabung bersama dengan Pasukan Polisi Perjuangan yang dipimpin oleh Mohamad Yasin ke daerah Blitar. Dalam Persetujuan Renville itu ditetapkan pula garis-garis demarkasi, di mana Mobile Brigade serta Polisi Keamanan (PK) ditugaskan untuk menjaga serta mengamankan garis demarkasi tersebut.

Dalam Perang Kemerdekaan kedua, Mobile Brigade yang bertugas di seluruh front berjuang sungguh-sungguh dengan jalan mengadakan perlawanan-perlawanan. Markas Besar Kepolisian di Surabaya berkembang menjadi tiga batalyon dan mengadakan

pertahanan di Jombang Selatan. Mobile Brigade mengadakan pertahanan di daerah Madiun. Mobile Brigade Bondowoso bergerak kembali dari Ponorogo melalui bagian selatan Kota Malang menuju ke Surabaya.

Mobile Brigade Kediri melaksanakan pertahanan di daerah Pappan, Kediri Utara. Mobile Brigade Bojonegoro mengadakan pertahanan di sebelah selatan Bojonegoro. Juga Mobile Brigade membantu pemerintah dalam rangka mengamankan peristiwa percobaan penggulingan pemerintah/Kabinet Syafrir yaitu pada tanggal 3 Juli tahun 1946 malam, berdasarkan perintah komandan Polisi Istimewa, maka satu kompi pasukan Polisi Istimewa dipimpin oleh Ajun Inspektur Polisi Tingkat II Imam Bachri diberangkatkan ke Madiun langsung ke Yogyakarta. Tujuan untuk membantu memperkuat pengawalan serta pengamanan Pemerintah Republik Indonesia dari usaha rongrongan tokoh-tokoh Persatuan Perjuangan yang dipimpin oleh Tan Malaka, Sukarni dan sebagainya, yang berusaha untuk menggulingkan Pemerintah Republik Indonesia (Kabinet Syafrir).

Tan Malaka dan kawan-kawannya berhasil ditangkap Polisi Istimewa dan diamankan ke Mojokerto. Kemudian Kompi Polisi Istimewa ini ditempatkan di Benteng Vredenburg di muka Istana Yogyakarta dengan maksud untuk menjaga keamanan dan keselamatan Presiden Republik Indonesia Sukarno dan keluarganya, serta aparat pemerintah yang berdomisili di sekitar istana.

2.2.2 Peristiwa Front Demokrasi Rakyat

Suatu peristiwa yang sangat menggoncangkan kedudukan pemerintah pada bulan September 1948 adalah peristiwa PKI pimpinan Muso di Madiun, dengan jalan memproklamasikan *Front Demokrasi Rakyat* atau *FDR* dengan tujuan menentang pemerintah Republik Indonesia. Kekuatan PKI pimpinan Muso ini luar biasa, karena PKI pada saat itu terdiri atas pasukan-pasukan bersenjata yang tergabung dalam Brigade 29 berjumlah enam batalyon dengan seluruh organisasi-organisasi massanya.

Daerah Keresidenan Madiun seluruhnya dikuasai oleh PKI. Begitu gawatnya situasi maka Presiden Republik Indonesia Sukarno dalam pidatonya tanggal 18 September 1948 mengutuk peristiwa PKI Madiun dan mengimbau rakyat Indonesia agar memilih

"Sukarno-Hatta atau Muso". (11, p.185-190)

Dengan demikian secara spontan bangkitlah kemarahan rakyat. Rakyat berbalik melawan PKI Muso dan kawan-kawannya. Rakyat bersama-sama pemerintah menumpas habis peristiwa PKI Madiun. Tanggal 19 September 1948 malam, satu batalyon Mobile Brigade terdiri atas dua kompi Mobile Brigade Keamanan dan dua kompi Mobile Brigade Besar ditambah pula dengan satu kompi gabungan Besuki/Malang di bawah pimpinan Ajun Inspektur Polisi II Imam Bachri diperintahkan untuk turut menumpaskan pembontakan tersebut bersama-sama pasukan-pasukan Pemerintah Republik Indonesia lainnya. Sebagai komandan-komandan kompi Mobile Brigade pada waktu itu adalah Wirato, Jusuf Djajengrono, Koesnadi, Soekari, dan perwira-perwira staf antara lain Abdolrahman, Soeharto, Soetopo Isnomo dan Prawiro. Penasihat-penasihat adalah Soetjipto Judodihardjo, Soejoed bin Wahjoe, dan Gatot Soewirjo.

Semula rencana mereka mulai dari arah menuju Madiun lewat Gunung Wilis dan Dungus, tetapi berhubung Nganjuk perlu segera dikuasai kembali, maka batalyon diperintahkan oleh komandan militer setempat untuk bergerak menuju jalan raya Nganjuk ke Madiun dan melakukan serangan-serangan terhadap Kota Nganjuk yang sementara diduduki oleh PKI Muso itu. Pertempuran besar terjadi dan akhirnya Nganjuk dapat diduduki dan dikuasai oleh pemerintah. Kemudian Batalyon Mobile Brigade meneruskan pergerakannya ke Guyangan dan pada pagi-pagi telah dapat menduduki Desa Bogor dan Wilangan. Pertempuran berkobar sungguh-sungguh sehingga PKI Muso tak bisa bertahan lalu mengundurkan diri meninggalkan desa-desa tersebut.

Kemudian pada tanggal 21 September 1948 batalyon bergerak menuju Saradan dan melalui pertempuran akhirnya Saradan dapat dikuasai. Dan pada tanggal 22 September 1948 pertempuran sengit telah terjadi di Caruban selama enam jam, akhirnya Caruban dapat dikuasai. Di Caruban, batalyon mengadakan konsolidasi dan pada tanggal 26 September 1948 batalyon mulai bergerak masuk Kota Madiun. Tetapi sewaktu batalyon tiba di Madiun, rupanya Madiun telah lebih dahulu dikuasai oleh Angkatan Darat (Korps Siliwangi).

Pada tanggal 28 September 1948 batalyon bergerak menuju ke Ponorogo yang masih dikuasai oleh PKI Muso. Di sini terjadi pula pertempuran-pertempuran, tetapi akhirnya Ponorogo dapat dikuasai. Di Ponorogo ini batalyon tiba-tiba mendapat serangan balasan dari pasukan pembontak PKI di bawah pimpinan Panglima Tentara PKI Djoko Soejono.

Serangan dari PKI Muso ini berhasil dikalahkan dengan jalan memukul mundur pasukan PKI dengan memakan korban jiwa PKI yang tidak sedikit jumlahnya. Peralatan seperti senjata dan perlengkapan lainnya yang dapat dirampas oleh PKI dapat ditaksir bisa digunakan untuk keperluan satu kompi. PKI Muso mundur ke daerah Slaung, tetapi cepat diketahui sehingga diadakan pencegahan terlebih dahulu, namun timbul pula penyerbuan dari pihak PKI dan menimbulkan korban yang juga cukup banyak. Sisa-sisa pembontakan mundur ke daerah jurusan Wonosari.

Batalyon bergerak menuju ke Ponorogo dan mengadakan konsolidasi, sedangkan pengejaran terhadap pembontak PKI Muso itu dilanjutkan oleh kesatuan-kesatuan lain. Tugas selanjutnya batalyon melaksanakan pasifikasi di Ngawi dan Magetan, komando batalyon tetap di Madiun dan satu kompi lagi ditempatkan di daerah Ponorogo. Pada pembontakan Madiun ini, Mobrig Keresidenan Kediri dan Malang mengadakan pembersihan-pembersihan terhadap pengaruh-pengaruh affair Madiun di lingkungan sekitarnya.

Memang dalam peristiwa Madiun ini Mobile Brigade telah menampilkan keuletan serta keampuhan perjuangannya dalam mem bela Negara dan Pemerintah Republik Indonesia. Begitu besar jasa-jasa Mobile Brigade ini maka Pemerintah Republik menghargai sekali jasa-jasa Mobile Brigade Jawa Timur, dengan jalan menganugrahkan surat tanda penghargaan dari Panglima Besar Angkatan Perang Republik Indonesia.

Surat tanda penghargaan ini langsung diserahkan kepada Mohamad Yamin selaku komandan Mobile Brigade Jawa Timur. Surat tanda penghargaan ini dikeluarkan tanggal 4 Agustus 1949. Satu hal yang paling penting dan tak bisa dilupakan oleh Mobile Brigade adalah saat menjelang Perang Kemerdekaan II itu, kira-kira satu bulan sebelumnya; Pemerintah Pusat Republik Indonesia di Yogyakarta memerintahkan untuk mengirimkan perkenalan

berupa material dan uang kepada daerah Keresidenan Kediri dan Bojonegoro.

Tugas ini amat berat oleh karena harus melalui darat, sedangkan saat ini hubungan lalu-lintas darat sangat sulit karena lalu-lintas darat betul-betul terganggu/dikuasai oleh pasukan-pasukan PKI Muso (Front Demokrasi Rakyat). Perintah kepala negara harus dilaksanakan dengan baik. Karenanya dengan pesawat udara, perintah tersebut dilaksanakan oleh Komisaris Polisi II Moch. Suprpto, komandan Brigade Mobile Keresidenan Bojonegoro, dan Kapten Frislan Soeryaatmojo, komandan militer Kabupaten Blitar untuk daerah Keresidenan Kediri.

Cara pelaksanaan perintah kepala negara ini dilaksanakan dengan jalan terjun payung dari pesawat udara. Setelah beberapa saat menerima latihan-latihan khusus untuk penerjunan di Lapangan Terbang Maguwo, Yogyakarta. Latihan-latihan khusus ini hanya sekedarnya saja, yang penting bisa selamat tiba di tanah air dan menyerahkan uang serta barang-barang perlengkapan lainnya yang didrop dari pesawat udara itu.

Dalam Peristiwa Madiun ini telah banyak pula korban-korban yang gugur dari pihak kepolisian. Doerjat, pembantu komisaris polisi, kepala penilik kepolisian Jawa Timur di Blitar yang dipanggil menghadap kepala negara di Yogyakarta dalam perjalanannya dihadang oleh grombolan PKI Muso (FDR) di daerah Walikukun dan langsung dianiaya serta dibunuh secara kejam.

Pada hari yang bersamaan dan di daerah Walikukun itu juga telah dibunuh pula Gubernur Propinsi Jawa Timur Suryo dan Kepala Polisi Keresidenan Bojonegoro Komisaris Polisi Tingkat I Soeroko. Juga Kepala Polisi Keresidenan Madiun Komisaris Polisi Tingkat I R. Soenarjo bersama staf dan sejumlah anak-anak buahnya dan beberapa kader kepolisian di Madiun telah dibunuh oleh PKI Muso (FDR) itu secara kejam. Selain itu peristiwa PKI Madiun ini telah merugikan negara dan rakyat Indonesia khususnya di Jawa, banyak sekali rakyat yang meninggal serta korban harta benda yang tidak sedikit jumlahnya sehingga patut kita mengutuk peristiwa ini.

2.2.3 *Perkembangan Brimob di Jawa Barat*

Sebagaimana halnya di Jawa Timur, maka di Jawa Barat khususnya Keresidenan Bogor, seluruh rakyat bangkit melawan Jepang. Setelah Jepang menyerah, tentara Jepang berangsur-angsur disiapkan untuk diberangkatkan. Pada saat inilah rakyat di Jawa Barat mengadakan perlawanan terhadap tentara Jepang dengan jalan merampok senjata mereka serta peralatan lainnya yang akan dipergunakan untuk menghantam tentara Sekutu/tentara Inggris yang akan masuk ke Jawa Barat. Sesuai berita dari Gedung Joang, Menteng Raya 31, Jakarta bahwa dalam waktu singkat tentara Inggris akan memasuki Bogor dan sekitarnya.

Organisasi perlawanan rakyat ini terdiri atas bercorak ragam pasukan antara lain Polisi Gerak Cepat (PGC), Lasykar Rakyat, Kris, Barisan Pelopor, Pemuda Revolusi, Bambu Runcing, Barisan Pemuda, Benteng Hitam dan lain-lain barisan pula dari Jakarta yang digerakkan dari Menteng Raya 31 di bawah pimpinan Soekarni dan Tan Malaka untuk mengibarkan semangat perjuangan anti tentara Inggris. Muncul juga di antara barisan-barisan rakyat ini, barisan-barisan bersenjata yang tidak segan-segan merampas barang-barang rakyat serta melakukan pembunuhan dalam kegiatannya. Barisan ini dipimpin oleh Amin dari Cibinong dan Matjem dari Cibarusa. Mereka diperlengkapi dengan senjata-senjata yang lebih kuat daripada persenjataan yang dimiliki Mobile Brigade. Namun demikian atas kebijaksanaan kepala kepolisian Keresidenan Bogor, Komisaris Polisi R. Enoch Danubrata dapat mengatasi barisan pemuda ini dan mengarahkan mereka untuk mempertahankan daerahnya dengan penuh tanggung jawab. Caranya ialah dengan jalan mengangkat Matjem dan Amin menjadi pembantu-pembantu utama dari Kepolisian Cibinong dan Cibarusa. Peristiwa ini terjadi sekitar bulan Agustus sampai dengan Oktober 1945. Kemudian diangkat pula Inspektur Polisi Tingkat II Junus dan Inspektur Polisi Tingkat II R. Hartono selaku kepala dan wakil kepala polisi Kota Bogor, dengan anggota-anggota staf sebagai berikut:

- a) Inspektur Polisi Klas II Burdah.
- b) Inspektur Polisi Klas II Saleh.
- c) Inspektur Polisi Klas II Mucharam Wiranakusumah.

- d) Aip Satu Ali Mursalin.
- e) Aip Satu Achmad.
- f) Aip Dua Utoyo.
- g) Aip Dua Kuswadi.
- h) Aip Dua Idrus. (11, p.191)

Komandan-komandannya ditunjuk Karna, Rosyid, Enduch, Inspektur Polisi Klas II Junus dan Inspektur Polisi Klas II R. Hartono diangkat merangkap jabatan kepala polisi militer Daerah Bogor. Pemimpin-pemimpin Polisi Gerak Cepat (PGC) yang kemudian diubah namanya menjadi Polisi Istimewa Daerah Bogor tidak terkecuali dalam pergerakan di daerah Bogor ini.

Polisi Gerak Cepat di Bogor ini pada mulanya dibentuk oleh Inspektur Polisi Klas II Junus. Anggota-anggotanya diangkat dari bekas *Tokubestu Keisatsu Tai*, para pemuda dari Barisan Bogor dengan tokohnya Rudi Juwono, mahasiswa-mahasiswa dari Fakultas Kedokteran Hewan (Soetjipto, I Made Teken, F. Najoan, Syahari), para pemuda dari Kris misalnya Gozali. Item, Watuksekek, K. Lumy, J. Mongula, J. Mantri dan dari barisan-barisan lain terkenal nama Utomo, Basir, Legiman Oka Nasution dan lain-lain.

Tepat dalam bulan Oktober 1945 Brigade Jenderal Mac Donald, pemimpin Sekutu (Inggris) mulai bergerak memasuki daerah Bogor. Saat itu juga timbul pertempuran-pertempuran yang dahsyat melawan tentara pendudukan Inggris. Tentara Sekutu yang diboncengi NICA banyak yang korban. Walaupun dengan senjata/perengkapan yang amat sederhana namun barisan-barisan pemuda Lasykar Rakyat mempunyai semangat juang yang tinggi dalam pertempuran-pertempuran sehingga selalu memperoleh kemenangan terhadap Sekutu. Senjata dan peralatan lainnya milik Sekutu dapat direbut, sehingga boleh dikatakan Polisi Istimewa Daerah Bogor memiliki kelebihan senjata. Senjata yang berhasil dirampas dari tangan tentara Inggris itu kemudian diserahkan kepada Tentara Republik Indonesia (TRI) Divisi II. Akibat serangan pemuda dan rakyat begitu hebat, maka tentara Sekutu banyak yang mati, dan sebagian pula menyerah serta memihak pada Republik Indonesia dengan segala kelengkapan perang yang ada pada mereka itu.

Melihat situasi genting ini, Mac Donald memerintahkan Residen Barnas Wiratuningrat (residen Bogor) sebagai kepala Pemerin-

tahan RI di daerah Bogor, agar para lasykar-lasykar rakyat maupun barisan pemuda segera menghentikan penyerangan terhadap kesatuan-kesatuan Inggris, kalau tidak Inggris akan menghancurkan Kota Bogor dan sekitarnya dengan segala kekuatan dan persenjataan mereka. Ultimatum ini tidak diindahkan sama sekali oleh barisan-barisan pemuda maupun lasykar-lasykar rakyat, malah sebaliknya mereka lebih menyerang tentara Inggris.

Tentara Inggris tak dapat mengalahkan pasukan-pasukan Indonesia ini. Inggris terjepit dan kewalahan, akhirnya banyak tentara Inggris menyerah dan berbalik memihak Indonesia, termasuk Brigade Tank Inggris lengkap dengan anak buahnya, tank-tank, senjata dan lain-lain milik mereka. Polisi Istimewa Bogor mempunyai tiga Front diatur secara bergilir dan dikuasai oleh tiga pasukan Front Bogor dipimpin oleh Komandan Polisi Utomo, Front Cianjur dipimpin oleh Komandan Polisi KE. Lummy dan Front Sukabumi di bawah pimpinan Soemardi melaksanakan tugas bergiliran dengan tujuan agar setiap pasukan polisi dapat mengenal daerah Bogor secara baik.

Pertempuran-pertempuran yang terjadi di Sukabumi, Parung-kuda, Kalibata, Penyairan, Sukanagara, Ciampea, Lampegan, Cilaku, Cianjur, Warungkondang, Bondongan, Darmaga pada bulan November 1946 merupakan pertempuran-pertempuran sengit antara pasukan-pasukan Polisi Istimewa melawan tentara Inggris/NICA telah membawa hasil kemenangan besar bagi Polisi Istimewa.

Markas Besar Tentara Inggris yang berkedudukan di sekitar Kebun Raya Bogor telah diserang terus-menerus oleh Polisi Istimewa. Pada penyerangan markas besar tentara Inggris ini, beberapa orang anggota Polisi Istimewa telah tertangkap dan dimasukkan ke dalam penjara serta dihukum mati oleh pihak Sekutu. Sebelum pelaksanaan hukuman mati mereka dapat meloloskan diri dari tahanan. Mereka yang tertangkap itu antara lain Komandan Polisi KE. Lummy dan beberapa orang anak buahnya.

Di dekat Istana Bogor, tertembak pula Komandan Polisi Rudi Juwono oleh NICA, tetapi dapat melarikan diri. Pertahanan anggota-anggota Polisi Istimewa dalam mengusahakan bahan-bahan makanan untuk Divisi II Resimen IV Batalyon I TRI yang ber-

markas di daerah Jasinga, Bogor. Bahan-bahan makanan ini diambil dari gudang bahan makanan di Karawang, Cikampek, Purwakarta lewat Cianjur, oleh Polisi Istimewa di bawah pimpinan Komandan KE. Lummy, bersama-sama dengan beberapa orang anggota TRI yang menyamar selaku anggota Polisi Negara.

Polisi Istimewa di daerah Bogor pada waktu itu boleh dikatakan melaksanakan dua tugas dalam sehari, yaitu pada siang hari sebagai polisi biasa, sedangkan pada malam harinya sebagai gerilyawan-gerilyawan. Begitu hebat peranan Pemerintah Republik Indonesia dengan polisi negaranya di daerah Bogor, sehingga betul-betul dapat diakui tentara Inggris.

Kedudukan Polisi Negara selaku staf keamanan penegak hukum sangat dihormati tentara Sekutu, dan satu hal yang dikagumi tentara Inggris adalah karena Sang Saka Merah Putih tetap berkibar dengan megah di daerah Bogor ini, dan tidak pernah diturunkan oleh NICA atau siapa pun. Dengan kepercayaan penuh NICA kepada Polisi Negara menyebabkan Polisi Negara mendapatkan kebebasan bergerak. Kesempatan ini sungguh-sungguh digunakan dengan cermat untuk membantu barisan-barisan pemuda, lasykar-lasykar rakyat serta TRI Divisi II, baik dalam segi operasional sebagai penghubung antara front yang satu dengan yang lain, mengusahakan bahan makanan, alat-alat pengangkut dan lain-lain. Karena itu strategi tentara, kekuatan militer, peralatan senjata, kubu-kubu pertahanan Sekutu diketahui persis oleh TRI dan barisan-barisan pemuda/lasykar-lasykar rakyat.

Kesempatan ini pula digunakan oleh Batalyon I dalam Resimen IV Divisi II TRI untuk menyusupkan anggota-anggotanya menyamar menjadi anggota Polisi Negara dengan jalan memperbantu-kannya pada Korps Polisi Negara untuk ditugaskan pada tugas-tugas khusus dalam mengamati gerak-gerik NICA. Mayor Ibrahim Adjie Komandan Yon I Resimen IV Divisi II TRI merupakan salah satu anggota Polisi Negara (yang menyamar) bekerja sama dengan Komandan Polisi KE. Lummy seringkali melaksanakan tugas-tugas yang paling berbahaya dan berat sekali, ialah tugas untuk mengangkut senjata yang dapat dirampas dalam pertempuran-pertempuran itu dibawa ke Karawang yang ada saat itu dipimpin oleh Jenderal Mayor Didi Kartasasmita dalam menghadapi Inggris/NICA dari jurusan Klender dan Tambun, dengan

cara menerobos pertahanan Inggris yang begitu kuat antara Bogor dan Cianjur.

Pertahanan Inggris di Sukabumi, Gadog, Cisarua, Puncak, Ciaman, Cipanas, Cugenang sampai Cianjur sangat ketat. Namun begitu hebatnya Mayor Ibrahim Adjie dan Komandan Polisi KE. Lummy mereka berdua sering dapat melewati pos-pos pertahanan Inggris ini dengan membawa senjata-senjata milik Inggris itu dengan cara mengikatnya di bawah mobil. Memang tugas ini sangat berbahaya, sebab bila senjata yang dibawa mereka ini tertangkap, pasti mereka ditembak mati di tempat itu juga.

Hal ini juga merupakan ketentuan yang diumumkan oleh pihak tentara Inggris. Polisi Negara saat itu hanya boleh memegang senjata Karaben M 95, sedangkan senjata yang sering dibawa oleh Mayor Ibrahim Adjie dan Lummy itu adalah senjata-senjata berat, misalnya mitraliur dan lain-lain, yang berhasil direbut dalam pertempuran dengan Sekutu di sekitar daerah Bogor itu. Memang hal ini sudah merupakan suatu resiko perjuangan bagi kedua orang tadi. Dengan memperoleh senjata-senjata berat milik tentara Inggris itu, maka tentara Inggris sulit untuk bertahan, karena selalu timbul pertempuran-pertempuran sengit antara TRI, Barisan Pemuda, Lasykar-lasykar Rakyat menentang Sekutu. Pertempuran-pertempuran hebat ini berjalan sampai penarikan tentara Inggris dari Indonesia diganti secara resmi dan terang-terangan oleh NICA (Pemerintah Sipil Belanda). Namun Polisi Istimewa tetap bergerak menggempur NICA bersama TRI dan para pejuang-pejuang bangsa sampai pada pengakuan kedaulatan 29 Desember 1949 oleh pihak Belanda kepada Indonesia. Hal ini terbukti bahwa pada tanggal 20 Desember 1949 kepala polisi Keresidenan Bogor telah memerintahkan KE. Lummy untuk berangkat ke Serang dengan kereta api bersama-sama semua pasukan Polisi Istimewa Sukabumi, Cianjur, Bogor, yang terdiri atas 800 orang anggota guna mengambil alih kekuasaan dari pihak Belanda kepada Republik Indonesia. Jadi kurang beberapa hari lagi baru penyerahan kedaulatan. Polisi Istimewa telah siap siaga untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintah Belanda.

Strategi yang digunakan adalah penyebaran Polisi Istimewa ini ke seluruh pelosok daerah Banten untuk dapat menduduki dan mengambil alih semua Pos Polisi Belanda. Proses ini berjalan lan-

car, sampai pada tahun 1951, maka sebagian dari 800 orang anggota Polisi Istimewa yang bertugas di daerah Banten ini dijadikan anggota Mobile Brigade Rayon Banten dengan nama Korps 5119.

Yang terpilih di antara mereka ada 205 orang anggota dan Aip TK. II KE. Lummy diangkat selaku wakil komandan Kompi 5119 Mobile Brigade Rayon Banten ini. *Tokubetsu Keisatsu Tai* di Bandung yang dilebur menjadi Polisi Istimewa dipimpin oleh Inspektur Polisi Memet Rachmat, Gaos dan Suwarno Haryono juga telah mengadakan perlawanan serta perlucutan senjata terhadap Tentara Pendudukan Jepang di markas-markas pertahanannya. Kegiatan-kegiatan Polisi Istimewa dalam Perang Kemerdekaan I dan II di Jawa Barat sama halnya dengan daerah-daerah lain seperti di Jawa Timur, di mana Polisi Istimewa juga pindah bersama-sama pemerintah Republik Indonesia ke Yogyakarta.

2.2.4 *Perkembangan Brimob di Jawa Tengah*

Seperti di Jawa Timur dan Jawa Barat, maka di Jawa Tengah sama saja halnya. Polisi Istimewa bersama rakyat dan pemuda-pemuda telah berjuang melawan tentara Jepang dan melucuti senjata mereka. Perang Kemerdekaan I dan II serta penyerahan kedaulatan telah banyak memberikan amal baktinya untuk mempertahankan tetap berdirinya negara Republik Indonesia. Di Jawa Tengah terkenal pengaruh serta peranan Polisi Istimewa Surakarta.

Pada saat Proklamasi Kemerdekaan Negara RI, bekas Peta maupun Polisi RI sudah tidak lagi dipersenjatai Jepang. Senjata-senjata pada waktu itu telah dikumpulkan semua di Rumah Sakit Umum Solo. Rakyat bersama Polisi RI dan Komite Nasional (KNI) Surakarta menuntut agar pemerintahan *Koti Zimu Kyoku* Surakarta diserahkan kepada Pemerintah Republik Indonesia, dan Polisi RI menuntut agar diberikan kembali senjata-senjata mereka.

Akhirnya semua senjata yang disimpan di RSU Solo itu dapat direbut dan diangkut seluruhnya ke Kantor Besar Polisi di Solo. Bendera Jepang *Hinomaru* tadinya tidak diiklaskan oleh *Kempeitai* untuk diturunkan, berhasil diturunkan oleh para pemuda dan Polisi RI. Senjata-senjata yang direbut dari tangan Jepang itu kemudian dibagi-bagikan kepada Lasykar-lasykar Rakyat, Angkatan Muda dan bekas anggota-anggota *Heiho* dan Peta. Solo diperkuat menjadi 1 batalyon dengan tambahan dua kompi dari

Polisi RI dan dua kompi pemuda/pelajar dari pelajar-pelajar SMT.

Anggota-anggota SMT ini kemudian sebagian masuk menjadi Polisi RI dan sebagian lagi dilebur ke dalam *Lasykar Kere* (Tentara Pelajar). Pimpinan-pimpinan kepolisian di Solo waktu itu antara lain Inspektur Polisi I Domo Pranoto, Inspektur Polisi II Jotoprano, dan Inspektur Polisi II Soedidjo. Dari pimpinan Barisan Polisi Istimewa terkenal Pembantu Inspektur Polisi Sukatno, Ostenrik Tjitrosoenarjo, Ratna Atmadja dan dari Barisan Tentara Pelajar Achmadi, Utoro dan Soewardi. Kepala Polisi Surakarta waktu itu adalah Komisarisi Polisi II R. Sukatno, yang telah berjasa dalam mempersiapkan adanya Kepolisian Keresidenan Surakarta itu. Kemudian diganti dengan Komisarisi Polisi I R. Saleh Sastranegara yang nantinya meneruskan serta meningkatkan konsolidasi kepolisian serta memimpin perjuangan Polisi RI pada Perang Kemerdekaan II di Kota Solo dan daerah sekitarnya.

2.2.5 *Perkembangan Brimob di Sumatra*

Sama halnya dengan daerah-daerah lain di Indonesia, maka Sumatra Utara di daerah Tapanuli dan Sumatra Timur, *Tokubetsu Kesatsu Tai* dilebur menjadi Polisi Istimewa. Peleburan *Tokubetsu Tai* ke dalam Polisi Istimewa di daerah Sumatra Utara khususnya di Tapanuli dan Sumatra Timur itu secara serentak disambut hangat oleh rakyat.

Timbul semangat yang menyala-nyala untuk mempertahankan Proklamasi 17 Agustus 1945. Di daerah Tapanuli Polisi Istimewa ini dipimpin oleh M. Kadiran, sedangkan di Sumatra Timur dipimpin oleh Raden Yusuf dan Paulus Surojo. Secara regional Polisi Istimewa di kedua daerah ini terus melancarkan serangan-serangan terhadap Tentara Pendudukan Jepang. Polisi Istimewa bersama-sama rakyat dan Barisan Pemuda serta organisasi-organisasi massa serentak bangkit melawan Jepang serta melucuti senjata-senjata mereka. Sebagai akibat perlawanan serta perlucutan senjata terhadap Jepang ini, maka timbullah banyak korban, dan bangsa kita berhasil merebut banyak senjata Jepang itu. Senjata Jepang yang direbut ini tidak saja senjata ringan, malah senjata berat banyak juga yang berhasil direbut, misalnya meriam, panzer dan tank.

Di Sumatra Utara dan Timur pada saat itu Polisi Istimewa bersama-sama seluruh rakyat berusaha secara sadar dan penuh

tanggung jawab merebut kekuasaan dari tangan Pemerintah Jepang yang pada saat itu berusaha untuk menyerah kepada Sekutu, sebagai konsekuensi dari kekalahan mereka dalam Perang Dunia II itu. Usaha melucuti senjata-senjata Jepang itu berhasil. Kemudian Polisi Istimewa bersama-sama dengan Tentara Keamanan Rakyat (TKR) dan organisasi-organisasi massa, mulai melaksanakan persiapan-persiapan pertahanan guna membendung serta menggagalkan rencana kedatangan Sekutu yang pada saat itu setahap demi setahap mulai mendarat di Belawan dan selanjutnya menduduki sebagian dari Kota Medan. Perlawanan secara terus-menerus dilaksanakan oleh Polisi Istimewa terhadap tentara Sekutu. Polisi Istimewa pada saat itu melaksanakan dua tugas yaitu pada siang hari menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dan pada malam hari menyamar dan menghancurkan tempat pertahanan tentara Sekutu. Dengan mengalami korban akibat perlawanan dan pertentangan-pertentangan, Kota Medan pada akhirnya dapat diduduki juga oleh tentara Sekutu. Setelah Kota Medan diduduki, secara berangsur-angsur pemerintahan diserahkan kepada NICA (Belanda) Sekutu dan kaum kolonialis Belanda mulai mengatur strategi untuk perlahan-lahan meluaskan wilayah kekuasaannya keluar Kota Medan.

Hal ini diketahui oleh organisasi-organisasi massa perjuangan Barisan-barisan Pemuda dari Polisi Istimewa. Mereka mulai mengatur siasat dan memperkuat barisan-barisan pertahanan rakyat bersama-sama Polisi Istimewa dapat menggagalkan rencana tentara Sekutu dan Kolonialisme Belanda ini. Pertahanan rakyat dan Polisi Istimewa di Sumatra Utara dan Timur ini sangat baik, sehingga sukar untuk ditembus oleh Sekutu dan NICA.

Penindasan dan penekanan-penekanan terhadap rakyat dan organisasi-organisasi massa perjuangan di Kota Medan mulai dilaksanakan oleh Sekutu. Polisi Istimewa di daerah Tapanuli di bawah pimpinan M. Kadiran diperintahkan berangkat ke daerah Medan untuk memperkuat barisan Polisi Istimewa di Kota Medan dan sekitarnya. Pergerakan-pergerakan terhadap Belanda dilancarkan terus-menerus, dan akhirnya Belanda tak bisa bertahan.

Kegagalan-kegagalan Belanda dalam memperluas wilayah jajahannya di Sumatra Utara dan Timur ini menyebabkan Belan-

da bertindak sewenang-wenang. Belanda mulai mengadakan agresi pertama dengan mengerahkan seluruh pasukan lengkap dengan segala peralatannya yang kuat baik dari Angkatan Darat maupun Angkatan Udara. Angkatan Darat Sekutu ini mulai didrop di daerah Pantai Cermin untuk menghadang pasukan-pasukan perjuangan Indonesia serta mendesak pasukan-pasukan ini untuk tidak bisa bertahan karena Sekutu datang menyerang dari belakang. Mobile Brigade TKR dan barisan-barisan pemuda bertempur mati-matian mempertahankan garis pertahanan, namun pada akhirnya tidak bisa bertahan. Mereka mundur untuk selanjutnya mengatur siasat baru guna mempertahankan baris pertahanan di daerah Sumatra Timur dan Tapanuli. Di Sumatra Timur Brigade Mobile yang dipimpin oleh Paulus Surojo mengadakan perubahan taktik yaitu dengan jalan mendrop Mobile Brigade memasuki daerah-daerah pertahanan Sekutu, dan dari situ mereka mengadakan gerilya terhadap pos-pos pertahanan Sekutu dan Belanda. Dengan serangan-serangan yang begitu hebat, tetapi Belanda tentu lebih kuat lagi, disebabkan peralatan dan perseniataannya lebih kuat jika dibandingkan dengan persenjataan yang dimiliki Mobile Brigade dan TKR serta rakyat setempat.

Belanda menyerang Sumatra Timur dengan pasukan-pasukan darat dan udaranya. Juga pada saat itu Belanda mencoba untuk mendaratkan angkatan lautnya dengan kapal perang Jp. I Teluk Sibolga. Jiwa dan semangat juang yang berkobar-kobar di dalam dada seluruh rakyat bersama Mobile Brigade dan TKR, menyebabkan mereka bertahan sungguh-sungguh sehingga dengan ketat dan gigih berjuang menentang Belanda itu menyebabkan Sekutu dan Belanda gagal menduduki Kota Sibolga.

Perjuangan dan pertahanan rakyat terus dilaksanakan, dibantu TKR dan Mobile Brigade. Akhirnya muncul Perjanjian Renville antara Belanda dan Indonesia, dan kemudian diadakan garis demarkasi sebagai garis batas antara Pendudukan Belanda dan Indonesia. Pada saat itu Polisi Istimewa memegang peranan penting. Polisi Istimewa ditugaskan pemerintah untuk menjaga keamanan dan ketertiban di tempat-tempat yang dianggap penting dan menjaga garis demarkasi. Polisi Istimewa ditugaskan untuk menjaga jangan sampai ada penyusupan-penyusupan melewati garis demarkasi.

Walaupun begitu kekacauan-kekacauan terus berlangsung, Polisi Istimewa di samping harus menjaga keamanan dan ketertiban sepanjang garis demarkasi juga harus menjadi pelopor serta tulang punggung pemerintah untuk mencegah kekisruhan antara organisasi-organisasi massa, partai-partai politik, dan barisan-barisan pemuda yang saat itu mulai berlomba-lomba menyusun kekuatan dan saling bertentangan. Muncullah perebutan kekuasaan di antara satu dengan yang lainnya, sehingga betul-betul keadaan ini sangat merepotkan pemerintah Indonesia. Oleh karena pihak Belanda mempunyai nafsu untuk tetap menguasai Indonesia, menyebabkan mereka tidak puas terhadap apa yang telah dicapai dalam Perjanjian Renville itu. Karena ketidakpuasan Belanda itu menyebabkan Belanda mulai mengadakan siasat dan taktik baru.

Tanggal 19 Desember 1948 Belanda melancarkan kembali serangan-serangan yang kita kenal dengan sebutan Agresi Belanda Kedua dengan mengerahkan segenap kekuatan pasukan dan senjatanya baik darat maupun udara. Belanda bertindak membabi-buta dan lebih gawat daripada agresi pertama. Begitu hebat serangan Belanda kali ini, sehingga kota-kota diduduki lagi. Melihat keadaan ini tentu pemerintah Indonesia tidak berdiam diri, pemerintah Republik Indonesia mulai pula memikirkan serta menentukan strategi baru untuk mengadakan perlawanan secara gerilya guna menyerang serta menduduki daerah-daerah pinggiran kota-kota yang pada waktu itu susah dikuasai lagi oleh neokolonialisme Belanda.

2.2.6 *Perkembangan Brimob di Maluku*

Meskipun begitu Polisi Istimewa dengan mendapatkan bantuan yang sungguh-sungguh dari rakyat dan pantang menyerah begitu saja kepada Belanda. Berkat perjuangan yang gigih dari Polisi Istimewa di bawah pimpinan M. Kadiran maka daerah-daerah penghubung antara kota dan desa sulit untuk dikuasai Belanda. Perlawanan ini berjalan serius dan bisa bertahan kurang lebih satu tahun, dan hal ini menyebabkan Belanda lumpuh sama sekali. Keadaan semacam ini terjadi pula di daerah Maluku khususnya di Kota Ambon, Saparua, Morotai dan sebagainya.

Rakyat dengan mendapatkan bantuan Polisi Istimewa bangkit

melawan Jepang serta berangsur-angsur melucuti senjata dari tangan Tentara Pendudukan Jepang. Hal ini lebih genting lagi karena tadinya Jepang tidak mau menyerah kepada tentara Sekutu (Australia). Walaupun sudah ada pengumuman Jepang harus menyerah kepada Sekutu, namun di Maluku Jepang berkeras kepala.

Melihat gelagat ini rakyat dan Polisi Istimewa serta barisan-barisan Pemuda Pelajar bangkit menentang Jepang serta melucuti senjata dari tangan mereka. Di pos-pos pertahanan Jepang terjadi pertempuran-pertempuran. Polisi Istimewa bersama-sama rakyat dan barisan Pemuda Pelajar mengadakan taktik gerilya menentang Jepang. Banyak sekali tentara Jepang yang mati dibunuh di Ambon, disebabkan kebencian rakyat Maluku terhadap perlakuan Jepang di Maluku selama 3½ tahun itu. Kesempatan ini merupakan suatu tindakan balas dendam antara rakyat Maluku terhadap Jepang.

Kekuatan Belanda menjadi lemah, akhirnya tak bisa bertahan. Maka pada tanggal 19 Desember 1949 sebagaimana di daerah-daerah lain begitu pula di Maluku, Belanda harus mengakui kekuatan, kemampuan serta Kemerdekaan Negara Republik Indonesia. Belanda terpaksa harus menyerahkan kedaulatan kepada pemerintah dan rakyat Indonesia di seluruh kawasan Nusantara.

Terjadilah serah terima kekuasaan di seluruh Indonesia. Di Medan pengoperan kekuasaan dari tangan Belanda kepada Indonesia sekaligus serah terima kekuasaan kepolisian di Kota Medan kepada Mobile Brigade. Dengan demikian peranan Mobile Brigade di Kota Medan pada saat itu turut menentukan keberhasilan perjuangan bangsa dan negara Indonesia. Keadaan semacam ini terjadi pula di daerah Maluku khususnya di Kota Ambon dan Saparua. Polisi Istimewa dengan dibantu oleh rakyat dan barisan-barisan pemuda pelajar, organisasi-organisasi massa, membrontak melawan Sekutu. Rakyat Maluku sudah tidak sudi dijajah lagi, menyebabkan rakyat Maluku membenci Belanda, apabila dilihatnya Belanda dalam perjalanan, pertemuan-pertemuan dan sebagainya, mesti ada saja gara-gara yang dibuatnya untuk membunuh Sekutu.

Begitu hebat serangan-serangan Polisi Istimewa dan rakyat Maluku, namun Jepang masih kuat bertahan juga. Hal ini disebabkan kekuatan perlengkapan serta persenjataan yang dimiliki ten-

tara pendudukan Jepang ini. Cukup lama juga tentara Jepang ini mengadakan pertahanan di Kota Ambon. Sampai pada masuknya Sekutu (NICA), Jepang masih melawan Sekutu, sehingga timbul pertempuran-pertempuran sengit antara Jepang dan Sekutu/Belanda. Salah satu pertempuran yang memakan korban tentara Jepang dalam jumlah yang tidak kecil adalah pertempuran antara Jepang dan Sekutu di Kudamati (Ambon).

Pada pertempuran di Kudamati ini gugurlah seorang komandan tentara Sekutu (Australia) yang sampai saat ini di tempat itu didirikan tugu peringatan oleh Pemerintah Australia, sekalipun tulang-belulanganya telah diangkat dan dipulangkan ke Australia. Akhirnya Jepang menyerah kepada Sekutu (Belanda). Melihat tindakan tentara Sekutu mulai berangsur-angsur menyerahkan kekuasaan (pemerintahan) kepada Belanda, rakyat Maluku marah. Hal ini disebabkan rakyat Maluku telah bosan dan antipati terhadap Belanda. Selama 350 tahun lebih Belanda menjajah Maluku tidak pernah meninggalkan kenang-kenangan indah di hati rakyat Maluku. Yang ditinggalkan hanya beberapa buah gereja tua dan sekolah-sekolah dasar yang sudah rusak. Universitas belum pernah terdengar di Ambon apalagi dibangun oleh Belanda. Belanda hanya memerlukan tenaga rakyat Maluku untuk dijadikan kuda beban berupa *Ambonsche Soldaat* (Serdadu Ambon) saja dengan jalan mengangkat serta memuji-muji orang Ambon, dengan tipu muslihat yang keji di belakang maksud dan tujuan pemujian itu.

Hal ini yang menyebabkan kebencian yang telah terpendam di dalam setiap sanubari masyarakat Maluku yang tiba-tiba muncul berkobar-kobar untuk melawan tentara Sekutu pada saat rakyat Maluku tahu bahwa di dalam tentara Sekutu ini ada Belanda. Pembontakan-pembontakan dan kerusuhan-kerusuhan terjadi di Ambon, Saparua, Morotai dan lain-lain itu pada saat Sekutu secara bertahap mulai menyerahkan pemerintahan kepada Belanda.

Sebagaimana di Jawa, Sumatra tentu juga di Sulawesi, Kalimantan dan lain-lainnya, maka di Maluku Polisi Istimewa dengan mendapatkan dukungan penuh seluruh rakyat dan pemuda berjuang mati-matian untuk mempertahankan negara Republik Indonesia, meskipun perjuangan rakyat, organisasi-organisasi massa dan Polisi Istimewa kurang berhasil karena kekuatan senjata dan perlengkapan lainnya sangat kurang. Hal ini menyebabkan pihak

Sekutu/Belanda lebih kuat kedudukannya, namun di sekitar Kota Ambon, Saparua, Morotai dan sebagainya selalu timbul kerusuhan-kerusuhan.

Sampai adanya Persetujuan Renville, Polisi Istimewa bersama rakyat dan barisan-barisan pemuda di Maluku tetap menyusup masuk ke garis demarkasi yang telah ditetapkan antara Belanda dengan Pemerintah Republik Indonesia. Berkat kegigihan perlawanan Polisi Istimewa dan masyarakat, barisan-barisan pemuda pelajar dan organisasi-organisasi massa di Maluku, maka sebagian besar daerah Maluku tidak dapat dikuasai Belanda.

Setelah perlawanan dengan taktik gerilya dan kampanye anti penjajahan Belanda dilancarkan oleh tokoh-tokoh organisasi massa, dan barisan-barisan pemuda pelajar, maka Belanda tidak mampu lagi untuk bertahan di daerah Maluku. Setelah persetujuan pengakuan kedaulatan pada bulan Desember 1949 kepada Indonesia, maka serah terima kekuasaan seharusnya diserahkan kepada Pemerintah Indonesia. Polisi Istimewa mengambil alih kekuasaan di Kota Ambon dan sekitarnya.

Belanda tidak puas dengan penyerahan kekuasaan kepada RI di Maluku sehingga dilancarkannya isu yang buruk untuk memecahbelahkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia oleh antek-antek Belanda di Kota Ambon dan sekitarnya. Propaganda-propaganda busuk ini dilancarkan oleh para *ambtenaar*, bekas-bekas KNIL, para latupatih yang takut akan kehilangan kewibawaan/kekuasaannya di tengah-tengah rakyat. Yang paling berpengaruh adalah Mr. Dr. Soumokil, jaksa agung Negara Republik Indonesia Timur yang berkedudukan di Makasar, Ir. Manusama dan beberapa orang lagi yang betul-betul digunakan Belanda selaku alat mereka.

Hal inilah yang mengakibatkan munculnya peristiwa RMS tanggal 24 April 1950 di Maluku, sebagai lawan pemerintah RIS. Di sini terlihat secara jelas betapa hebatnya pengaruh-pengaruh politik Belanda untuk mengadudombakan bangsa Indonesia ini satu dengan yang lainnya. Namun atas karunia dan anugrah Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang serta berkat jasa-jasa TNI Angkatan Darat dengan dibantu sepenuhnya Mobile Brigade akhirnya RMS dapat ditumpas dan daerah Maluku kembali di bawah Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setelah RMS

dapat ditumpas pemerintah daerah, secara berangsur-angsur mulai diatur di bawah Pemerintah RI Jakarta. Korps Kepolisian Negara mulai diatur di Kota Ambon dan kota-kota kecil lainnya di Maluku. Berdirilah Sekolah Kepolisian Negara di Ambon untuk mendidik/melatih kepolisian di daerah Maluku.

Pada tanggal 1 Agustus 1951 Karel Sadsuitubun memasuki Dinas Angkatan Kepolisian Republik Indonesia dan dididik pada Sekolah Kepolisian Negara di Kota Ambon tersebut, kemudian ditugaskan pada Korps Mobile Brigade di Tantui (Ambon). Korps Brigade Mobile baru terbentuk di Propinsi Maluku pada bulan Agustus 1951 dengan tiga kompi yaitu Kompi 5154, Kompi 5157 dan Kompi 5160.

Kompi-kompi ini digerakkan sejak terbentuknya Brigade Mobile untuk membantu TNI (AD) dalam menumpas habis sisa-sisa gerakan RMS. Pada tahun 1953 kompi-kompi yang ada itu ditambah pula dengan tiga kompi lagi yaitu Kompi 5121, 5148 dan 5487 sehingga menjadi enam kompi. Kemudian ditambahkan lagi satu kompi yaitu kompi 5378, tetapi kompi ini tidak lama bertugas di Maluku. Karena diperlukan di Jawa, maka Kompi 5160 dan 5378 ditarik serta dipindahkan ke Pulau Jawa. Untuk melumpuhkan sama sekali kekuatan RMS itu, maka kompi-kompi Brigade Mobile di Maluku ini seringkali diperkuat dengan kompi-kompi tempur yang didatangkan dari Kesatuan Induk Brigade Mobile di Pulau Jawa.

Keadaan ini berlangsung sampai dengan kira-kira tahun 1956. Kompi-kompi itu sering didatangkan secara mendadak, apabila sewaktu-waktu ada aksi-aksi RMS. Dengan demikian kekuatan RMS dapat dilumpuhkan, kecuali sisa-sisanya yang masih berkeras kepala melaksanakan kegiatan secara bergerilya. Komandan Brigade Mobile di daerah Maluku yang pertama kali diangkat adalah inspektur polisi klas dua pertama kali diangkat adalah Inspektur Polisi Klas II VE. Karamoy sejak tahun 1952 sampai dengan 1959, dibantu kepala stafnya Inspektur JE. Lino, kemudian kepala staf ini diganti dengan Inspektur Polisi Klas II Frans Taihutu. Komandan Brigade Mobile VE. Karamoy ini juga pernah diangkat menjadi koordinator inspektur Mobile Brigade 110 Maluku, Irian Barat (MALIB).

Kemudian sesudah tahun 1959 Karamoy dipindahkan ke Jakarta dengan pangkat komisaris polisi. Sekarang menjadi koordinator Brigade Mobile seluruh Indonesia dengan pangkat brigadir jenderal polisi. Menurut Letnan Kolonel Polisi Tahapary, komandan Brigade Mobile Daerah Kepolisian XX Maluku sekarang, dalam wawancara tanggal 30 Juli 1979 bertempat di Tantui Ambon, VE. Karamoy seorang pemimpin Brigade Mobile yang patut diteladani dan dihargai. Banyak hal yang baik yang dapat dicontoh dari bekas pemimpin Mobile Brigade Maluku pertama ini dalam pelaksanaan tugas selaku seorang anggota militer maupun selaku pribadi. Menurut Tahapary setelah Komisaris VE. Karamoy pindah dari Ambon, ia diganti dengan Inspektur Polisi Klas I Barmuly, sekarang sudah pensiun. Kemudian Barmuly diganti dengan Komisaris Muda Soeharto (almarhum meninggal di Kediri dengan pangkat brigadir jenderal polisi). Komisaris Muda Soeharto diganti dengan Komisaris Surojo dan Sutojo diganti pula dengan Komisaris Polisi Klas II Soewarno Harjono.

Komisaris Polisi Klas II Soewarno Harjono kemudian diganti pula dengan Komisaris Muda Satoto yang kini telah pindah ke Jakarta dengan pangkat Kolonel Polisi. Satoto kemudian diganti dengan Letnan Kolonel Polisi Tahapary sejak tahun 1973 sampai sekarang selaku komandan Brigade Daerah Kepolisian XX Maluku.

Menurut Tahapary, Brigade Mobile di Maluku sekarang ini terdiri atas 400 anggota, yang disebut satu batalyon minus, oleh karena satu batalyon penuh harus terdiri atas 600 orang anggota. Batalyon *full* ini baru direncanakan sesuai Renstra Hankam. Brigade Mobile di Maluku sekarang ini terdiri atas satu batalyon, tiga kompi yaitu satu kompi yang berkedudukan di Ternate di bawah pimpinan Kapten Polisi Kailola, satu kompi lagi di Tantui dipimpin Kapten Polisi Ursepuny, dan satu kompi bantuan berkedudukan di Markas Brigade Mobile di Ambon langsung dipimpin oleh Letnan Polisi Tahapary.

Secara organik satu kompi Brigade Mobile yang ada di Ambon terdiri atas 250 orang anggota. Berdasarkan Renstra Hankam, maka akan dibentuk satu batalyon penuh yang terdiri atas empat kompi dan masing-masing kompi harus terdiri atas 235 orang anggota. Rencana ini harus selesai tahun 1981. Empat kompi Brigade Mobile yang akan dibentuk itu direncanakan satu kompi

di Ternate, satu kompi di Tantai (Maluku Tengah) satu kompi di Tual (Maluku Tenggara) dan satu kompi lagi di Karangpanjang (Ambon). Untuk itu akan dibangun asrama-asrama Brigade Mobile di Tual, Karangpanjang (Ambon), sedangkan di Ternate dan Tantai (Maluku Tengah) Asrama Brigade Mobile ini sudah ada, dan sudah seringkali dikunjungi oleh Menteri Hankam/Pangab Jenderal M. Jusuf.

2.3 *Perkembangan Brimob Pada Tahun 1950–1955*

Pada kurun waktu tahun 1950–1955 boleh dikatakan Mobile Brigade ditugaskan untuk penumpas pembontakan-pembontakan gerombolan. Masa ini merupakan suatu masa yang amat berat bagi setiap anggota Brigade Mobile. Brigade Mobile menghadapi ujian berat karena selalu berada di front terdepan untuk menghancurkan semua gerombolan yang mencoba untuk mengacaukan/meruntuhkan Negara Kesatuan RI.

Pembontakan-pembontakan itu antara lain, pembontakan DI/TII, PRRI/Permesta, RMS dan sebagainya.

2.3.1 *Penumpasan terhadap Gerombolan APRA*

Tanggal 23 Januari 1950 APRA (Angkatan Perang Ratu Adil) di bawah Kapten Raymond Westerling bekas anggota KNIL yang terkenal dengan nama tukang pukul/algojo Belanda karena telah membunuh ribuan orang laki-laki, perempuan dan anak-anak di daerah Sulawesi Selatan dan menyerbu ke Kota Bandung dengan kekuatan 800 orang bersenjata lengkap. (22, p. 373-392) Peristiwa ini berlangsung kurang-lebih dua bulan. Tentara Westerling ini berhasil menduduki Kota Bandung dalam waktu kira-kira satu hari. Mereka melaksanakan penembakan terhadap setiap anggota TNI yang mereka jumpai sehingga dalam waktu satu hari saja mereka dapat membunuh kira-kira 79 orang anggota TNI, salah satu di antaranya adalah Letnan Kolonel Lembong. Sehubungan dengan serbuan APRA ini, maka kepala Kepolisian Negara memerintahkan untuk mengedrop pasukan Mobile Brigade dari Jawa Timur dan Kompi Guntur serta pasukan Mobile Brigade dari Yogyakarta yang kebetulan pada waktu itu berada di Jakarta. Dengan pesawat militer mereka diberangkatkan ke Bandung untuk menumpas APRA itu. Setelah tiba di Bandung mereka berusaha menduduki pos-pos penting dan mengadakan patroli-patroli secara terus-mene-

rus dan melakukan razia-razia khusus. Akhirnya seluruh gerombolan APRA dapat ditumpas, kota Bandung dapat direbut kembali dari tangan grombolan dan dikuasai oleh pasukan-pasukan kita. Dengan tertumpasnya APRA di Bandung sisa-sisa APRA itu berusaha untuk menguasai Ibukota RIS. Berkat kewaspadaan alat-alat negara termasuk kesatuan-kesatuan polisi, APRA tak berkuat lagi dan usaha mereka digagalkan.

2.3.2 *Penumpasan terhadap Pembontakan Andi Azis*

Di Makasar pasukan-pasukan bekas KNIL yang baru saja masuk APRIS dengan dipimpin oleh Andi Azis berusaha menghalangi gerakan unitarisme di Indonesia Timur. Caranya ialah dengan jalan menolak/tidak mau menerima masuknya pasukan-pasukan APRIS ke Makasar dan mereka menuntut agar pasukan-pasukan APRIS yang berasal dari bekas KNIL sajalah yang ditugaskan di sana.

Timbul kekacauan-kekacauan di Makasar. Tanggal 5 April 1950 staf teritorium Indonesia Timur termasuk pejabat panglimanya Letnan Kolonel Achmad Yunus Mokoginta ditawan oleh Andi Azis. Gerakan Andi Azis berkembang menjadi suatu gerakan yang menentang Pemerintah Republik Indonesia. Karena kekacauan-kekacauan tak bisa lagi diatasi secara perundingan damai, maka Andi Azis dinyatakan sebagai pembontak terhadap negara dan pemerintah.

Tanggal 13 April 1950 operasi militer untuk menumpas Andi Azis dipimpin oleh Kolonel AE. Kawilarang. Semua pasukan dikerahkan ke Makasar, termasuk kesatuan-kesatuan kepolisian dalam hal ini kompi Mobile Brigade dari Jawa Timur dalam rangka pembentukan kesatuan Mobile Brigade di Sulawesi. Dengan kekuatan pasukan serta senjata lengkap, pasukan-pasukan Andi Azis tak bisa bertahan, pada tanggal 8 Agustus 1950 pembontakan Andi Azis di Makasar itu dapat diamankan pemerintah daerah serta pasukan-pasukan militer dapat diatur secara baik. Mobile Brigade dapat dibentuk di Sulawesi dan melaksanakan tugas-tugasnya secara aman.

2.3.3 *Penumpasan terhadap Pembontakan RMS di Maluku*

Sejalan dengan peristiwa Andi Azis di Makasar, maka di Am-

bon pada tanggal 25 April 1950 diproklamasikan Gerakan Republik Maluku Selatan (RMS) di bawah pimpinan Jaksa Agung Indonesia Timur Dr. Mr. Chr. Soumokil yang mempunyai tujuan melepaskan Maluku dari Negara Republik Indonesia Timur maupun RIS. Hal ini jelas melawan pemerintah. Operasi militer dikerahkan ke Ambon, setelah usaha-usaha untuk menyelesaikan masalah ini secara damai menemukan kegagalan.

Operasi militer ke Maluku ini dipimpin oleh Kolonel AE. Kawilarang. Di antara pasukan-pasukan ini terdapat pula Mobile Brigade untuk menumpas gerakan RMS tersebut sesuai perintah kepala kepolisian negara. Pasukan-pasukan Mobile Brigade yang diikutsertakan untuk menumpas Gerakan RMS itu adalah kompi-kompi tempur yang didatangkan dari induk pasukannya di Jawa, seperti di Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jakarta.

Pada permulaan operasi agak sulit menumpas RMS ini karena mereka juga mempunyai pasukan-pasukan yang kuat walaupun alat-alat senjata mereka kurang, maka dengan kekuatan pasukan-pasukan APRIS, RMS dapat ditaklukkan, pemerintah dan daerah Maluku setahap demi setahap dapat dipulihkan serta dapat diatur, sesuai ketentuan-ketentuan pemerintah pusat.

2.3.4 *Penumpasan terhadap DI/TII*

DI/TII berpusat di Jawa Barat dengan memproklamasikan "Negara Islam Indonesia" pada tanggal 7 Agustus 1948 di bawah pimpinan SM. Kartosuwirjo. Kemudian DI/TII Jawa Barat ini meluas ke daerah-daerah lain di Indonesia, misalnya di Jawa-Tengah, Sulawesi Selatan, Maluku dan lain-lain.

Grombolan DI/TII di Jawa Tengah muncul setelah Aksi Militer Belanda II, pada waktu Amir Fatah mengaku dirinya sebagai anggota dari Markas Besar Pembela Masyumi memasuki daerah Tegal dan Brebes dengan pasukan Hisbullahnya serta membentuk jaringan-jaringan "Pemerintah Islam" dengan cara membentuk organisasi Islam ini kemudian dibentuk di tiap-tiap daerah dari tingkat keresidenan sampai ke desa-desa lengkap dengan program pemerintahannya dengan jalan mengangkat residen-residen sampai lurah-lurah. Setelah itu dibentuk pula Tentara Islam Indonesia

(TII) dan organisasi kepolisian yang dinamakan Barisan Keamanan Negara (BKN) dan Pahlawan Darul Islam (PADI).

Amir Fatah tidak mengakui Negara Republik Indonesia, karena menurut pendapatnya Negara Republik Indonesia telah hilang, setelah Bung Karno ditangkap dan dibuang oleh Belanda ke Bangka. Ia hanya mengakui Negara Islam Indonesia yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1948 di bawah pimpinan SM. Kartosuwirjo itu. Pasukan Mobile Brigade Keresidenan Banyumas di bawah pimpinan Komisaris Polisi RM. Bambang Suprpto Dipokusumo memasuki daerah Tegal dan Brebes tanggal 29 Januari 1949, bersama-sama dengan pasukan SWKS III dipimpin *Wehrkreise* Komando Sektor dari Batalyon II/3 yang dipimpin oleh seorang mayor dan instansi-instansi sipil, maka diadakan pertemuan pada bulan Maret 1949 di Pasir Panjang antara instansi militer, pamongpraja dan sipil serta lurah-lurah. Yang hadir pada pertemuan ini adalah: Bupati Brebes Agus Miftah, Komandan KODM Brebes Kapten Abdul Djalil, Komandan MBK Banyumas Komisaris Polisi R.M. Bambang Suprpto Dipokusumo, Amir Fatah dari Majelis Islam Indonesia, Komandan SWKS II Mayor Wongsotmodjo, Wakil Komandan MBK Banyumas, dan Pembantu Inspektur Polisi Dikin Kartowijono. (12, p.99-109)

Pada pertemuan ini diputuskan semua unsur perjuangan akan bekerja sama guna mengatasi penyerangan-penyerangan Belanda. Keputusan lain adalah mereka menunjuk pula Amir Fatah sebagai koordinator Hisbullah Tegal dan Brebes. Pasukan Hisbullah ini tidak bergerak sendiri, tetapi berada di bawah pengawasan SWKS III. Begitu datang Kamran Tjakrabuana dalam bulan Maret 1949 sebagai utusan dari Negara Islam Indonesia Jawa Barat ke Jawa Tengah dan mengadakan pertemuan dengan tokoh-tokoh DI/TII Jawa Tengah, khususnya dengan Amir Fatah di Pangarasan, maka diharapkan Amir Fatah dengan Majelis Islamnya segera mewujudkan gerakan-gerakan yang menentang kekuasaan RI serta harus mengingkari adanya Proklamasi Kemerdekaan Negara RI 17 Agustus 1945. Untuk itu Amir Fatah diangkat oleh NII selaku komandan pertempuran Jawa Tengah dengan pangkat jenderal mayor. Bulan April 1949 Amir Fatah menyerahkan tanggung jawab yang diberikan kepadanya kepada komandan SWKS II.

Sejak itu Amir Fatah mulai memimpin DI/TII di Jawa Tengah dengan melancarkan gerakan-gerakan Amir Fatah yang mulai mempersulit gerakan pasukan-pasukan Republik Indonesia serta menghambat jalannya perbekalan (makanan) kepada pasukan-pasukan Republik Indonesia. Di desa-desa mulai muncul gerakan-gerakan berupa latihan-latihan para pemuda dan rakyat yang mengikuti gerakan Amir Fatah.

Tokoh-tokoh masyarakat yang dicurigai ditangkap oleh Pembantu Inspektur Polisi Dikin Kartowijono, wakil komandan MBK Banyumas. Amir Fatah mulai membangkang terhadap pasukan SWKS dengan jalan melucuti senjata mereka atau menculik pegawai-pegawai Pemerintah Republik Indonesia. Tanggal 27 April 1949 terjadi penangkapan serta pelucutan senjata terhadap Komandan MBK Banyumas RM. Bambang Suprpto, sewaktu pulang menghadiri rapat di Citimbang dengan Komandan Seksi Suwarno, Kapten Abdul Djalil dari KDM, dan Michyat, wedana Bantarkawung. Di tengah perjalanan menuju markas pertahanan Mobile Brigade di Cikokol, RM. Bambang Suprpto dan anggota-anggota bawahannya dihadang oleh pasukan Amir Fatah dari Kompi Subechi. RM. Bambang Suprpto diminta kembali ke Tegarlaya dengan alasan perundingan dengan pasukan Amir Fatah.

Salah seorang dari rombongan RM. Bambang Suprpto yang bernama Suwarno lolos dari hadangan ini, lari ke Cikokol memberitahukan keadaan penangkapan Bambang Suprpto ini. Maka berangkatlah pasukan pengawal ke Tegarlaya dengan maksud menjemput Komandan Bambang Suprpto. Setiba mereka di Tegarlaya, mula-mula mereka disambut dengan baik, tetapi kemudian mereka disergap, dilucuti senjatanya dan ditawan oleh Kompi Subechi dari Pasukan Amir Fatah, dan Kompi Mustafa dari Jawa Barat.

Setelah terjadi peristiwa ini Pemberontakan DI/TII makin besar dan meluas baik di Jawa Barat maupun Jawa Tengah. Terjadilah penculikan-penculikan serta pembunuhan-pembunuhan di mana-mana terhadap rakyat yang tidak setuju dengan ide DI/TII. Pos pertahanan SWKS III di Desa Bantarsari diserang sungguh-sungguh. Pasukan SWKS II bertahan mati-matian tetapi akhirnya mundur pula dari Desa Bantarsari. Oleh karena DI/TII ini makin hari makin kelihatan kekuatannya serta pengaruhnya yang luas,

maka pemerintah mulai mengadakan operasi militer dengan kekuatan tiga kompi terdiri atas Kompi Djenal (SWKS IV), Kompi Prawoto (SWKS II) dan Kompi Mobile Brigade di bawah pimpinan Pembantu Inspektur Polisi Dikin Kartowijono. Pimpinan koordinator operasi dipegang oleh Kapten Prawoto dari SWKS III. Operasi dilancarkan di basis-basis DI/TII di Jawa Tengah antara lain di Tegal, Brebes, Kuningan dan daerah perbatasan Cilacap.

Dengan adanya operasi tangguh ini dari militer kita, maka pada tahun 1950 Gerakan DI/TII di Jawa Tengah makin terjepit dan makin kurang. Kemudian sisa-sisa PKI Madiun setelah selesai Aksi Militer Belanda II menghimpun kekuatan dan melakukan kekacauan-kekacauan di Gunung Merapi dan Merbabu di Jawa Tengah. Peristiwa terjadi pada tahun 1951.

Gerombolan ini dipimpin oleh Suradi Bledag. Turut serta dalam menumpas gerombolan ini korps kepolisian setempat dengan menugaskan Mobile Brigade Jawa Tengah untuk bersama-sama dengan TNI menumpas grombolan PKI itu dengan melakukan penangkapan-penangkapan terhadap grombolan itu di Surowono, di lereng Gunung Merapi dan Merbabu. Pihak grombolan berusaha menyerang dengan sengit, tetapi pihak pemerintah terus melaksanakan pembersihan dan akhirnya banyak anggota grombolan yang ditangkap.

Karena grombolan ini pula sering melakukan pengacauan di Boyolali, maka untuk mencegah gangguan-gangguan, anggota-anggota kepolisian perlu memperkuat pertahanannya di Desa Jaluren, Kemusu, Nguden, Selondono, dan Ampel. Korps kepolisian membentuk pula pasukan menyerang yang terdiri atas Dinas Pengawas Keselamatan Negara (DPKN), Pasukan Tugas Umum dan Reserse Kriminal yang ditugaskan ke daerah Merapi-Merbabu dengan pakaian sipil (penyamar) menyelundup masuk ke dalam sarang gerombolan. Setelah diketahui secara persis persembunyi-an gerombolan, maka TNI dan anggota-anggota kepolisian melakukan penggrebegan terhadap gerombolan, dan gerombolan tersebut dapat ditumpas. Selain itu pada pemberontakan Batalyon 426 tahun 1952 di daerah Klaten, grombolan Batalyon 426 mengadakan kekacauan-kekacauan di dalam kota.

Dalam rangka mengatasinya, TNI bersama-sama dengan angkatan kepolisian khususnya Mobile Brigade telah melaksanakan

operasi. Dengan adanya operasi militer bersama itu, maka pengacauan-pengacauan Batalyon 426 dapat dihancurkan, dan mereka melarikan diri ke arah selatan Klaten.

Sewaktu Batalyon 426 tiba di Delanggu, terjadi pertempuran-pertempuran dengan anggota-anggota kepolisian, dan salah seorang anggota polisi yaitu Agen Polisi II Sudomo gugur dalam pertempuran ini. Selain itu salah seorang anggota Mobile Brigade Surakarta yang kebetulan berada di Boyolali diculik serta dibunuh Batalyon 426 ini. Dengan terjadinya kejadian-kejadian di atas, Korps Kepolisian melancarkan operasi secara ketat dari desa ke desa, akhirnya gerombolan Batalyon 426 mengundurkan diri ke Boyolali, sehingga keadaan menjadi aman kembali.

Disinyalir oleh polisi bahwa grombolan Batalyon 426 melarikan diri ke arah barat Kudus, sebagian melalui Klaten dan Sukoharjo. Maka Korps Kepolisian dipimpin oleh Pembantu Inspektur Polisi II Wiryawan dengan satu seksi ditugaskan untuk mencegah mereka di Sukoharjo. Begitu kuatnya tekanan-tekanan terhadap Batalyon 426 itu, maka sisa-sisa gerombolan itu mengundurkan diri sebagian ke Jawa Barat dan sebagian lagi ke daerah Tegal dan Brebes untuk menggabungkan diri dengan DI/TII.

Kemudian muncul kerusuhan-kerusuhan di bawah pimpinan Kamran, Oni dan Amir Fatah. Juga Barisan Sakit Hati (BSH) dipimpin oleh Leman, kekacauan mana telah ditumpas oleh 10 kompi Mobile Brigade di Jawa Barat, yaitu :

- a. Kompi 501 di bawah pimpinan Inspektur Polisi I Muharam ditempatkan di Kuningan
- b. Kompi 513 dipimpin Inspektur Polisi I Beny Notosubijoso di Kadipaten
- c. Kompi 514 ditempatkan di Ciledug di bawah pimpinan Inspektur Polisi I R. Jusuf
- d. Kompi 513 ditempatkan di Cirebon oleh Inspektur Polisi I Lus Saroso
- e. Kompi 516 di Sindanglaut oleh Inspektur Polisi II Subroto
- f. Kompi 519 di Losarang oleh Inspektur Polisi II Kunto Judo
- g. Kompi 5120 di Kandanghaur oleh Inspektur Polisi II Iny Sas-troatmodjo
- h. Kompi 517 di Arjowinangun oleh Inspektur Polisi II Carles
- i. Kompi 518 di Indramayu dipimpin Inspektur Polisi II Rudy

Juwono

- j. Kompi 5130 di Majalengka oleh Inspektur Polisi II Suwarno Haryjono. (12, p.103)

Dengan demikian operasi dilaksanakan sungguh-sungguh terhadap para gerombolan sehingga gerombolan tak bisa bergerak, akhirnya mundur ke hutan-hutan untuk sewaktu-waktu turun mengacau.

Pada akhir tahun 1952 kepala Kepolisian Negara membentuk satu batalyon Brigade Mobile yang bertugas khusus untuk mengamankan kunjungan tamu negara dari Filipina yaitu Presiden Quirino. Presiden Filipina ini menginap di Istana Bogor dan bermaksud mengunjungi Bandung (Jawa Barat). Karena itu pengamanan dari Bogor-Cipanas-Cianjur-Bandung perlu ditingkatkan.

Batalyon Brimob khusus ini dipimpin oleh Komisarisi Polisi II Legowo dengan Komandan Seksi Operasi AKP Muharam Wiranatakusumah. Batalyon ini terdiri atas lima kompi, yaitu:

- a. Kompi 516 dipimpin IP/I Subroto Darsoprayitno
- b. Kompi 514 dipimpin IP/II Kuntojudo
- c. Kompi 5113 dipimpin oleh IP/I Beny Notosubijoso
- d. Kompi 5112 dipimpin IP/II Laode Aris
- e. Kompi 5120 dipimpin oleh IP/I Ony Sastroatmodjo

Dalam rangka pengamanan kunjungan tamu negara dari Filipina ini Komandan Resimen VIII/Territorium III Jawa Barat Letnan Kolonel Sambas Atmadinata telah berhasil menghalaukan DI/TII dengan memberi tugas kepada kompi-kompi pengejar untuk mengejar mereka.

Selain kekacauan-kekacauan DI/TII di Jawa Barat ini yang perlu ditumpas, maka pada tahun 1953 Ibnu Hadjar memimpin Kesatuan Rakyat yang tertindas di Kalimantan Selatan untuk membrontak. Korps Kepolisian tampil pula dengan jalan mengerahkan Korps Kepolisian di sana dipimpin oleh TA. Azis, dan juga dikerahkan Mobile Brigade dari Jawa Timur dan Tengah. Akhir tahun 1953 di Aceh muncul juga pembontakan Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA) dipimpin oleh Tengku Mohammad Daud Beureueh bekerja sama dengan Batalyon TNI dari Sidikalang yang dipimpin oleh Hasan Saleh menghendaki berdirinya Negara Islam Indonesia di bawah pimpinan Kartosuwirjo.

Untuk itu Mobile Brigade telah dikerahkan pula ke sana. Berkat kerja sama yang erat antara TNI, Mobile Brigade, dan rakyat maka pemberontakan di Aceh ini dapat dihancurkan. Untuk menumpas pemberontakan di Aceh ini, maka dikerahkan Mobile Brigade dari Sumatra Barat, Sumatra Selatan, Jawa Timur dan sebagainya. Sesudah pemberontakan DI/TII di Aceh ini, muncul pula Komando Gerilya Sulawesi Selatan (KGSS) di bawah pimpinan Kahar Muzakar, yang meminta agar semua anggota pasukannya harus masuk APRIS. Karena tuntutan Kahar Muzakar tidak dikabulkan Pemerintah RIS, maka Kahar Muzakar berhenti dari APRIS dan memberontak terhadap pemerintah. Pemerintah berusaha menyelesaikan masalahnya secara damai, tetapi Kahar Muzakar tetap berkeras dan meneruskan pemberontakan. Kemudian pada tahun 1953 ia menyetujui DI/TII Jawa Barat di bawah pimpinan Kartosuwirjo. Untuk menumpas DI/TII di Sulawesi Selatan pimpinan Kahar Muzakar ini, angkatan perang terpaksa harus melakukan operasi militer.

Operasi militer yang dilaksanakan di Sulawesi Selatan terkenal dengan nama Operasi Halilintar dan Operasi Guntur. Operasi Halilintar dan Operasi Guntur berakhir tahun 1955 di Sulawesi Selatan dalam menumpas grombolan DI/TII di sana. Namun masih ada kekacauan-kekacauan yang diakibatkan oleh sisa-sisa DI/TII. Dengan demikian Operasi Angkatan Perang bersama-sama Mobile Brigade tetap dilancarkan di beberapa tempat. Di Sinjai pada 15 Mei 1955, di Kaseputo pada tanggal 10-19 Oktober 1957, di Malili pada 10 Januari 1959 dsb. Dari Sulawesi Selatan Kahar Muzakar meluaskan wilayah pengaruhnya sampai ke Maluku. Muncullah pemberontakan DI/TII di Buru, Seram Barat, Galela (Halmahera) Pulau Sula. Untuk memadamkan pemberontakan DI/TII di Maluku Angkatan Perang mempercayakan Mobile Brigade Maluku di bawah pimpinan Komisaris Polisi VE. Karamoy dibantu oleh Ajun Komisaris Polisi J. Lino. Seluruh pemberontakan berhasil dipadamkan oleh Brigade Mobile Maluku bersama Kompi 5154, 5248 dan 5157 yang dikerahkan ke Maluku.

Selain di Maluku, Kahar Muzakar berusaha meluaskan pengaruhnya ke Nusa Tenggara Barat. Pada bulan September 1956 terjadi pemberontakan DI/TII di Lombok. Setelah diselidiki pemberontakan ini disebabkan oleh sepasukan grombolan Kahar Muzakar

dari Sulawesi Selatan. Maka dengan kerja keras Korps Kepolisian di Nusa Tenggara, grombolan ini dapat dihancurkan karena tidak mendapatkan dukungan dari rakyat setempat. Berkat ketangguhan dan kemampuan kesatuan-kesatuan Brigade Mobile di daerah-daerah seluruh Indonesia maupun kesatuan yang diperbantukan dari daerah lain telah sungguh-sungguh aktif memadamkan pembontakan DI/TII di Jawa Barat pimpinan Kartosuwirjo, di Jawa Tengah pimpinan Amir Fatah, di Aceh pimpinan Daud Beureueh, di Sulawesi pimpinan Kahar Muzakar, di Kalimantan pimpinan Ibnu Hadjar, di NTB dan Maluku yang satu sama lain telah bermufakat guna menentang Pemerintah Republik Indonesia yang sah berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

2.4 *Perkembangan Brimob Tahun 1956–1966*

Dalam kurun waktu ini, Brigade Mobile telah turut bersamasama ABRI berperanan antara lain: Penumpasan PRRI/Permesta. Trikora dalam rangka pembebasan Irian Barat, Dwikora, Peristiwa Cikini, Peristiwa Maukar, Peristiwa Idul Adha, dan peristiwa percobaan pembunuhan atas diri Presiden Soekarno di Makasar.

2.4.1 *Penumpasan PRRI/Permesta*

PRRI/Permesta adalah Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia. PRRI/Permesta lahir sebagai hasil dari terbentuknya Dewan Gajah pada tanggal 20 Desember 1956 dipimpin oleh Kolonel Simbolon di Medan dan pada 22 Desember 1956 berdirinya Dewan Banteng di Padang di bawah pimpinan Letnan Kolonel Achmad Husain, dan Dewan Manguni pada tanggal 18 Februari 1957 di Manado oleh Letnan Kolonel Ventje Sumual.

Dewan-dewan ini merupakan alat dari kaum politik yang bersifat menentang pemerintahan yang sah, Republik Indonesia. PRRI/Permesta lahir pada tanggal 15 Februari 1958 di bawah pimpinan Syarifuddin Prawiranegara, S.H. selaku perdana menteri saat itu. Karena gawatnya situasi dan terancamnya keselamatan bangsa dan negara, maka Presiden Soekarno telah mengambil langkah permulaan dengan memecatnya dari jabatan angkatan perang semua pimpinan dewan itu, dengan menginstruksikan kepada Angkatan Bersenjata Republik Indonesia untuk memadamkan PRRI/Permesta tersebut.

Dalam situasi negara dan dalam keadaan bahaya ini Brigade Mobile telah menampakkan kerja sama dengan angkatan bersenjata lainnya untuk memadamkan pembontakan. Brigade Mobile 1 Batalyon dipimpin oleh Komisarisi Polisi I Soetjipto Danoekoesoemo dibantu Ajun Komisarisi Polisi Budy Juwono. Gagak Pranollo dari Jawa Tengah telah diperintahkan ke Sumatra Utara di daratkan di Riau daratan.

Kemudian ditugaskan pula Brigade Mobile dari Jakarta, Jawa Timur, Kalimantan, Jawa Barat Batalyon Pelopor. Sesuai dengan perintah kepala negara untuk menumpas PRRI/Permesta, maka Deputy Kepala Staf Angkatan Darat Brigadir Jenderal Djatikoesoemo dengan seluruh kesatuan termasuk Brigade Mobile di bawah pimpinan M. Kadiran dan Suroyo mengadakan operasi besar-besaran melalui Sumatra Timur bagian timur, Tapanuli Selatan ke Sumatra Tengah terus ke Bukittinggi, dan akhirnya mendarat di Sibolga. Kekuatan dan potensi PRRI/Permesta dapat dilumpuhkan.

Pada pertengahan tahun 1961 Kolonel Simbolon serta seluruh pimpinan PRRI/Permesta menyerahkan diri kepada pos-pos Brigade Mobile di Tapanuli Utara, yaitu pada Kompi C Batalyon 516 Brigade Mobile. Dengan demikian berakhirilah petualangan Simbolon dan antek-anteknya di daerah Sumatra Utara. Di Sulawesi Utara dan sekitarnya Letnan Kolonel Ventje Sumual telah mengatur siasat untuk menentang Pemerintah Republik Indonesia dengan memproklamasikan berdirinya Permesta 2 Maret 1957. Seluruh rakyat khususnya generasi muda Sulawesi Utara telah dikerahkan dalam pembontakan ini, dan sebagai akibatnya telah merugikan serta mengorbankan banyak jiwa dan harta benda rakyat Sulawesi Utara.

Maluku merupakan daerah yang menentang Permesta, karena itu Permesta telah menyerang daerah Maluku dan pada mulanya berhasil menduduki Maluku Utara. Brigade Mobile Maluku sebanyak enam kompi yang dipimpin oleh Komisarisi Polisi VE. Karamoy dengan dibantu kepala stafnya Komisarisi Polisi Frans Taihatu telah bertindak tegas memihak pemerintah pusat dan bersama-sama Angkatan Darat menindak Permesta.

Dengan sikap tegas pimpinan Brigade Mobile di Maluku ini maka dalam operasi menumpas Permesta di Maluku Utara, kepala

Kepolisian Negara telah menyerahkan kepercayaannya penuh kepada Brigade Mobile di Maluku di bawah pimpinan VE. Karamoy dan Frans Taihatu untuk bersama-sama TNI menumpas Permesta. Dalam rangka merebut kembali Maluku Utara dari tangan Permesta, maka Brigade Mobile di Maluku telah mendidik 800 orang pemuda partisipan dipersenjatai dengan senjata lengkap untuk membantu kekuatan enam kompi Brigade Mobile di Maluku. Kemudian dilakukan Operasi Mena I ke Maluku Utara, yang terdiri atas seluruh kekuatan angkatan perang termasuk satu kompi *Combat Brimob* untuk merebut Morotai (lapangan terbang). Kemudian diberangkatkan pula Operasi Mena II Gabungan Angkatan Bersenjata termasuk dua kompi tempur Brimob dan satu batalyon pemuda pimpinan Frans Taihatu untuk merebut Jailolo (lapangan terbang) dan sekitarnya (Halmahera Tengah). Permesta menderita kekalahan besar serta banyak yang korban. Operasi-operasi ini dilakukan secara besar-besaran dan secara tuntas. Pasukan Permesta terdiri atas banyak pemuda/pelajar Sulawesi Utara yang belum begitu terlatih dalam segi-segi militer, sehingga tidak dapat bertahan lama dalam menghadapi serangan Angkatan Bersenjata dan Brigade Mobile. Hampir seluruh grombolan Permesta dipimpin Ventje Sumual ini ditawan dan senjata-senjata lengkapnya disita untuk kepentingan negara.

Memang tidak dapat disangkal dalam pembontakan Permesta, Brigade Mobile Maluku yang dibantu oleh 800 orang pemuda partisipan Maluku telah banyak berjasa untuk membantu pemerintah pusat menumpas Permesta di Maluku Utara dan Sulawesi Utara. Daerah Maluku Tengah dan Tenggara tidak pernah dikuasai oleh Permesta.

Pimpinan-pimpinan Brigade Mobile Maluku yang benar-benar berjasa bagi Pemerintah Republik Indonesia dalam menumpas habis pembontakan Permesta adalah Komisarisi Polisi VE. Karamoy, Komisarisi Polisi Frans Taihutu, Komisarisi Polisi ESP. Sitompul dan Inspektur Polisi I Nurdin Baso selaku komandan Pasukan Istimewa Brigade Mobile di samping TNI Angkatan Darat dan 800 orang pemuda Maluku partisipan.

2.4.2 *Trikora (Tri Komando Rakyat)*

Tri Komando Rakyat adalah suatu perintah presiden Republik Indonesia pada tanggal 19 Desember 1961 untuk membebaskan

Irian Barat dari tangan kolonialisme Belanda. Perintah presiden ini dikeluarkan di Yogyakarta dalam suatu pidato resmi. Berdasarkan perintah kepala negara ini, maka kepala Angkatan Kepolisian membentuk satu Resimen Tim Pertempuran (RTPI) yang terdiri atas Gabungan Kesatuan-kesatuan Brigade Mobile seluruh Indonesia di bawah pimpinan Komisaris Polisi Tingkat I Soetrisno.

Setelah terbentuk resimen dan tergabung dalam satu kesatuan Operasi Mandala di bawah pimpinan Panglima Mandala Mayor Jenderal Soeharto (sekarang jenderal purnawirawan/presiden Republik Indonesia), dan wakil Panglima Mandala Laksamana Muda Udara Leo Wattimena diberangkatkan ke daerah Maluku sebagai batu loncatan pendaratan ke daerah Irian Barat (Irian Jaya sekarang). Bersama-sama dengan Angkatan Bersenjata lainnya, Resimen Tim Pertempuran I Korps Brigade Mobile ini telah sukses mendaratkan satu kompi Pelopor pimpinan Inspektur Polisi Tingkat II Hudaja Sunarja serta sama-sama memancarkan bendera Merah Putih di Irian Barat. Kemudian melancarkan gerilya terhadap markas-markas pertahanan Belanda. Pada waktu pendaratan pertama kali ini 18 orang anggota Pelopor telah ditawan oleh Belanda, kemudian melalui Palang Merah Internasional dapat dipulangkan lagi ke Jakarta.

Pada waktu diadakannya Persetujuan Bunker (selaku wakil PBB untuk menyelesaikan Irian Barat/Penyerahan Irian Barat kepada Indonesia), Korps Brigade Mobile telah menugaskan perbantuan sejumlah pasukan dan penjabat untuk dipekerjakan pada *UNTEA (United Nations Temporary Executive Authority)* untuk Irian Barat, yaitu :

- a. Dua orang perwira menengah yaitu Komisaris Polisi Tk. I VE. Karamoy dan Komisaris Polisi Tk. I H. Schiff diberangkatkan ke Irian Barat terhitung mulai bulan Oktober 1962
- b. Enam bintanga pelatih Brigade Mobile diberangkatkan ke Irian Barat dalam bulan Januari 1963
- c. Satu kompi Pelopor Brigade Mobile ditugaskan di Irian Barat terhitung mulai bulan Februari 1963.

Dari UNTEA waktu itu, seorang kepala polisi dari Inggris, 12 orang perwira Angkatan Kepolisian Republik Indonesia, 18 orang perwira dari Filipina, 19 orang perwira polisi Belanda

24 orang perwira polisi Irian bersama kurang lebih 1500 orang bintara, terutama dari penduduk asli Irian. Komisaris Polisi VE. Karamoy sejak Oktober 1962 telah bertugas sebagai komandan kepolisian keresidenan (*Police Division Commander*) sebagai salah satu perwira Indonesia yang pertama kali diberikan kedudukan pimpinan di Irian Barat. (11, p.211)

Secara perlahan-lahan Brigade Mobile mengatur strategi pengamanan agar tidak timbul bentrokan-bentrokan dengan pihak UNTEA, maupun polisi-polisi Irian ciptaan Belanda. Baru pada akhir Mei 1963 kepala kepolisian Keresidenan Kota Baru/Sukarnapura membentuk suatu kebijaksanaan dengan jalan mengambil langkah untuk melancarkan serah terima kekuasaan dari Pemerintah UNTEA kepada Republik Indonesia. Kebijakan yang diambil pada waktu itu berdasarkan perintah-perintah pusat ialah segera menguasai serta melucuti anggota-anggota polisi Irian UNTEA. Mereka ini tadinya dipersiapkan Belanda untuk membrontak/melawan Pemerintah RI.

Berdasarkan struktur Pemerintah UNTEA, maka kepala polisi Keresidenan memegang peranan penting serta menentukan dalam bidang keamanan, karena waktu itu berlakunya status Tertib Sipil yang kebetulan juga kepala polisi keresidenan ini adalah wakil dari Pemerintah Republik Indonesia. Saat ini banyak sekali propaganda Belanda berupa isu-isu politik yang bersifat subversif maupun bom-bom waktu di tengah-tengah masyarakat Irian untuk mengacaukan keadaan serta ingin menimbulkan pemberontakan melawan Republik Indonesia. Usaha-usaha Belanda ini memang sudah diperhitungkan terlebih dahulu, sehingga dapat dicegah.

Begitu lancarnya operasi Angkatan Bersenjata RI maka menjelang tanggal 1 Maret 1963 berlangsunglah kekuasaan atas Irian Barat dari UNTEA kepada Pemerintah Republik Indonesia secara damai, aman dan tertib, sehingga pada tanggal 4 dan 5 Mei 1963 Presiden Republik Indonesia Soekarno untuk pertama kalinya berkenan menginjak bumi Irian Barat yang telah kembali ke pangkuan ibu pertiwi.

Semua ini dapat terlaksana atas kerja sama yang erat antara seluruh warga Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan seluruh masyarakat Indonesia khususnya Rakyat Maluku (perbatasan

Irian Barat), maka segala sesuatu yang berhubungan dengan pengambilan Irian Barat kepada Indonesia telah berjalan lancar, aman dan damai, sesuai program Pemerintah RI.

Dalam operasi pengambilan Irian Barat ini telah gugur Komodor Laut Jos Sudarso di Laut Arafura (antara Pulau Dobo dan Irian), bersama-sama anak buahnya dalam Kapal Perang RI Macan Tutul. Untuk mengenang peristiwa ini selanjutnya presiden RI mengeluarkan keputusan presiden dengan memberikan kenaikan setingkat pangkat Komodor Laut Jos Sudarso menjadi Laksamana Muda Anumerta Jos Sudarso dan diberikan gelar Pahlawan Kemerdekaan Nasional.

2.4.3 *Dwikora (Dwi Komando Rakyat)*

Dwikora ini juga merupakan perintah presiden Republik Indonesia yang diucapkan dalam pidato resmi di Jakarta. Maksud daripada Dwikora ini adalah membantu perjuangan rakyat di Kalimantan Utara dalam menuntut kemerdekaannya. Berdasarkan kepada perintah presiden Republik Indonesia itu, maka pimpinan Angkatan Kepolisian membentuk Resimen Tim Pertempuran (RTP) V.

RTP V ini dipimpin oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Daryono Wasito. Sesuai perintah pimpinan Angkatan Kepolisian RI, maka RTP V pimpinan Daryono Wasito ini diberangkatkan ke Kalimantan Utara dan melaksanakan operasi bersama-sama ABRI lainnya, juga diberangkatkan Kesatuan Pelopor untuk operasi-operasi Tipe A dan terbukti Kesatuan Pelopor Brigade Mobile ini telah mencapai sukses besar dalam perjuangan bersenjata maupun propaganda anti subversif dan lain-lain sebagainya. Korps Brigade Mobile telah memperlihatkan keberhasilan mereka yang cukup besar dan tak ternilai harganya.

2.4.4 *Peristiwa Cikini*

Usaha pembunuhan atas diri presiden RI tanggal 31 Oktober 1957 malam, pada saat presiden hendak meninggalkan Gedung SD Negeri Cikini. Saat presiden hendak naik ke mobil, terjadilah pelemparan granat sebagai usaha pembunuhan atas diri Presiden Sukarno oleh orang-orang yang tidak dikenal dan tidak bertanggung jawab. Secepatnya presiden diselamatkan oleh Korps Brigade Mobile Sudijo dan Odang Soehendar dengan jalan memeluk presiden dan membawakan presiden ke tempat yang aman.

Peristiwa ini tidak terlupakan presiden RI sampai ia menghembuskan nafas terakhir. Percobaan atas diri Presiden Sukarno di Cikini ini telah mengakibatkan korban Inspektur Polisi Tingkat I Odang Soehendar, Aip I Soemardi, Aipda Ngatijono, dan Aip I Tupon Waluyo mendapat luka-luka berat serta murid-murid SD Cikini yang meninggal maupun yang luka-luka.

2.4.5 *Peristiwa Maukar*

Sesudah Peristiwa Cikini muncul pula peristiwa percobaan pembunuhan presiden RI yang dilakukan oleh Letnan Muda Udara Alexander Maukar. Alexander Maukar telah mempergunakan pesawat jet untuk mencoba membunuh Presiden RI Sukarno dengan jalan menembaki istana presiden. Pada serangan Maukar ini, Aipda Mohd. Anwar luka-luka dan sebagian kecil Gedung Istana Negara mengalami kerusakan-kerusakan kecil.

Usaha ini dapat digagalkan oleh pihak ABRI seluruhnya khususnya Brigade Mobile dan angkatan kepolisian lainnya.

2.4.6 *Peristiwa Idhul Adha*

Peristiwa usaha pembunuhan atas diri presiden telah berlangsung pula selepas sembahyang Idhul Adha di halaman Istana Merdeka. Pada saat ini sementara presiden sedang mengikuti sembahyang Idhul Adha, tiba-tiba tampil seorang yang tidak dikenal langsung mengarahkan pistolnya ke dada presiden. Untung cepat dilindungi oleh Aipda Soedradjat yang langsung kena tembakan dan Brigadir Polisi itu mengalami luka-luka pada lehernya.

2.4.7 *Detasemen Pengawal Pribadi Presiden*

Terhitung sejak saat Proklamasi 17 Agustus 1945 dibentuklah satu Kesatuan Pengawal Pribadi Presiden di Jakarta. Pada mulanya Kesatuan Pengawal Pribadi Presiden ini berasal dari anggota-anggota *Tokubetsu Tokumu Kasaku Tai* dipimpin oleh Kana-pi dan Soehodo dengan pangkat *kaibu* (inspektur polisi). Kemudian dilebur menjadi Polisi Istimewa (Pasukan Macan). Tugas dari kesatuan ini adalah menjaga keselamatan serta keamanan presiden dan wakil presiden serta para menteri dan pejabat tinggi negara teristimewa menjaga keselamatan kepala negara dan wakil kepala

negara pada waktu berkunjung ke daerah-daerah untuk menyampaikan amanat pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa dalam hidup bermasyarakat dan bernegara.

Karena situasi dan kondisi politik tanggal 3 Januari 1946 dengan sangat rahasia dan pengamanan serta pengawalan ketat dari Detasemen Pengawal Pribadi Presiden ini di bawah pimpinan Mangil dan Soedidjo, presiden dan wakil presiden beserta seluruh keluarganya tiba dengan selamat di Yogyakarta sebagai tempat kedudukan yang baru.

Begitu pula pada zaman Agresi Belanda I di mana presiden dan keluarga sering berpindah tempat, Pengawal Pribadi Presiden selalu ikut untuk mengawal dan mengamankan presiden. Juga pada Agresi Belanda II sebagian dari Detasemen Pengawal Presiden ini ditangkap dan ditawan, baru dilepaskan lagi oleh Mangil untuk terus mengawal presiden.

Pokoknya peranan Pasukan Pengawal Pribadi sejak masa Revolusi Fisik sampai sekarang, cukup jelas fakta sejarah betapa besar kesetiaan mereka terhadap nusa dan bangsa dalam menjaga serta memelihara keselamatan dan keamanan pribadi presiden dengan penuh rasa tanggung jawab.

2.4.8 *Peristiwa Percobaan Pembunuhan atas Diri Presiden di Makasar*

Selain peristiwa-peristiwa tersebut di atas, fakta sejarah juga telah membuktikan pada kita usaha-usaha pembunuhan presiden di Kota Makasar sampai dua kali yaitu:

- a. Sewaktu presiden berkunjung ke Makasar di mana iring-iringan mobil presiden dan rombongan menuju Kota Makasar telah ditembak dari jarak jauh dengan penembakan mortir. (Penembakan dari Lapangan Terbang Mandai).
- b. Peristiwa Cenderawasih yaitu pelemparan granat yang ditujukan pada iring-iringan mobil presiden, menyebabkan sebagian besar rakyat yang sedang menyambut mesra Presiden Sukarno mengalami luka-luka berat yang juga ada yang korban. (11, p.216)

Brigade Mobile yang mengawal serta mengamankan kunjungan kepala negara sepanjang jalan raya dapat mengatasi masalah ini sehingga dengan kurnia dan anugrah Tuhan, kepala negara maupun Pasukan Pengawal Presiden serta Brigade Mobile da-

lam keadaan selamat sentosa. Semuanya ini tidak lain dari anugrah Allah yang telah menyelamatkan negara dan Pemerintah Republik Indonesia. Brigade Mobile selaku umat Tuhan telah memperlihatkan kesetiaan dan tanggung jawabnya terhadap pemerintah, bangsa dan negara dengan karya-karya nyata yang positif. Dengan demikian wajarlah Brigade Mobile mendapatkan penghargaan.

BAB III. KELAHIRAN, KEHIDUPAN KELUARGA DAN KEPRIBADIAN KAREL SADSUITUBUN

3.1 *Kelahiran*

Karel Sadsuitubun dilahirkan di Rumadian (Tual) Maluku Tenggara pada tanggal 14 Oktober 1928. (23,24). Pada masa kecilnya biasa dipanggil *Kace*. Ayahnya bernama Primus Sadsuitubun dikenal oleh rakyat Rumadian Debut (Maluku Tenggara) sebagai seorang yang taat kepada agama Kristen-Katolik serta menghormati sakramen-sakramen (liturgi dan peralatan gerejani) maupun hukum serta peraturan-peraturan gereja Roma Katolik. Juga seorang yang selalu rendah hati, sabar dan pemurah serta senang bergaul dengan saudara-saudaranya dari umat Islam yang ada pula di desa Debut itu. Sejak Karel Sadsuitubun berumur tujuh tahun, ibunya meninggal dunia.

Karel Sadsuitubun mempunyai saudara tiga orang, yang seorang laki-laki bernama Efraim Sadsuitubun, kini masih hidup dan berada di Negeri Belanda (eks *KNIL*) dan dua orang wanita kini masih hidup dan kedua-duanya berdiam di Debut, Maluku Tenggara, yaitu Nyonya Oh Suiwutun Sadsuitubun (dikenal dengan panggilan *Nyora*) dan Nyonya Magdalena Ohuiwutun/Sadsuitubun (dikenal dengan panggilan *Mada*). Setelah Mada lahir tak berapa lama keempat orang saudara bersaudara ini meninggal dunia.

Untuk menjaga serta memelihara Karel Sadsuitubun dengan saudara-saudaranya ini, ayahnya terpaksa menikah lagi dengan seorang janda yang bernama Nyonya Fransina Letsoin Ohuiwutun. Fransina Ohuiwutun menikah pertama kali dengan Alfons Letsoin memperoleh anak sebanyak tujuh orang yang masing-masing adalah sebagai berikut :

1. Cornelis Letsoin, kini berdiam di Debut ;
2. Cyrulus Letsoin, pensiunan AURI ini berdiam di Debut ;
3. Florida Letsoin, sekarang berdiam di Debut ;
4. Candida Letsoin, berada di Merauke Irian Jaya ;
5. Dedinus Letsoin, kini berdiam di Langgur (Maluku Tenggara) ;
6. Oni bin Alfous Letsoin, berdiam di Ambon dan bekerja pada Kantor Universitas Pattimura di Ambon ;
7. Rosalina Letsoin, telah meninggal (25).

Setelah Alsoin Letsoin meninggal, dan kebetulan pula ibunya Karel Sadsuitubun juga meninggal, maka ayah Karel Sadsuitubun menikah dengan Fransina Ohuiwutun (janda Letsoin). Karena Primus Sadsuitubun dari Desa Rumadian menikah dengan Fransina Ohuiwutun dari Desa Debut, maka untuk mempersatukan seluruh kehidupan keluarganya terpaksa ia harus pindah bersama keempat orang putranya mengikuti istri kedua dengan tujuh orang anaknya di Desa Debut. Kebetulan juga Desa Debut ini terletak bersambung dengan Rumadian saja. Jadi Karel Sadsuitubun bersama-sama saudaranya yang tadinya lahir dan berdiam di Rumadian kini beralih tempat tinggalnya ke Desa Debut mengikuti ayahnya.

Di Desa Debut Karel Sadsuitubun bersama sepuluh orang saudaranya hidup rukun, aman dan damai di bawah asuhan ayah dan ibu mereka, walaupun mereka terdiri atas dua keluarga, yaitu keluarga Sadsuitubun dan keluarga Letsoin. Berkat lindungan Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang, meskipun banyak kesulitan/kesukaran, Primus Sadsuitubun bersama istrinya yang kedua hidup dengan tentram.

Begitu mesra dan akrab hidupnya kedua orang tua Karel Sadsuitubun ini sehingga memberi teladan kepada 11 orang putra-putrinya untuk hidup saling mengasihi, saling menghormati dan takut akan Allah. Mereka sangat rukun dan merasakan seperti

mempunyai satu ayah dan ibu saja, demikian keterangan saudara Ony bin Letsoin kepada penulis di Ambon pada tanggal 30 Juli 1979.

Mereka tidak pernah merasakan perbedaan-perbedaan atau ke-lainan-kelainan di dalam pembinaan ayah dan ibunya mereka. Dan tidak pernah ada di antaranya mereka yang merasa seolah-olah hidup dengan ayah maupun ibu tiri. Keluarga ini benar-benar merupakan suatu keluarga yang takut akan Tuhan dan benar-benar hidup menurut firman dan aturan-aturan gerejani. Sejak kecil Karel Sadsuitubun telah memperlihatkan tanda-tanda kecerdasan dan ketangkasan melebihi saudara-saudaranya yang lain. Ia selalu patuh kepada orang tua, bersikap diam, jujur dan rendah hati. Taat kepada agama Kristen-Katolik, selalu senang ke gereja mengikuti jejak orang tuanya. Lebih senang dididik oleh orang Indonesia daripada pastur Belanda. Sejak kecil Karel Sadsuitubun senang sekali berolah raga, bermain bola, kasti, volley, lempar lembing, cakram dan sebagainya. Ia suka bergaul dengan teman-teman di Rumadian maupun di Debut.

Senang berburu binatang-binatang liar di hutan Debut Rumadian, menembak burung dengan alat-alat penembak yang tradisional (kayu, batu, katapel). Selain itu senang sekali *hohate*, mengail/memancing ikan, dan berburu. Menebang kayu, memacul tanah, menanam dan sebagainya merupakan pekerjaan biasa sehari-hari padanya, sehingga tubuhnya selalu sehat, kuat dan kekar.

Ia juga mempunyai bakat seni, gemar sekali menyanyi dan selalu gembira dengan kawan-kawan seusianya, memetik gitar (juk, okulele), menari dan berdansa. Ia sangat peramah dan pemurah hati, pendiam tapi kemauannya keras. Berbudhi luhur penuh sopan santun, suka malu tapi tidak senang diganggu.

Ia juga memiliki sikap militan, rajin dan bekerja keras. Ia senang sekali bergaul dengan teman-teman dari umat Islam dan mengikuti jejak orang tuanya dalam rangka kerukunan umat beragama di Desa Debut sejak dahulu kala. Perlu dikemukakan juga di Desa Debut ini ada gereja dan ada pula Mesjid. Rakyat sekitar 2500 orang, 300 orang beragama Islam dan 2200 orang beragama Kristen-Katolik.

Karel Sadsuitubun dibesarkan di tengah-tengah masyarakat dan lingkungan kerukunan hidup beragama sejak datuk-datuknya.

Ia bersekolah pada SD Kristen Katolik sejak tahun 1935 dan menamatkannya pada tahun 1941. Jarak dari Tual ke Debut kurang lebih 12 km, dapat ditempuh dengan mobil (kendaraan), telah diaspal secara baik oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II waktu itu Drs. DC. Far-Far.

Oleh karena jarak Debut—Tual itu sangat dekat, maka Karel Sadsuitubun sering bersama orang tuanya maupun teman-teman sebayanya pergi ke ibu kota Daerah Tingkat II Maluku Tenggara (Tual) ini, untuk melihat-lihat perkembangan baru, berbelanja, menonton permainan bola ataupun keramaian di ibu kota Tual. Di antara teman-teman dekatnya yang masih hidup ada dua orang yaitu Benedictus Ohuiwutun dan Hipolitus Tamlean, sedangkan yang telah meninggal Letsoin Ferdinand. Di atas telah dikatakan bahwa Rumadian dan Debut merupakan dua buah desa yang letaknya berdekatan/bersambung, sehingga hampir tidak kelihatan batas-batas kedua negeri itu. Namun desa Rumadian agak besar jika dibandingkan dengan desa Debut.

Rumadian diperintah oleh seorang *raja* (lurah), yang mengkoordinasi pemerintah-pemerintah Desa Debut, Namar, Ngilogaf, Ngayub, Kolser, Lokon, Gelanit. Desa Debut diperintah oleh seorang *Orang Kaya (Raja Kecil)*. Derajat kepangkatan Orang Kaya lebih kecil dari *Patih*. Struktur pemerintahan desa di Rumadian maupun Debut hampir sama saja dengan struktur Pemerintahan desa di daerah Maluku Tengah, yaitu :

1. Raja diangkat selaku kepala pemerintahan tertinggi di desa.
2. Kemudian di bawah raja ada *kepala-kepala soa (wijkmeester)* atau rukun warga-rukun warga.
3. Di bawah raja dan kepala-kepala soa ada sairi raja patih.
4. *Marinyo* atau pesuruh/pelayan dari raja, kepala soa ataupun saniri raja patih.
5. *Kewang* atau *kewano* adalah polisi desa untuk mengontrol, menjaga serta memelihara batas-batas tanah, air (lautan) dengan segala isinya demi kesuburan dan kemakmuran negeri/desa tersebut.

Kemudian ada satu Badan Legislatif tersendiri yang tertinggi sekali kedudukannya untuk membuat keputusan-keputusan/peraturan-peraturan sebelum dilaksanakan oleh rakyat desa adalah sema-

cam DPR/MPR yaitu *Saniri Besar* yang terdiri atas butir 1 sampai dengan 5 ditambah pula dengan tokoh-tokoh masyarakat dan rakyat sendiri.

Hasil-hasil yang dapat diperoleh di Rumadian/Debut (desa kelahiran) Karel Sadsuitubun ini adalah kopra, kacang tanah, bawang merah, kopi, singkong (ubi kayu). Selain itu hasil laut yaitu ikan, lola, teripang dan kulit siput. Desa Rumadian/Debut ini juga menghasilkan buah-buahan segar, seperti mangga, jambu, kedondong, jeruk makan, jeruk manis. Makanan pokok dari sebagian besar rakyat di Maluku Tenggara adalah sagu singkong (sagu yang dibuat dari tepung singkong). Di Maluku Tenggara disebut *embal*. Di samping itu mereka juga makan jagung, kacang hijau. Sebelum Proklamasi Kemerdekaan, nasi merupakan makanan tambahan saja bagi rakyat di daerah ini. Sekarang keperluan beras bagi rakyat Maluku Tenggara sangat meningkat, karena sebagian besar masyarakat sudah kecantol makan nasi. Namun *embal* masih tetap menjadi makanan pokok bagi rakyat Maluku Tenggara termasuk Desa Rumadian/Debut.

Sumber air minum diperoleh dari air sumur. Belum ada air ledeng di Rumadian/Debut ini. Sekarang baru ada usaha pemerintah untuk mendatangkan pipa-pipa ledeng guna mengalirkan air dari Desa Ewu ke Tual dan sekitarnya. Sewaktu Karel Sadsuitubun masih kecil, di Desa Rumadian/Debut ini adat-istiadat masih kuat dipertahankan. Sekarang sudah agak berkurang, kecuali pada adat-adat rumah tangga, perkawinan yang prinsip saja.

Mengenai perbedaan kasta/kelas-kelas di masyarakat Rumadian/Debut sudah tidak ada lagi. Menurut keterangan Ony bin Alfous Letsoin, penggunaan kasta di Maluku Tenggara tidak seperti dahulu lagi, sekarang berkurang. Kecuali di Pulau Kei Besar, penggunaan kasta masih berlaku dan masih kuat sekali peranannya di tengah-tengah masyarakat. Di Kei Kecil (Rumadian/Debut) penggunaan kasta sudah lama dihapus sejalan dengan perkembangan agama (Islam) dan Roma Katolik di sana. (25).

Mengenai *harta kawin* (mas kawin) masih berlaku di Rumadian/Debut. Kalau zaman dahulu harta kawin itu masih mahal sekali yaitu keluarga pria harus membayar pada keluarga wanita berupa *mas tulen* sekian gram, *lela* (meriam kuno), dan *gong, sopi* (arak) dan rokok. Kini harta kawin itu agak diperlunak ialah

atas mufakat bersama antara dua keluarga dapat dibayar dengan sejumlah uang.

Untuk mendatangkan kesejahteraan/kemakmuran bagi rakyat Rumadian/Debut, di sana masih berlaku *sasi* yang sama dengan desa-desa di daerah Maluku Tengah. *Sasi* adalah larangan (tabu) untuk mengambil buah-buahan tertentu ataupun hasil laut tertentu dalam jangka waktu tertentu sesuai hasil keputusan Saniri Besar dan Majelis Gereja. Ada dua macam sasi, yaitu: Sasi Adat dan Sasi Gereja.

Dari sini para pelajar melanjutkan pelajarannya ke SMA Negeri ataupun SPG Negeri Tual atau pula melanjutkan pelajarannya ke kota Ambon. Selain Karel Sadsuitubun ini kita ketahui, patut pula dicatat, bahwa ayah beliau mempunyai dua orang saudara laki-laki yang satu telah meninggal dan yang satu lagi bernama Damaskus Sadsuitubun ini berdiam di Rumadian, pernah masuk tentara KNIL, mendapatkan latihan-latihan militer di Jawa dan kemudian oleh Belanda dikirim pulang tanpa alasan sebab-sebabnya diberhentikan, dan tidak diberi pensiun.

Melihat kenyataan ini Karel Sadsuitubun sangat marah terlebih ia sangat anti terhadap penjajahan Belanda sejak masa kecilnya. Dan kira-kira kejadian inilah merupakan salah satu faktor yang mendorong Karel Sadsuitubun memasuki dinas Angkatan Kepolisian Republik Indonesia pada tahun 1951 itu. Di Sekolah Polisi Negara di Ambon selama enam bulan, kemudian Megamen-dung pada SMPB tiga bulan. Pada tahun 1954 mulai mengikuti Pendidikan dan Latihan Penyegaran I dan II di Kedunghalang Bogor masing-masing 1 dan 1½ bulan.

3.2 *Kehidupan Keluarga*

Sebagai seorang manusia yang telah dikodratkan Illahi untuk hidup, tentu pada ketikanya Karel Sadsuitubun harus menikah (membentuk rumah tangga ataupun keluarganya). Nyonya MargarithaWaginah Sadsuitubun istrinya menceritakan kepada penulis bahwa pemuda jantan kelahiran Maluku ini kebetulan bertugas di Ciputat, Jakarta bertemu dengan gadis Margaritha Waginah kelahiran Kaparan/Klaten Wedi (Jawa Tengah) tanggal 19 Juli 1939. Pada pertemuan pertama kalinya gadis Waginah sangat takut melihat wajah Karel Sadsuitubun. (29). Apalagi waktu Waginah men-

dengar asalnya dari Maluku (Ambon), terasa seram juga bagi Waginah. Tetapi lama-kelamaan sesudah mereka bergaul, bersemilah rasa cinta yang mendalam di lubuk hati masing-masing. Karel sangat cinta kepadanya, kata Ny. Waginah sambil keluar-keluar air mata. Pergaulan terpadu dengan ikrar sehidup-semati, menyebabkan Waginah merasa pemuda Maluku jantung hatinya ini tidak seangker apa yang mulanya dipikirkan. Malah sekarang timbul citra bahwa pemuda Maluku itu manis budinya, jantan dan perwira serta berani bertanggung jawab.

Pergaulan yang berlandaskan cinta abadi yang berseri dan bersemi di dalam hati sanubari kedua pemuda/pemudi dilanjutkan dengan suatu pernikahan, di mana kedua remaja ini mengakhiri masa bujangannya dan memasuki suatu bahtera kehidupan rumah tangga.

Dalam rumah tangga mereka tidak pernah Karel Sadsuitubun marah pada istrinya. Kalau toh marah dengan cara nasihat ataupun dengan jalan berkelakar. Dan hal ini bisa terjadi hanya kalau Nyonya Waginah pergi ke pasar, lupa membelikan jengkol makanan kecintaannya. Biarpun tak ada ikan, asal saja ada jengkol ia senang sekali. Selain itu Karel Sadsuitubun senang makan makanan lalap-lalap dari sayur dan daun-daun mentah, toge, colo-colo terong mentah (asam cuka campur garam, kecap dan bawang merah diaduk dengan terong mentah) dan ikan bakar merupakan makanan tradisional rakyat Maluku.

Karel Sadsuitubun sangat cinta anak istrinya, setiap waktu terluang digunakan sungguh-sungguh untuk beristirahat dan bersantai dengan keluarganya. Kadang-kadang bermain-main (berolah raga dengan anak-anaknya, kadang-kadang juga memacul serta membersihkan pekarangan rumah serta menanam ketela pohon dan sayur-sayuran. Sebagai usaha halaman untuk membantu penghasilan serta dapat dinikmati oleh keluarganya. Sering pula ia pergi menembak burung ataupun memancing di kali (Bogor) sambil memanggul-manggul putranya yang dibawanya.

Walaupun ia begitu cinta kepada anak istrinya, namun bila ada perintah untuk segera berangkat dalam rangka tugas pengabdian kepada nusa, bangsa dan negara, ia selalu taat kepada perintah dan selalu siap untuk melaksanakan perintah itu dengan penuh rasa tanggung jawab selaku seorang prajurit yang selalu tunduk

dan patuh pada Sumpah Prajurit dan Sapta Marga Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Karena itu tidak dapat disangkal selama hidupnya bersama anak istrinya, ia sering meninggalkan keluarganya sampai berbulan-bulan tidak pulang oleh karena pelaksanaan tugas selaku seorang prajurit (bhayangkara negara) yang setia terhadap panggilan tugas pengabdian bagi negara di atas landasan takut akan Allah dan hormat kepada atasan/pimpinan.

Dalam kariernya sebagai anggota kepolisian (Brigade Mobile) ia pernah tugas di Ambon, Sulawesi, Sumatra, Jakarta, dan perbatasan Irian Jaya. Bertugas di Ambon (Tantui) hanya beberapa bulan saja, kemudian mengikuti pendidikan kepolisian pada SPN (Sekolah Polisi Negara) di Ambon. Tepat enam bulan dipindahkan ke Jawa. Tanggal 11 Desember 1954 ia mengikuti Sekolah Polisi Mobile Brigade (SPMB) di Megamendung selama tiga bulan. Kemudian mengikuti Latihan Penyegaran I selama satu bulan di Kedunghalang Bogor terhitung mulai tanggal 30 Oktober 1961 dan Latihan Penyegaran II bertempat juga di Kedunghalang Bogor selama 1½ bulan terhitung mulai tanggal 15 Juli 1963.

Bertugas di Ambon dalam rangka menumpas sisa-sisa pembontakan RMS. Dua kali ditugaskan di Sumatra Utara (Aceh) dalam rangka penumpasan DI/TII di bawah pimpinan Daud Beureueh di Aceh. Kemudian ditugaskan di Sulawesi dalam rangka penumpasan DI/TII Pimpinan Kahar Muzakar di Makasar. Dua kali ditugaskan pada Kesatuan Gabungan Mobile Brigade di Sumatra Barat dalam rangka penumpasan PRRI/Permesta.

Kemudian ditugaskan lagi 10 bulan di perbatasan Maluku-Irian Barat (Trihora) dalam rangka pembebasan/pengembalian Irian Barat kepada Negara Republik Indonesia. Dalam pelaksanaan operasi-operasi militer juga ditugaskan di Jakarta dalam rangka pengamanan serta menyukseskan Ganefo I. Terakhir ditugaskan selaku pengawal rumah kediaman Waperdam II Dr. J. Leimena di Jalan Teuku Umar Jakarta. Di sinilah Karel Sadsuitubun gugur akibat kekejaman gerombolan Gerakan 30 September/PKI tanggal 30 September malam menjelang subuh tanggal 1 Oktober 1965.

Selama kariernya di Brigade Mobile/Angkatan Kepolisian Republik Indonesia ia memperoleh empat kali kenaikan pangkat

dan terakhir kenaikan pangkat anumerta serta tujuh kali kenaikan gaji berkala. Tanda-tanda jasa yang diperoleh adalah :

1. Gom III, V, dan VII ;
2. Trikora ;
3. Op Sapt a Marga ;
4. Panca Warna, dan
5. Bintang Republik Kelas II dengan Gelar Pahlawan Revolusi.

Ketangkasan/keahlian/pujian yang diperoleh adalah dalam rangka tugas operasi Sumatra Barat dan pengamanan Ganefo I di Jakarta. Dalam riwayat pekerjaannya tampak secara jelas uraian kariernya mulai dari awal sampai dengan saat-saat akhir dalam dinas sebagai seorang prajurit ABRI khususnya selaku seorang anggota Angkatan Kepolisian Republik Indonesia.

3.3 *Kepribadian Karel Sadsuitubun*

Seperti telah dikemukakan di atas bahwa Karel Sadsuitubun sejak masa kecilnya merupakan seorang anak yang taat kepada agama Katolik dan setia melaksanakan ibadah dan tunduk pada sakramen-sakramennya. Ia sejak kecil telah memiliki kecerdasan dan ketangkasan melebihi saudara-saudaranya, namun ia adalah seorang anak yang selalu takut akan Tuhan dan menghormati raja. Ia sangat patuh kepada orang tuanya, cinta kepada sanak saudaranya, teristimewa cinta kepada istri dan anak-anaknya.

Tetapi di atas semuanya ini ia cinta terhadap panggilan tugas pengabdian kepada negara. Karel Sadsuitubun gemar sekali berolah raga, berburu, memancing dan bercocok tanam. Sejak kecil sudah memiliki peranan anti terhadap penjajahan Belanda (tidak senang kepada pastor Belanda, lebih senang pastor Indonesia). Dalam banyak segi kehidupan Karel Sadsuitubun tampak jelas sikap patriotisme dan idealisme. Hal ini terlihat pada saat berangsur-angsur menjadi dewasa cita-citanya untuk menjadi seorang anggota polisi.

Selaku seorang umat Kristen-Katolik yang taat dan patuh pada agamanya, di samping sebagai seorang anak piatu yang ditinggal ibunya sejak umur tujuh tahun, ia senantiasa rendah hati, sayang kepada seluruh saudara, teman dan handai taulan. Ia tidak suka melihat tindakan kekerasan atau penekanan. Itulah sebabnya sejak masa kecilnya ia sudah anti Belanda, karena ia pernah melihat/menyaksikan sendiri bagaimana sikap kekerasan Belanda

terhadap rakyat Maluku Tenggara di ibukota Tual dan sekitarnya. Bahkan rakyat Maluku Tenggara ini banyak diperlakukan sewenang-wenang oleh Belanda, sehingga boleh dikatakan harga diri/martabat rakyat di sana sebagai manusia itu tidak ada/hilang sama sekali. (25,27)

Hal ini jelas terbukti sejak zaman VOC masyarakat Maluku Tenggara ini banyak diperlukan sebagai budak-budak Belanda. Diangkut dengan kapal-kapal Belanda dipekerjakan di Ambon, Sulawesi dan sebagian dibawa ke pulau Jawa khususnya Batavia (Jakarta) untuk kepentingan Belanda. Derajat manusiawi masyarakat Maluku Tenggara ini tidak ada dalam pemikiran Belanda. Karena itu Karel Sadsuitubun ingin membebaskan suku bangsanya itu dari penderitaan dan tekanan serta sikap-sikap yang tidak adil. Ia menginginkan kehidupan masyarakat yang rukun dan damai, sebagaimana ia alami dalam pemeliharaan ayah dan ibunya. Selaku seorang yang beragama Kristen-Katolik yang taat kepada sakramen-sakramen gereja, ia juga menginginkan tegaknya hukum dan keadilan, berani membela kebenaran, mengasihi sesama manusia terutama mengasihi akan Allah.

Sikap-sikap satria dan militan memang telah dimiliki sejak masa kecilnya, karena itu begitu pada suatu ketika ia bersama kawan-kawannya sedang berjalan-jalan di ibukota Tual terbetik berita bahwa sementara dibuka kesempatan bagi pemuda-pemuda untuk memasuki Angkatan Kepolisian, secara spontan ia langsung mendatangi Kantor Polisi di Tual dan mendaftarkan diri. Setelah kembali ke Debut terus dilaporkan kepada ayahnya Primus Sadsuitubun dan semua saudara-saudaranya.

Secara ikhlas ayahnya menyetujui tindakan Karel Sadsuitubun memasuki Dinas Kepolisian. Sikap taat dan setia serta menghormati kepada orang tua dan selalu bertanggung jawab dalam segala tindakannya merupakan modal dasar kepribadian dan wataknya terbawa terus sampai pada pelaksanaan tugas-tugasnya di dalam Angkatan Kepolisian.

Walaupun ia begitu sayang kepada orang tua dan sanak saudaranya tugas pengabdian kepada negara dianggap lebih penting daripada keluarganya. Begitu pula di atas telah penulis kemukakan bahwa ia sangat cinta kepada istri dan anak-anaknya. Setiap waktu

terluang digunakannya untuk *relaks* dengan keluarganya ataupun memacul kebun, bercocok tanam untuk kepentingan keluarganya di sekitar rumah kediamannya. Walaupun ia begitu cinta kepada keluarganya, namun jika ada perintah komandannya untuk segera berangkat karena tugas negara memanggil, ia senantiasa melaksanakannya dengan penuh rasa tanggung jawab yang dilandasi jiwa militansi berdasarkan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

Oleh karena itu ia seringkali meninggalkan anak istrinya demi kepentingan tugas. Menurut keterangan Ny. Waginah, kadangkala kadang suaminya pergi meninggalkan istri dan anak-anaknya sampai berbulan-bulan bertugas ke luar Jawa. Misalnya pada saat melaksanakan operasi militer yang bersifat operasi gabungan antara lain operasi gabungan terhadap PRRI/Permesta di Sumatra Barat, operasi gabungan terhadap Trikora di perbatasan Maluku Irian Barat (Irian Jaya).

Di dalam pelaksanaan tugas, Karel Sadsuitubun terkenal sebagai seorang prajurit Brigade Mobile yang berani dan selalu berada di front terdepan. Karena itu tidaklah heran jika pada saat tanggal 22 Mei 1960 Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal AH. Nasution memberikan penghargaan kepadanya dengan kawan-kawannya dari Korps Brigade Mobile 5130 Komandan cabang II dengan Surat Penghargaan No. 03601, sebagai penghargaan atas sikap keistimewaan yang telah dibuktikan dalam menjalankan kewajiban selaku Kesatuan Angkatan Perang Republik Indonesia dalam kejadian pada tanggal 7 Desember 1959 s.d. 22 Mei 1960 di Kodam III/17 Agustus.

Ia seorang yang berkemauan keras, penuh disiplin, taat kepada atasan istimewa kepada tugas negara selaku prajurit ABRI maupun selaku alat negara. Watak dan kepribadian Karel Sadsuitubun yang perwira dan satria nampak jelas sampai pada saat-saat akhir hidupnya di mana istrinya telah menyarankan jangan ia pergi bertugas lagi karena hari sudah terlalu siang. Karel Sadsuitubun dengan tegas dan berkeras hati untuk tetap berangkat ke tempat tugas pengawalan Wakil Perdana Menteri II Dr. J. Leimena, walaupun kesiangannya bagaimanapun. (15, p.345)

Dari kalimat-kalimat yang diucapkan Karel Sadsuitubun terhadap istri tercinta Ny. Margaritha Waginah Sadsuitubun sebelum keberangkatan terakhir ke tempat tugasnya dapatlah ditarik ke-

simpulan bahwa ia seorang yang berwatak dan berkepribadian keras, berwibawa, setia kepada pimpinan, cinta dan taat kepada tugas dan tanggung jawab, penuh dedikasi, jujur dan bermoral prajurit sejati.

Demikianlah secara umum penulis gambarkan tentang kelahiran, kehidupan keluarga dan kepribadian Karel Sadsuitubun yang telah diakui seluruh bangsa Indonesia secara resmi sebagai Pahlawan Revolusi.

3.4 *Karel Sadsuitubun Memasuki Dinas Angkatan Kepolisian Republik Indonesia*

3.4.1 *Perkembangan Karier di Maluku*

Tanggal kepastian mengenai kapan Karel Sadsuitubun mulai mendaftarkan diri sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia di Tual itu kurang jelas. Dari saudaranya, Ony bin Alfons Letsoin, didapatkan keterangan bahwa pada suatu hari ketika Karel Sadsuitubun sedang berjalan-jalan dengan teman-temannya di Kota Tual terdengar berita bahwa pemerintah memberikan kesempatan kepada para pemuda untuk memasuki Dinas Angkatan Kepolisian.

Secara spontan ia terus mendaftarkan diri sebagai calon anggota Angkatan Kepolisian Republik Indonesia. Kemudian ia pulang ke Debut bertemu orang tua dan sanak saudaranya serta memberitahukan bahwa ia telah mendaftarkan diri sebagai calon anggota Angkatan Kepolisian di Kota Tual. Pada mulanya orang tua dan sanak saudaranya terharu mendengar berita itu. Mereka sangat sayang kepadanya, mulanya mereka berat sekali untuk melepaskannya. Tetapi karena hal ini sudah merupakan suatu tekad dari Karel Sadsuitubun yang sudah tidak bisa dielakkan lagi, maka melalui pertimbangan-pertimbangan yang mantap, akhirnya orang tuanya dengan ikhlas menyetujui sikap dan tindakan yang telah diambil oleh anaknya itu.

Tibalah saatnya di mana Karel Sadsuitubun dipanggil untuk mengikuti latihan-latihan kepolisian di Ambon. Karel Sadsuitubun dengan dilepaskan oleh kedua orang tua dan sanak saudaranya berangkat meninggalkan kampung halaman, teman dan handai taulan menuju ke Kota Tual. Dengan menumpang kapal laut, Karel Sadsuitubun meninggalkan Tual menuju Ambon. Tiba di Ambon ia segera melaporkan diri pada pemimpin Angkatan Kepolisian Daerah Dati I Maluku.

Kemudian pemimpin Angkatan Kepolisian Dati I Maluku memerintahkan untuk pemeriksaan kesehatan calon-calon Angkatan Kepolisian Republik Indonesia. Karel Sadsuitubun lulus dalam pemeriksaan kesehatan calon Angkatan Kepolisian Republik Indonesia, dan diizinkan untuk memasuki Dinas Angkatan Kepolisian Republik Indonesia selaku anggota Angkatan Kepolisian Republik Indonesia Daerah Tingkat I Maluku.

Dari uraian Surat-surat Keputusan Pimpinan Angkatan Kepolisian Republik Indonesia yang penulis sempat baca pada arsip-arsip surat-surat keputusan mengenai kariernya yang disimpan secara baik oleh istrinya Ny. Margaritha Waginah Sadsuitubun, yang terdapat pada Markas Besar Angkatan Kepolisian Republik Indonesia, tercatat bahwa Karel Sadsuitubun mulai masuk Dinas Angkatan Kepolisian RI dengan jalan mengikuti pendidikan calon agen polisi pada Sekolah Polisi Negara (SPN) di Ambon terhitung mulai tanggal 1 Agustus 1951 dengan dasar gaji/pokok sebesar Rp 82,50 masa kerja nihil (Lihat lampiran).

Dengan demikian jelaslah bahwa Karel Sadsuitubun memulai kariernya pada Dinas Angkatan Kepolisian Republik Indonesia pada tanggal 1 Agustus 1951 dengan tahun dinas nihil. Kemudian lulus Sekolah Calon Agen Polisi pada tanggal 1-2-1952 dan pada tanggal 9 Februari 1952 keluar Surat Keputusan Pimpinan Angkatan Kepolisian Propinsi Maluku Nomor 41/B/Propinsi Maluku terhitung mulai tanggal 1 Februari 1952, ia diangkat selaku Agen Polisi II pada Mobile Brigade di Ambon (Tantui) dengan gaji pokok Rp 97,50 setelah melalui pendidikan pada SPN Ambon selama enam bulan. Di Tantui ia mendapatkan pembinaan serta latihan-latihan Brigade Mobile demi memantapkan tugasnya selaku seorang anggota Brigade Mobile. Dari keterangan seorang kawannya anggota Brigade Mobile, menyatakan bahwa kurang lebih enam bulan mereka bersama-sama turut bertugas di Pulau Seram untuk menumpas sisa-sisa gerombolan RMS yang masih sering berkeliaran di hutan-hutan Seram dan mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

Sekembali dari tugasnya di Pulau Seram, maka tidak lama kemudian yaitu pada tanggal 23 September 1952 ia dipindahkan pada Kesatuan Mobile Brigade Dinas Keamanan Negara di Jakarta (Cilincing).

3.4.2 *Perkembangan Karier di Jawa*

Pada tanggal 1 September ia dinaikkan gajinya menjadi Rp 122,50, selaku anggota Brigade Mobile di Cilincing, Jakarta. Kemudian setelah ia melaksanakan tugasnya dengan baik di Cilincing, Jakarta ini maka pada tanggal 30 April 1954 ia dinaikkan pangkatnya setingkat menjadi Agen Polisi Tk. I terhitung mulai tanggal 1 April 1954, dengan gaji pokok Rp 137,00. Dari Cilincing ia disekolahkan pada Sekolah Brigade Mobile SPN Cabang Megamendung terhitung mulai tanggal 3 November 1954 selama tiga bulan dengan dasar gaji tetap Rp 137,00.

3.4.3 *Perkembangan Karier di Sumatra*

Setelah lulus pendidikan tiga bulan ini, maka pada tanggal 18 Februari 1955 dengan dasar gaji pokok sama dengan di atas, ia diperbantukan untuk sementara selama tiga bulan kemudian diperpanjang lagi tiga bulan (menjadi enam bulan) pada Kantor Polisi Propinsi Sumatra Utara (Aceh waktu itu) terhitung tanggal 18 Mei 1955. Menurut istrinya, bahwa Karel Sadsuitubun pernah menceritakan tentang bagaimana tugasnya di Aceh ini dalam rangka menumpas sisa-sisa gerombolan DI/TII pimpinan Daud Beureueh yang masih ada dan berpengaruh.

Pada tanggal 30-8-1955 dengan Surat Keputusan No. 3841/4/55/UP, terhitung mulai tanggal 1 Februari 1955 (3 tahun masa dinas) dinaikkan gajinya menjadi Rp 142,50 gaji pokok. Kemudian Inpasing PGPN pada tahun 1955; maka dengan surat keputusan pimpinan Angkatan Kepolisian Republik Indonesia tanggal 12-8-1956 No. 4109/2/59/UP terhitung mulai tanggal 1 Oktober 1955 diinapkan dengan dasar gaji Rp 161,50 karena pada 1 Juni 1956 ia diangkat selaku pegawai negeri tetap dengan dasar gaji Rp 142,50 dalam masa dinas 4 tahun 4 bulan.

Kemudian terhitung tanggal 2 Juni 1956 ia diperbantukan lagi untuk sementara dalam waktu 3 bulan di Aceh dengan dasar gaji tetap Rp 161,50. Pada tanggal 1-2-1957 dinaikkan gajinya menjadi Rp 176,50 dalam masa kerja 5 tahun, dan pada tanggal 1-2-1958 mendapat kenaikan gaji pokok sebesar Rp 184,00 dalam masa dinas 6 tahun. Kemudian Karel Sadsuitubun dipindahkan dari perbantuan pada Kantor Polisi Sumatra Utara (Aceh) ke Ciputat, Jakarta. Dari Ciputat Jakarta ditugaskan pula untuk sementara ke Sulawesi.

3.4.4 *Perkembangan Karier di Sulawesi*

Dengan Surat Keputusan Pimpinan Angkatan Kepolisian Republik Indonesia tanggal 24-9-1958 Nomor 4851/7/58/UP terhitung mulai tanggal 23 Juli 1958 dengan dasar gaji Rp 184,00 Karel Sadsuitubun ditugaskan untuk sementara selama enam bulan di Sulawesi.

Menurut istrinya, ia juga pernah menceritakan bahwa tugas selama enam bulan di Sulawesi itu sebagai Pasukan Gabungan Brigade Mobile untuk menumpas sisa-sisa DI/TII pimpinan Kahar Muzakar di Sulawesi yang masih mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat di Sulawesi walaupun Kahar Muzakar telah tertembak mati.

Setelah selesai tugas di Sulawesi selama enam bulan, ia ditarik kembali ke Ciputat, Jakarta. Pada saat ini ia menikah dengan Ny. Margaritha Waginali tanggal 21-8-1959. Tidak lama ia dinaikkan pangkatnya menjadi Agen Polisi Kepala Tingkat I dengan Surat Keputusan Pimpinan Angkatan Kepolisian Republik Indonesia tanggal 7 September 1959 Nomor 3961/2/59/UP terhitung mulai tanggal 1-9-1959 dengan gaji pokok Rp 337,00.

3.4.5 *Penumpasan PRRI/Permesta*

Dengan Surat Keputusan Pimpinan Angkatan Kepolisian Republik Indonesia tanggal 12-3-1960 No. 869/7/60/UP terhitung mulai tanggal 2 November 1960 Karel Sadsuitubun ditugaskan untuk sementara dalam waktu 6 bulan di Sumatra Barat dengan dasar gaji pokok tetap Rp 337,00. Penugasan di Sumatra Barat ini adalah penugasan dalam rangka menumpas habis pemberontakan PRRI/Permesta.

Menurut data-data yang ada tertera pada riwayat hidup/riwayat pekerjaannya ternyata Karel Sadsuitubun termasuk salah seorang anggota Kompi Gabungan Brigade Mobile yang ditugaskan dalam Pasukan Tank Kompi C/1129 untuk menghancurkan pemberontakan PRRI/Permesta di Sumatra. Pasukan gabungan ini terjadi dari anggota Korps Brigade Mobile yang didatangkan dari Jakarta, Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Karel Sadsuitubun termasuk salah seorang anggota Brigade Mobile yang berani dan selalu berada di garis depan/di front ter-

depan, dan mendapatkan penghargaan dari Kepala Staf TNI (AD) secara kompi/kesatuan yang ditandatangani sendiri oleh Jenderal AH. Nasution, dan ketangkasan, keahlian/pujian yang dimilikinya yang diperoleh dari Pemerintah RI itu adalah atas jasa-jasanya pada Operasi Sumatra Barat yang tercatat secara resmi pada kartu pegawai Karel Sadsuitubun yang sampai saat ini tersimpan pada Markas Besar Angkatan Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta.

Terhitung mulai 1 Februari 1960 (genap 8 tahun masa kerjanya), ia diberikan kenaikan gaji menjadi Rp 367,00. Karena Operasi PRRI/Permesta di Sumatra Barat telah selesai, maka dengan Surat Keputusan tanggal 7-9-1960 Karel Sadsuitubun masih ditugaskan untuk sementara di Sumatra Barat selama 6 bulan lagi terhitung mulai tanggal 2 November 1960.

Sesudah selesai operasi di Sumatra Barat, ia ditarik kembali ke Ciputat Jakarta dan kemudian dipindahkan ke Kedunghalang, Bogor. Di Kesatuan Brigade Mobile Kedunghalang Bogor ini selama dua kali ia diberi kesempatan untuk mengikuti Latihan Penyerangan Brigade Mobile, yaitu:

- a. Pertama kali selama 1 bulan dan dinyatakan lulus pada tanggal 30 Oktober 1961 ;
- b. Kedua kali selama 1½ bulan dan dinyatakan lulus pada 15 Juli 1963. (Lihat lampiran)

Selama di Kedunghalang sesudah selesai operasi di Sumatra Barat ia diberikan kenaikan gaji berkala pada 1 Maret 1962 (10 tahun masa dinas) sebesar gaji pokok Rp 673,00.

3.4.6 *Trikora*

Pada masa Tri Komando Rakyat (Tri Komando) yaitu dalam rangka pembebasan Irian Barat (Irian Jaya sekarang), sesuai dengan perintah Presiden Republik Indonesia, maka dengan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia terhitung mulai tanggal 16 Maret 1963 Karel Sadsuitubun ditugaskan pada Tri Komando dalam waktu 10 bulan di perbatasan Irian Barat dengan gaji pokok Rp 673,00. Memang patut diakui bahwa pada saat pembebasan Irian Barat ini Brigade Mobile telah menunjukkan prestasinya yang besar dalam rangka membantu pemerintah di samping angkatan bersenjata lainnya, telah berhasil menumpas habis penjajah Belanda di atas muka bumi Indonesia.

Karel Sadsuitubun pada waktu itu ditugaskan selaku Pasukan/Kompi Gabungan Brigade Mobile dari Jakarta untuk membantu kesatuan-kesatuan Brigade Mobile di Maluku yang pada saat itu dikoordinasi oleh Komisaris Polisi VE. Karamoy, komandan Brigade Mobile Propinsi Maluku. Setelah selesai tugas Trikora dan Irian Barat berhasil dibebaskan dari tangan kolonialisme Belanda, maka Karel Sadsuitubun ditarik kembali ke Jakarta (Kedunghalang, Bogor) dengan diberikan kenaikan pangkat setingkat menjadi brigadir polisi terhitung mulai 1 November 1963 dengan gaji pokok Rp 739,50 sesuai Surat Keputusan Pimpinan Angkatan Kepolisian RI tanggal 25 November 1963 No. 1231/2/b/III/63.

3.4.7 *Tugas Pengawasan Wakil Perdana Menteri II Dr. Johannes Leimena*

Setelah selesai tugas Trikora, maka Karel Sadsuitubun kembali ke induk pasukannya di Kedunghalang, Bogor. Di sini ia ditugaskan sebagai anggota Pengawal Wakil Perdana Menteri II Republik Indonesia Dr. J. Leimena.

Pada tanggal 14 Agustus 1965 ia diberikan kenaikan gaji berkala menjadi Rp 798,00 terhitung mulai tanggal 1-2-1965 (10 tahun dinas). Dalam rangka pengawasan Waperdam II Republik Indonesia ini maka pada tanggal 1 Oktober 1965 dini hari (subuh) ia telah berjuang melawan sepasukan grombolan Gerakan 30 September/PKI, di mana ia telah berhasil menembak mati salah seorang di antara kaum pembontak, walaupun ia sendiri juga telah tertembak dan menghembuskan nafas terakhir di tempat tugas pengabdiannya sebagai Patriot Sejati Bhayangkara Negara. (30)

Dengan sikap patriotisme dan idealisme selaku seorang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang telah banyak jasa-jasanya untuk bangsa dan negara, maka wajarlah ia diberikan kenaikan pangkat setingkat dan sesudah sepantasnya ia diberikan gelar Pahlawan Nasional/Pahlawan Revolusi.

Dengan demikian sangat bijaksanalah Presiden Republik Indonesia Panglima Tertinggi ABRI/Komando Operasi Tertinggi dengan surat Keputusan No. 114/Koti/1965 tanggal 5 Oktober 1965 menetapkan memberikan kenaikan pangkat Ajun Inspektur Polisi Tingkat II Anumerta dan gelar Pahlawan Revolusi kepada Brigadir

Polisi Karel Sadsuitubun yang telah gugur dalam peristiwa Gerakan 30 September, yang kini telah diakui oleh seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai ke Merauke termasuk Timor Timur.

BAB IV. GUGURNYA KAREL SADSUITUBUN AKIBAT G 30 S/PKI

4.1 *Tinjauan Sepintas G 30 S/PKI*

Gerakan ini adalah suatu gerakan yang dirancang, didalangi serta dijalankan oleh PKI untuk merebut kekuasaan di Indonesia. Menurut "*Buku Putih Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia*", terbitan KOPKAMTIB Jakarta 20 Mei 1978, dikatakan bahwa pada tengah malam tanggal 29 September 1965 setelah selesai rapat terakhir bersama Letnan Kolonel Untung dan Kolonel Latif es dalam rangka persiapan gerakan, pimpinan Biro Khusus Sentral PKI, Syam selaku pimpinan pelaksana G 30 S/PKI menemui DN. Aidit pimpinan tertinggi G 30 S/PKI untuk melaporkan secara terperinci seluruh persiapan gerakan di seluruh Indonesia. Di antaranya dilaporkan mengenai organisasi gerakan, nama gerakan, hari H, jam D, susunan revolusi di pusat, proses penyusunan Dewan Revolusi di daerah dan tentang Dewan Militer. Untuk itu pada kesempatan ini DN. Aidit telah mengadakan perubahan-perubahan. Semula gerakan itu direncanakan dengan nama Operasi TAKARI tetapi DN. Aidit mengubah dan menetapkan namanya GERAKAN 30 SEPTEMBER.

Pada waktu itu Syam dalam laporannya telah menambah keyakinan bahwa gerakan yang akan dilaksanakan itu akan berhasil. Persiapan-persiapan yang telah diatur secara mantap, penuh rhasia, dan tidak mungkin akan diketahui oleh pihak-pihak yang tidak

berkepentingan. Suasana di Lubang Buaya menjelang 30 September 1965 itu benar-benar sibuk. Kesibukan itu disebabkan karena pada tempat itu telah berdatangan pasukan-pasukan bersenjata antara lain dari anggota-anggota Brigif I Kodam V Jaya, sukarelawan dan sukarelawati yang berasal dari Pemuda Rakyat dan Gerwani yang dinamakan Sukta (Sukarelawan Takari). Juga dengan kedatangan kompi-kompi Yon 454/Diponegoro, Yon 530/Brawijaya, dan Resimen Cakrabirawa yang semuanya tergabung dalam divisi yang mereka namakan Divisi Ampera. Pimpinan tertinggi G 30 S/PKI ini dijabat oleh DN Aidit, ketua Central Komite Partai Komunis Indonesia.

Tempat yang mereka gunakan adalah rumah Sersan Udara S. Suwardi, terletak di dalam Kompleks Perumahan Pangkalan Udara Halim Perdanakusumah, berdekatan dengan Sentral Komando (Senko) II, Komando Operasi Angkatan Udara dan rumah Komodor Udara Susanto. DN Aidit dalam melakukan tugas pimpinan tertinggi G 30 S/PKI dibantu oleh Iskandar Subekti dan Pono sebagai penghubung dengan Senko, dan Kusno sebagai pengawal pribadi Aidit.

Mayor Udara Suyono bertindak selaku penghubung Senko dan KO OPS/Angkatan Udara di Pangkalan Udara Halim Perdanakusumah. DN Aidit menempati pos kedudukan ini sejak hari Kamis tanggal 30 September 1965 sekitar pukul 23.00 dengan diantarjemput oleh Mayor Udara Suyono. Sejak Aidit datang kira-kira pukul 03.00 tanggal 1 Oktober 1965 Aidit terus-menerus sibuk membuat konsep-konsep. Sekitar pukul 03.00 Aidit dan rombongan pergi ke ruang KO OPS/AU untuk membahas berbagai persoalan mengenai Gerakan 30 September dengan Menteri Pangab Omar Dhani, Brigjen Supardjo, Komodor Udara Susanto, dan Kolonel Udara Wisnu.

Selesai rapat seluruh peserta pergi ke rumah Komodor Udara Susanto, sedangkan Aidit pindah ke salah satu rumah dekat rumah Komodor Udara Susanto yang memang telah disiapkan untuknya dengan kawan-kawannya. Begitu selesai penculikan terhadap para jenderal pimpinan TNI AD, Aidit terus berangkat ke Lubang Buaya. Waktu didengar oleh Aidit bahwa Menteri Hankam/KSAB Jenderal AH Nasution lolos dari penculikan grom-

bulan G 30 S/PKI, ia memberitahukan supaya segera dicari, dan ditangkap hidup atau mati.

Selaku pimpinan tertinggi Gerakan 30 September PKI, Aidit selalu menerima laporan mengenai perkembangan gerakan tersebut dari pesuruh-pesuruhnya maupun lewat radio yang menghubungkan Senko-Senko OPS. AURI, Intel Pangkalan Halim dan sebagainya. Berdasarkan laporan-laporan yang diterima Aidit mengenai perkembangan gerakan, ia membuat keputusan-keputusan politis untuk diputuskan ke Senko-Senko agar segera dilaksanakan. Keputusan-keputusan yang dibuat G 30 S/PKI melalui Studio RRI Pusat pukul 07.00 pagi tanggal 1 Oktober 1965 tentang pembersihan dalam Angkatan Darat serta penyelamatan Pemimpin Besar Revolusi Presiden Sukarno.

1. Pengumuman Komandan G 30 S/PKI melalui Studio RRI Pusat pada pukul 08.00 pagi tanggal 1 Oktober 1965 sebagai ulangan pengumuman pertama (pukul 07.00 pagi)
2. Penyampaian saran kepada Presiden Sukarno melalui Brigjen Supardjo tentang penunjukan Menteri Panglima Angkatan Darat/Menpangab yang baru (sebagai pengganti almarhum Letjen A. Yani)
3. Pengumuman Dekrit No. 1 Keputusan No. 1 dan No. 2 G 30 S/PKI yang disiarkan pada pukul 13.00 tanggal 1 Oktober 1965
4. Pesan untuk melanjutkan perjuangan sesaat sebelum Aidit berangkat ke Yogyakarta, setelah menerima laporan tentang kegagalan G 30 S/PKI
5. Menerima saran Syam sebagai pemimpin pelaksana G 30 S/PKI untuk menyelamatkan diri Aidit ke Yogyakarta/Jawa Tengah dengan pesawat udara Dakota milik AURI, sambil meneruskan perjuangan. (10, p.121).

Kegiatan-kegiatan pimpinan pelaksana G 30 S/PKI di Sentral Komando I dan II dilaksanakan oleh Syam. Senko (Sentral Komando) adalah suatu tempat di mana Syam sebagai pimpinan pelaksana Gerakan 30 September melaksanakan tugas sesuai keputusan/ketentuan Ketua CC/PKI Pimpinan Tertinggi G 30 S/PKI DN. Aidit.

Pada waktu itu gedung PENAS (di Jalan Jakarta Baypass), digunakan untuk Senko yang diberi nama Senko I, Senko II di-

persiapkan oleh Mayor Udara Suyono sejak tahap persiapan gerakan sebagai cadangan, yaitu di dalam Kompleks Pangkalan Udara Halim Perdanakusumah berdekatan dengan tempat di mana DN. Aidit berada dan tidak jauh dari KO OPS/AURI dan rumah Komodor Udara Susanto.

Tempat-tempat ini diperlengkapi dengan hubungan radio satu dengan yang lain. Di Sentral Komando selain terdapat Syam, juga Pono selaku wakil pimpinan pelaksana gerakan, Brigjen Supardjo penghubung Senko dengan Presiden Sukarno, Kolonel Latif dan Letnan Kolonel Untung sebagai Komandan Gerakan Militer, Mayor Udara Suyono sebagai penghubung antara Senko I dan II, dan Letnan Kolonel Udara Heru Atmodjo.

Melalui Senko I dan II itulah para pimpinan pelaksana Gerakan 30 September itu mengatur serta melaksanakan perintah-perintah Pimpinan Tertinggi Gerakan 30 September PKI DN. Aidit. Komando gerakan militer mulai melaksanakan perintah-perintah penculikan para jenderal TNI AD pada tanggal 30 September malam menjelang dini hari tanggal 1 Oktober 1965, yaitu dimulai sekitar pukul 01.30 – pukul 05.00 pagi. Setelah penculikan dalam bentuk gerakan militer selesai dilaksanakan, hal ini segera dilaporkan kepada Ketua CCPKI DN. Aidit, pimpinan tertinggi G 30 S/PKI. (10, p.122)

Sesuai dengan keputusan pimpinan tertinggi G 30 S/PKI maka pukul 07.00 pagi tanggal 1 Oktober 1965 melalui Studio RRI Pusat disiarkan pengumuman pertama tentang penangkapan para jenderal. Sementara itu ketua CCPKI memutuskan untuk tetap mencari Jenderal AH. Nasution dan harus ditangkap hidup atau mati. Kolonel Latif telah mencari Jenderal AH. Nasution di RSPAD tetapi tidak berhasil.

Berdasarkan laporan dan permintaan Pasukan PKI Gatotkoco tentang apa yang mesti dibuat terhadap jenderal-jenderal yang telah diculik (ada yang masih hidup dan ada yang sudah meninggal) maka pimpinan G 30 S/PKI memutuskan agar jenderal-jenderal yang masih hidup itu segera dibunuh. Oleh karena Menteri Panglima Angkatan Darat (Men/Pangad) Jenderal A. Yani sudah meninggal, maka Senko memerintahkan Brigadir Jenderal Supardjo untuk menyusul presiden guna menetapkan Mayor Jenderal Roek-

man atau Mayor Jenderal Pranoto sebagai Menpangad yang baru.

Pada tanggal 1 Oktober 1965 sekitar pukul 09.15 itu juga Letnan Kolonel Untung telah menandatangani Dekrit No. 1 dan 2 Surat Keputusan, yaitu: Dekrit No. 1 menyangkut Dewan Revolusi sebagai sumber kekuasaan negara dan pendemisioneran Kabinet Dwikora (waktu itu). Keputusan No. 1 tentang pembentukan dan susunan Dewan Revolusioner Indonesia. Keputusan No. 2 tentang penurunan pangkat bagi kolonel ke atas menjadi letnan kolonel, dan kenaikan pangkat bagi mereka yang ikut aktif dalam Gerakan 30 September/PKI. Kekuatan militer utama dari Senko Pelaksana Gerakan 30 September ini adalah Yon 530/Brawijaya dan Batalyon 454 Diponegoro. Kemudian ternyata kedua batalyon ini segera bergabung dengan KOSTRAD (Komando Strategis Angkatan Darat) di bawah pimpinan *Mayor Jenderal Soeharto*. Maka Senko merasa kehilangan senjata yang paling ampuh, karena kedua batalyon di atas justru yang merupakan kekuatan utama harapan pimpinan tertinggi Gerakan 30 September PKI.

Senko I menjadi lumpuh, dan terhitung mulai tanggal 1 Oktober dipindahkan ke Senko Cadangan (Senko II) di rumah Sersan Udara Anis Suyatno di Kompleks Pangkalan Udara Halim Perdanakusumah. Brigjen Supardjo melaporkan pada Presiden Sukarno tentang hasil gerakan militer yang menculik para jenderal, dan pada siang hari Brigjen Supardjo kembali ke Senko dengan membawakan perintah Presiden Sukarno yang intinya agar jangan ada pertumpahan darah. (10, p.123)

Segera Senko melaksanakan diskusi tentang perintah presiden itu, selaku pimpinan pelaksana Gerakan 30 September, Syam berpendapat bahwa perintah Presiden Sukarno itu akan menimbulkan suasana keragu-raguan antara pimpinan gerakan, karena pasti timbul dua pendapat yang saling bertentangan antara yang menyetujui dan yang tidak. Juga perintah presiden itu tidak tepat, karena seharusnya juga ditujukan kepada KOSTRAD.

Karena tidak menguntungkan bagi Syam, maka G 30 S/PKI tidak mematuhi dan tidak melaksanakan perintah Presiden Sukarno tersebut. Sekitar pukul 18.00 tanggal 1 Oktober 1965 Senko menerima laporan bahwa pasukan-pasukan G 30 S/PKI lainnya telah mundur ke Pelabuhan Udara Halim Perdanakusumah yang memang sesuai rencana mereka semula ditetapkan sebagai daerah

pemunduran pertama.

Pada saat itu juga dilaporkan ke Senko bahwa KOSTRAD dan Resimen Komando Angkatan Darat (RPKAD) telah bergerak menyerang Pelabuhan Udara Halim Perdanakusumah. Laporan dan perkembangan terakhir ini menyebabkan pimpinan Senko mengadakan pembicaraan dan mengambil kesimpulan bahwa Gerakan 30 September telah gagal. Ditetapkan pula bahwa pimpinan gerakan dan pasukan-pasukan G 30 S/PKI akan mundur ke daerah pemunduran terakhir yaitu Pondok Gede. Dipertimbangkan pula keselamatan Aidit agar dia bisa terus memimpin partai dan melanjutkan perjuangan. Menurut Syam, kalau Aidit mundur bersama-sama mereka ke Pondok Gede akan berbahaya. Karena itu Syam mengemukakan pendapat agar DN. Aidit terbang ke Yogyakarta.

Selesai pembicaraan Syam dan Mayor Udara Suyono menemui Aidit, melaporkan kesimpulan-kesimpulan yang dicapai dalam pembicaraan oleh pemimpin pelaksana G 30 S/PKI itu. Berdasarkan laporan Syam, Aidit memerintahkan untuk tetap mengadakan perlawanan dan meneruskan perjuangan, dan sehubungan dengan itu supaya Syam memberitahukan kepada seluruh pimpinan G 30 S/PKI lainnya bahwa demi keselamatannya, Aidit perlu berangkat ke Yogyakarta agar dapat terus memimpin dan meneruskan perjuangan PKI dari Jawa Tengah.

Aidit berpendapat pula bahwa penyelesaian Gerakan 30 September PKI tidak menguntungkan PKI, dan karena itu ia sendiri langsung akan memimpin gerakan. Untuk keberangkatan Aidit ke Yogyakarta Syam memintakan Mayor Udara Suyono untuk mengusahakan fasilitas pesawat udara melalui Menpangau Omar Dhani. Mayor Udara Suyono berhasil mendapatkan fasilitas ini dan Aidit diterbangkan ke Yogyakarta tanggal 2 Oktober 1965 pukul 00.22 malam. Sebelumnya telah diadakan pembicaraan bahwa Syam akan memimpin diskusi tentang pemunduran pasukan-pasukan PKI ke Pondok Gede dari Pangkalan Udara Halim Perdanakusumah, untuk tetap mengadakan perlawanan terhadap pasukan-pasukan RPKAD.

Sebenarnya persiapan-persiapan pemunduran pasukan PKI sudah dimulai kira-kira pukul 18.00 tetapi nyatanya baru pukul 23.00 pasukan-pasukan itu secara bertahap mundur ke Pondok Gede. Sekembali Syam mengantar DN. Aidit menuju pesawat ter-

bang, kira-kira pukul 02.00 dini hari, ia bersama-sama Brigjen Supardjo meninggalkan Pangkalan Udara Halim Perdanakusumah menuju Pondok Gede dengan tujuan untuk mengatur taktik perlawanan seterusnya.

Pada tanggal 2 Oktober 1965 pukul 13.00 seluruh pimpinan G 30 S/PKI sadar dan tahu persis bahwa Gerakan 30 September telah gagal, karena tidak bisa bertahan apalagi menghadapi kekuatan RPKAD. Melihat kenyataan ini, pimpinan pelaksana Gerakan 30 September mengambil keputusan untuk menghentikan gerakan dengan jalan membubarkan pasukan-pasukan untuk seterusnya masing-masing melarikan diri.

Dengan hancurnya kekuatan pasukan militer G 30 S/PKI, para pimpinan pelaksana gerakan melarikan diri. Syam, Pono, Brigjen Supardjo meninggalkan Pondok Gede menuju rumah Pono guna menyelamatkan diri di daerah Kramat pada tanggal 2 Oktober 1965 sekitar pukul 13.00. Berdasarkan panggilan Soedisman, tanggal 3 Oktober 1965, Syam dan Pono menghadap Soedisman di Markas darurat CC PKI Kayu Awet untuk memberi penjelasan dan mempertanggungjawabkan sebab-sebab kegagalan Gerakan 30 September/PKI itu.

Tanggal 6 Oktober Syam bertemu dengan Waluyo, kurir DN. Aidit yang membawa perintah Aidit untuk meneruskan perjuangan sambil menyelamatkan diri. Atas perintah Syam, Pono bersama Waluyo supaya melaksanakan perintah DN. Aidit di daerah Jawa Tengah. Perjuangan selanjutnya di Jakarta diatur oleh Suyono Pradigdo, Hamim dan Harto Suwandi, sedangkan Syam sendiri akan ke Jawa Barat, walaupun mungkin baru pada tanggal 9 Oktober 1965.

Brigjen Supardjo berada di Jakarta dengan jalan berpindah-pindah tempat di sekitar rumah Pono di Kramat, dan kira-kira satu bulan ia ditempatkan di Tanjung Priok. Kolonel Latif dan Letkol Untung bersama-sama meninggalkan Pondok Gede tanggal 2 Oktober 1965 sekitar pukul 13.00, begitu pula Kapten Suradi menuju ke daerah selatan sampai di Cipayung.

Di Cipayung ia berusaha untuk menanamkan senjata-senjatanya pada tanggal 4 Oktober 1965 pukul 13.00. Kapten Suradi pindah ke Desa Kebon Nanas, daerah Bogor. Tanggal 5 Oktober

1965 ia kembali ke Jakarta untuk mencoba berhubungan dengan presiden lewat Brigjen Supardjo. Seluruh usahanya tidak berhasil. Maka pada tanggal 8 dan 9 Oktober 1965 ia menumpang menginap di rumah iparnya di Pejompongan, Jakarta.

Di sinilah ia ditangkap sesudah dua malam menginap. Sementara Kapten Suradi berada di Jakarta itu, ia sempat menulis surat kepada Mayor Jenderal Pranoto memohonkan perlindungan, kalau perlu dikirim ke luar negeri, tetapi gagal pula usahanya. Letkol Untung dan Kolonel Latif sejak tanggal 2 Oktober melarikan diri ke Cipayung, kemudian pindah ke Desa Kebon Nanas (Bogor) dan kembali lagi ke Jakarta tanggal 10 Oktober 1965.

Selama di Jakarta kedua orang ini selalu berpindah-pindah tempat antara lain Polonia, Jatinegara, Utan Kayu dan Pejompongan. Pernah juga kedua orang ini pergi ke rumah Syam untuk sama-sama membicarakan bagaimana meneruskan gerakan lanjut. Di rumah Syam masing-masing orang mendapat setengah juta rupiah untuk berangkat ke Jawa Tengah. Setiba di Tegal Untung ditangkap dan tanggal 13 Oktober 1965 diserahkan kepada polisi militer di Tegal untuk diusut dalam perkara pengkhianatan terhadap negara, nusa dan bangsa.

Letnan Kolonel Heru Atmodjo menghilang, dan pada tanggal 2 Oktober 1965 menumpang kereta api ke Surabaya dan terus ke Pangkalan Udara Iswahyudi pada tanggal 3 Oktober 1965. Selanjutnya menuju Biak (Irian Jaya) bersembunyi tanggal 5 Oktober 1965 di sana untuk menyelamatkan diri dari penangkapan. Mayor Udara Soeyono berada terus di Jakarta sejak tanggal 2 Oktober 1965, berputar-putar saja di rumahnya di Kramat Jati, di Kesatrian P3U, PU. Halim Perdanakusumah. Kemudian tanggal 5 Oktober 1965 terbang ke Biak dan bersembunyi di sana.

Dari *Buku Putih Gerakan 30 September/PKI*, terbitan KOP-KAMTIB Jakarta, 20 Mei 1978 itu secara jelas tercatat bahwa Gerakan Militer Pasukan G 30 S/PKI itu dimulai pada tanggal 30 September 1965 malam menjelang tanggal 1 Oktober pukul 01.30. Pada saat itulah Letnan Kolonel Untung bersama anggota Senko lainnya tiba di Lubang Buaya. Di sini ia memberikan briefing kepada semua komando pasukan PKI dan menginstruksikan agar segera menculik para jenderal, sesuai sasaran yang telah ditetapkan pimpinan pelaksana gerakan.

Pondok Gede dijadikan basis gerakan oleh Letkol Untung. Karena itu pasukan Pasopati yang dipimpin oleh Lettu Dul Arief segera mengumpulkan pasukannya mengikuti sasaran yang telah ditetapkan.

1. Pasukan yang ditugaskan untuk menculik Jenderal Nasution dipimpin oleh Pelda Djahurup dari Resimen Cakrabirawa yang terdiri dari satu regu batalyon kawal kehormatan, satu peleton Yon 530 Brawijaya, satu peleton Yon 454 Diponegoro, satu peleton Pasukan Gerak Cepat AURI, satu peleton Pasukan Pemuda Rakyat.
2. Pasukan yang ditugaskan menculik Letjen A. Yani dipimpin oleh Peltu Mukidjan dari Brigif I Kodam V/Jaya terdiri dari satu peleton Brigif I Kodam V/Jaya, satu regu Resimen Cakrabirawa, satu peleton Yon 530 Brawijaya, satu peleton Yon 454 Diponegoro, satu regu PGT AURI, dua regu sukarelawan Pemuda Rakyat.
3. Pasukan yang ditugaskan untuk menculik Mayor Jenderal Suprpto dipimpin oleh Sersan Kepala Sulaiman dari Resimen Cakrabirawa yang terdiri dari satu peleton Kawal Kehormatan yang dibagi atas dua bagian, yaitu satu regu I dipimpin oleh Sersan Kepala Sulaiman dan satu regu II dipimpin Sersan Dua Sukiman.
4. Pasukan yang ditugaskan untuk menculik Mayor Jenderal S. Parman dipimpin oleh Sersan Mayor Satari dari Resimen Cakrabirawa terdiri dari satu regu Yon Cakrabirawa, dua regu Yon Raiders 530 Brawijaya.
5. Pasukan yang ditugaskan untuk menculik Brigjen Sutoyo Siswomihardjo dipimpin oleh Sersan Mayor Surono dari Resimen Cakrabirawa terdiri dari satu regu I dipimpin Sersan Mayor Sudirjo, satu regu II dipimpin oleh Sersan Mayor Ngatidjo, dan satu regu III dipimpin oleh Kopral Dua Dasuki.
6. Pasukan PKI yang ditugaskan untuk menculik Brigjen DI Panjaitan dipimpin oleh Sersan Mayor Sukardjo dari Batalyon 454/Diponegoro dengan kekuatan kurang dari satu peleton. (10, p, 123-154)

Di atas telah diuraikan bahwa gerakan yang menculik Jenderal AH. Nasution dipimpin oleh Pelda Djahuru dari Resimen Cakrabirawa dengan berkekuatan pasukan satu kompi lebih. Mereka berangkat dari Lubang Buaya kira-kira pukul 03.00 pagi tanggal 1 Oktober 1965. Makin dekat dengan rumah Jenderal Nasution mereka terlebih dahulu berusaha melumpuhkan pengawal yang berada di tempat kediaman Dr. J. Leimena. Hal ini mengakibatkan gugurnya seorang anggota pengawal (Karel Sadsuitubun).

Setibanya mereka di rumah Jenderal Nasution, masuklah regu yang berasal dari Resimen Cakrabirawa langsung menuju ke kamar kerja Jenderal Nasution tersebut dan terus menghampiri kamar tidur Jenderal Nasution. Ibu Nasution mendengar keributan lalu membuka pintu kamar dan terlihat anggota Cakrabirawa dengan senjata otomatis di tangan. Melihat gelagat yang kurang baik ini, Ibu Nasution segera menutup pintu kamar, dan memberitahukan Pak Nasution, bahwa ada seorang berseragam yang mungkin bermaksud tidak baik. Pak Nasution kurang yakin terhadap keterangan Ibu lalu segera membuka pintu kamar. Begitu pintu dibuka, begitu pula anggota Cakrabirawa itu melepaskan tembakan ke arah Jenderal Nasution. Seketika itu juga Jenderal Nasution menjatuhkan diri ke lantai. Cepat-cepat Ibu Nasution menarik suaminya dan menutup pintu kamar. Tembakan terus diarahkan ke pintu kamar. Ibu Nasution segera mendorong Pak Nasution agar cepat menuju ke bagian belakang rumah. Sementara itu putri bungsu Pak Nasution yang bernama Irma Suryani (Ade) yang masih berumur lima tahun oleh pengasuhnya dilarikan ke luar kamar dengan tujuan hendak diselamatkan, tetapi seorang anggota Cakrabirawa yang lain segera menembak tanpa melihat terdahulu, sehingga menyebabkan peluru menembus punggung Irma Suryani.

Mendengar jeritan pengasuh anaknya, Pak Nasution ingin kembali untuk menolong pengasuh yang sedang menggendong anaknya itu, tetapi ia segera didorong Ibu Nasution untuk ke luar rumah menuju pagar tembok yang berbatasan dengan kediaman Dubes Irak yang menjadi tetangganya. Pak Nasution memanjat tembok di belakang itu dan menghilang di tengah-tengah kegelapan malam. Salah seorang Ajudan Jenderal Nasution, Letnan Satu Piere Tendean yang kebetulan pada saat itu menginap di paviliun mendengar keributan lalu terbangun.

Ia keluar dari kamar, dan segera ditangkap oleh gerombolan dikira Jenderal Nasution. Kemudian ia diseret ke salah satu kendaraan. Pasukan penculik ini kemudian meninggalkan tempat itu dan kembali ke Lubang Buaya. Keadaan serupa dilaksanakan pula di rumah Letnan Jenderal A. Yani, menteri panglima Angkatan Darat, dipimpin oleh Peltu Mukijan dari Brigif I Kodam V/Jaya. Begitu pula di rumah para jenderal yang lain sesuai rencana dan cara-cara yang berbeda-beda seperti yang telah diputuskan oleh pimpinan pelaksana Gerakan 30 September, terutama Pimpinan Gerakan Militer Letkol Untung dan Kolonel A. Latief. Setelah penculikan selesai, mereka langsung kembali ke basis mereka di Lubang Buaya dengan membawa para jenderal itu, ada yang sudah meninggal dan ada pula yang masih hidup. Pada waktu mereka datang untuk menculik Brigjen S. Panjaitan, karena terdengar keributan-keributan, Soekirman, seorang anggota polisi yang sedang melaksanakan tugas patroli, menghampiri rumah Brigjen Panjaitan dengan maksud mengontrol apa yang sedang diributkan itu.

Begitu ia tiba dekat rumah Brigjen Panjaitan, ia langsung ditangkap oleh para penculik dan diperintahkan ikut bersama-sama gerombolan ke Lubang Buaya. Agen Polisi Soekirman inilah kemudian yang dapat membantu TNI Angkatan Darat dalam hal ini KOSTRAD untuk menuju jalan dalam menemukan sumur tua tempat penyimpanan mayat para jenderal, korban penculikan yang setelah dianiaya, dibunuh dan dilemparkan ke dalamnya. Semua korban penculikan dibawa ke Lubang Buaya, Pondok Gede, dan diserahkan kepada Pasukan Gatotkaca. Letnan Satu Dul Arif, pimpinan pasukan Pasopati segera meninggalkan Lubang Buaya menuju ke Senko kira-kira pukul 06.30 pagi di Gedung PENAS untuk melaporkan hasil-hasil penculikan dan tentang lolosnya Jenderal AH. Nasution.

Hadir pada saat pelaporan Lettu Dul Arief, Letkol Untung, Letkol Udara Heru Atmodjo dan Mayor Udara Suyono. Begitu hebat strategi dari grombolan PKI ini untuk menduduki tempat-tempat penting di ibu kota negara ini dengan pasukan-pasukan yang telali diatur secara mantap, namun Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang tidak menghendaki tindakan yang tidak berperikemanusiaan itu.

Allah menggunakan seorang umatNya, ibarat Raja Sulaiman yang mendapat hikmat dan akal budi dari Tuhan Yang Maha Pencipta ialah Mayor Jenderal Soeharto (Panglima KOSTRAD). Di bawah kepemimpinan Mayor Jenderal Soeharto yang diridhoi dan dihikmati Allah Subhanahuwataala, Kostrad bersama-sama RPKAD dapat digerakkan oleh Pak Harto dengan cara-cara yang begitu halus serta tidak melalui pertumpahan darah sedikit pun, keamanan dan ketertiban setahap demi setahap dapat dipulihkan kembali, walaupun pada saat itu Mayor Jenderal Soeharto belum memegang kekuasaan, oleh karena Presiden Sukarno sebagai kepala negara masih berkuasa penuh. (10, p. 146-148)

Dengan demikian Pak Harto selalu berusaha berkonsultasi dengan Presiden Sukarno, namun dalam beberapa hal demi keselamatan negara dan Presiden Sukarno serta seluruh rakyat Indonesia, Mayor Jenderal Soeharto harus bertindak keras, karena Presiden Sukarno tidak mau membubarkan PKI dengan ormas-ormasnya.

Andaikata pada waktu itu Tuhan tidak meridhoi Mayor Jenderal Soeharto untuk memimpin negara dan bangsa ini, pasti negara dan bangsa ini telah ambruk akibat rongrongan dan penghianatan/penyelewengan Gerakan 30 September/PKI pimpinan DN. Aidit itu. Dengan sikap tegas, militan serta patriotisme dan semangat juang yang tinggi Mayor Jenderal Soeharto dapat menyelamatkan bangsa dan negara. Untuk itu setiap warga negara Indonesia wajib mensyukuri nikmat Tuhan atas terhindarnya negara-negara dan bangsa dari mala petaka yang dahsyat di bawah kepemimpinan Mayor Jenderal Soeharto Panglima KOSTRAD yang kemudian dikaruniai Allah selaku Presiden RI dengan Program Pembangunan Republik Indonesia penuh semangat Orde Baru/Orde Pembangunan. Ia telah berhasil mengoreksi serta memperbaiki semua kesalahan/kekeliruan ataupun penyelewengan-penyelewengan Pemerintah Orde Lama di dalam segenap aspek dan prospek kehidupan bangsa dan negara, dengan Program Repelita Nasional secara bertahap untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan menuju masyarakat adil dan makmur secara merata. Presiden Pembangunan Republik Indonesia Soeharto di dalam kepemimpinan telah berhasil menegakkan tonggak-tonggak sejarah Bangsa dalam satu dimensi serta telah menetapkan, melanggengkan dan meles-

tarikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 demi kepentingan dan kelangsungan hidup generasi penerus Pancasila sepanjang masa sejarah.

4.2 *Peristiwa Gugurnya Brigadir Polisi Karel Sadsuitubun*

Seperti telah diuraikan di atas bahwa pada waktu grombolan PKI dalam operasi penculikan Jenderal AH. Nasution, maka pertama-tama mereka berusaha untuk melumpuhkan kelompok pengawal di rumah Dr. J. Leimena. Menurut keterangan anggota Brigade Mobile Peltu Polisi Purnawirawan Lussy (salah seorang teman Karel Sadsuitubun) yang juga bertugas pada saat itu selaku pengawal di rumah Dr. J. Leimena, kepada penulis, bahwa sewaktu gerombolan PKI tiba di rumah Dr. J. Leimena, Karel Sadsuitubun sedang tertidur di dalam pos penjagaan (giliran tidur). Saudara Pelda Polisi Lubis menjaga di depan pintu masuk, dan Lussy sedang mengadakan kontrol ke bagian belakang rumah Pak Leimena.

Begitu bunyi mobil-mobil berhenti di depan pos, kedengaran gaduh. Lussy terus melihat pasukan Cakrabirawa loncat dari mobil, langsung melucuti senjata anggota Brigade Mobile Lubis. Melihat keadaan ini Lussy terus mengambil sikap siaga dan bersembunyi di belakang pos penjagaan untuk bersiap menembak. Lussy melihat banyak sekali pasukan Cakrabirawa yang turun, sehingga kalau Lussy menembak terlebih dahulu pasti Lussy juga akan tertembak dan mati pula pada saat itu, sehingga keselamatan Dr. J. Leimena akan terancam.

Untuk sementara waktu Lussy diam dan menyaksikan apa yang akan diperbuat mereka ini dengan Dr. J. Leimena, Wakil Perdana Menteri II Republik Indonesia ini. Lussy melihat mula-mula dua orang anggota Cakrabirawa masuk ke dalam pos penjagaan, salah seorang berdiri di pintu, dan seorang lagi langsung membangunkan Karel Sadsuitubun yang sedang tertidur sambil menyelempangkan dan memeluk senjatanya erat-erat. Mula-mula Karel Sadsuitubun tidak menghiraukan kakinya ditendang.

Menurut Lussy kemungkinan pada saat itu Karel Sadsuitubun memikirkan, itu kawan-kawannya sedang datang untuk menggungunya, karena itu ia tidur terus sambil marah-marah, katanya

orang sedang tidur diganggu. Namun terus-menerus kaki Karel ditendang, kemudian terdengar suara memerintahkan segera lepaskan senjatamu. Karel Sadsuitubun terbangun dan ia melihat yang ada di depannya bukan kawannya. Maka Karel terus melompat yang ada di depannya langsung berkelahi dengan anggota grombolan PKI itu, sambil menembaknya dengan beberapa peluru dan gugur pada saat itu juga. (30). Melihat kawannya telah tertembak, maka anggota grombolan PKI yang satu lagi menembak Karel Sadsuitubun dengan beberapa peluru. Karel Sadsuitubun langsung terjatuh berlumuran darah, serta menghembuskan nafas akhir di tempat tugas pengabdianya. Melihat hal ini, Lussy langsung membangunkan Dr. Leimena.

Sementara itu Dr. J. Leimena karena mendengar keributan di depan rumahnya telah terbangun, dan tidak berani keluar. Melihat telah terjadi tembak-menembak, dan Karel Sadsuitubun telah meninggal, maka Dr. J. Leimena mengatakan kepada istrinya, "Biarlah saya terus saja di sini, saya tidak akan lari, kalau mereka masuk pintu ini dan saya biarkan saya mati, karena anak saya Karel Sadsuitubun telah meninggal dalam rangka tugas pengawalan terhadap diri saya. (29)

Karena sudah hampir pagi, pasukan PKI itu rupanya takut ke-siangn, sehingga mereka segera menyeret mayat seorang temannya itu lalu memasukkannya ke salah satu mobil dan terus berangkat meninggalkan tempat itu. Menurut Lussy, sementara terjadi tembak-menembak di depan rumah Dr. J. Leimena, ia juga mendengar tembakan di rumah Jenderal Nasution, karena letaknya berdekatan sekali dengan rumah Dr. J. Leimena.

Demikianlah sejarah gugurnya Brigadir Polisi Karel Sadsuitubun salah seorang anggota Brigade Mobile dari Angkatan Kepolisian Republik Indonesia dalam tugas pengabdianya selaku Bha-yangkara Negara Indonesia menentang serta menembak mati pula pasukan Gerakan 30 September PKI dengan semangat militan, patriotisme selaku seorang prajurit, yang selalu setia dan taat kepada Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. Jenazah Karel Sadsuitubun disemayamkan di Resimen I Brigade Mobile Kwitang dan selanjutnya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta, dalam suatu upacara militer.

Berdasarkan hal-hal di atas ini, wajarlah kalau Presiden Re-

publik Indonesia/Panglima Tinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia/Komando Operasi Tertinggi dengan Surat Keputusannya tanggal 5 Oktober 1965 No. 114/KOTI/1965 menetapkan memberikan pangkat Ajun Inspektur Polisi Tingkat II Anumerta dan Gelar Pahlawan Revolusi kepada Brigadir Polisi Karel Sad-suitubun yang telah gugur dalam peristiwa "Gerakan 30 September", dan telah diakui oleh seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke termasuk Timor Timur.

BAR / PENTING

1. Untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 114 Tahun 1965 tentang pemberian pangkat dan gelar kepada anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang gugur dalam peristiwa "Gerakan 30 September", dan telah diakui oleh seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke termasuk Timor Timur, maka dengan ini ditetapkan bahwa:

2. Brigadir Polisi Karel Sad-suitubun diangkat dan ditetapkan sebagai Pahlawan Revolusi dan Anumerta Ajun Inspektur Polisi Tingkat II.

3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

4. Keputusan ini akan dipublikasikan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

5. Keputusan ini akan dipublikasikan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

6. Keputusan ini akan dipublikasikan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

7. Keputusan ini akan dipublikasikan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

8. Keputusan ini akan dipublikasikan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

9. Keputusan ini akan dipublikasikan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

10. Keputusan ini akan dipublikasikan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

BAB V. PENUTUP

Karel Sadsuitubun telah gugur sebagai pahlawan dan telah pergi menghadap Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang serta Maha Pencipta. Tentu saja selaku seorang manusia ia tidak luput dari kesalahan-kesalahan dan kekhilafan-kekhilafan dalam kehidupan pribadi maupun dalam pelaksanaan tugas. Namun semasa hidupnya ia telah memberikan darma baktinya secara nyata dengan mengorbankan seluruh jiwa raganya untuk membela negara dan bangsa Indonesia. Gugurnya Karel Sadsuitubun dan semua pahlawan revolusi lainnya dalam peristiwa berdarah Gerakan 30 September/PKI tahun 1965 ini telah meninggalkan kesan sejarah di dalam lubuk hati seluruh rakyat Indonesia, khususnya generasi muda sebagai generasi penerus Pancasila untuk selalu waspada terhadap semua ancaman yang datang dari luar maupun dari dalam untuk merobohkan negara.

Marilah kita pupuk persatuan dan kesatuan sebagai modal pokok kekuatan bangsa dengan memantapkan, melanggengkan serta melestarikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Belajar dan bekerja keras untuk mencapai tujuan nasional, yaitu masyarakat adil dan makmur secara merata di atas dasar takut akan Allah, kasih terhadap sesama manusia, serta jujur dan mawas diri dalam sikap dan perilaku.

Semoga penulisan biografi Pahlawan Revolusi Karel Sadsuitubun ini bermanfaat, berdaya guna dan berhasil guna.

Lampiran 2

MARKAS BESAR KEPOLISIAN R.I.
DETASEMEN MARKAS

KARTU TAMU
VISITOR CARD

N A M A : Drs. Frans Hitipeuw
N A M E
PEKERJAAN : Pemb. Pimpinan Pusat Sejarah dan
OCCUPATION : Budaya Dep. P dan K.
ALAMAT : Kebon Sirih Barat XII/24
ADDRESS
NOMOR TILPUN : 351887
PHONE NUMBER
INGIN BERTEMU DENGAN : Bapak Deputy Kapolri
WANTS TO SEE
DENGAN/TANPA PERJANJIAN
WITH/WITHOUT APPOINTMENT
KENDARAAN DAN
NOMORNYA : Taici
FERSIBLE AND ITS NUMBERS
CATATAN PETUGAS :
 Masuk jam :
 Keluar jam :

TANDA TANGAN
SIGNATURE

TANDA TANGAN
PETUGAS

(.....)
Pimpinan Proyek

(.....)
PIMPINAN PROJEK

Lampiran 3

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIC INDONESIA
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI
SEJARAH NASIONAL
JL. CILACAP No. 4 TELP. 351887, JAKARTA**

SURAT – TUGAS

No. 046/IDSN/VII/1979

Yang bertanda tangan di bawah ini Pemimpin Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional Jakarta berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 082/P/1979 tanggal 21 Mei 1979, memberi tugas kepada :

1. Nama : Drs. Frans Hitipetuw
2. N I P : 130163123
3. Jabatan : Peneliti
4. Alamat : Staf Teknis Bidang Sejarah Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya Jln. Cilacap 4, Jakarta.

Untuk mengadakan penelitian kepustakaan, wawancara dan penelitian lapangan dalam rangka penyusunan Biografi Pahlawan Nasional

. AIP II Anumerta Karel Sadsuitubun
di daerah Jakarta.

Surat tugas ini diberikan dengan harapan agar pihak keluarga, pribadi-pribadi maupun instansi dapat memberikan bantuannya, demi terlaksananya tugas ini dengan baik.

Surat tugas ini berlaku sejak dikeluarkan dan berakhir bulan Desember 1979.

Jakarta, 10 Juli 1979
Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi
Sejarah Nasional
Pimpinan Proyek,

(SUTRISNO KUTOYO)
Nip. 130036090

Lampiran 4**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I MALUKU****- REKOMENDASI -**

No. Rekom. 44/Gmal/'79.-

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I MALUKU,

Membaca surat dari Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional No. 046/IDSN/VII/1979, tanggal 10 Juli 1979 tentang Penelitian Biografi Pahlawan Nasional A.I.P. II Anumerta Karel Sadsuitubun, dan mengingat pula bahwa dalam rangka meneruskan nilai-nilai perjuangan dari para pahlawan yang telah gugur dalam mempertahankan negara dan bangsa perlu memberikan rekomendasi kepada saudara :

Drs. FRANS HITIPEUW, Staf Tehnis Bidang Sejarah dan Budaya Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengadakan penelitian di daerah Maluku, karena hasil penelitian ini akan ikut memperkaya hasanah budaya Bangsa Indonesia.

Demikian rekomendasi ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan diharapkan kepada semua instansi maupun masyarakat ikut memberikan bantuan seperlunya.

Ambon, 26 Juli 1979

A.n. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Maluku
Sekretaris Wilayah Dati I,

Drs. G.A. ENGKO

Nip : 010019174

Lampiran 6

MARKAS BESAR KEPOLISIAN R.I.
Panitya Tetap Tanda-Tanda Kehormatan &
Lambang Kesatuan

DAFTAR: Riwayat Hidup Pahlawan Revolusi

1. Nama : Karel Sadsuitubun.
2. Pangkat : Adjun Inspektur Polisi II Anumerta
3. Kesatuan : Kompi C/Jon 1129 Korps Brimob Kedunghalang, Bogor.
4. Tempat tanggal lahir : Rumadian Tual Maluku Tenggara, 14-10-1928.
5. Tanggal Perkawinan : 21-10-1959.
6. Nama Isteri : Margaretha.
 Tempat tanggal lahir : Kaparan Klaten, 19-7-1939.
 Tempat tinggal sekarang : Asrama Korps Brimob, Kedunghalang, Bogor
7. Nama anak : 1. Philipus Sumarna, lahir tanggal 19-5-1960.
 2. Petrus Waluyo, lahir tanggal 1-5-1962.
 3. Paulus Suprpto, lahir tanggal 29-4-1964.
8. Tanda Jasa yang dianugerahkan : Bintang Republik kelas II
 (SK. Presiden/Pangti ABRI No. 50/BK1/th. 1965 tanggal 10 Nopember 1965).
9. Gelar Pahlawan Revolusi : Sk. Presiden/Pangti ABRI No. 114/Koti/1965 tanggal 5 Oktober 1965.
10. Keterangan lain-lain :

Djakarta, 21 Agustus 1972
 Panitya Tetap Tanda Kehormatan &
 Lambang Kesatuan MABAK

Sekretaris,

(S A W I K O E N)

Kompol. Nrp. 25010009

Lampiran 7**SALINAN dari SALINAN****KOMANDO OPERASI TERTINGGI**

**KEPUTUSAN PRESIDEN/PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN
BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA/KOMANDO OPERASI TERTINGGI
No. 114/KOTI/1965**

**KAMI, PRESIDEN/PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN BERSEN-
DJATA REPUBLIK INDONESIA/KOMANDO OPERASI TER-
TINGGI**

- Menimbang** : Bahwa sebagai penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa-jasanya dalam pendharma diri dalam menunaikan tugasnya dan atau perjuangan untuk kepentingan Nusa dan Bangsa, perlu memberikan pangkat Anumerta dan Gelar Pahlawan Revolusi kepada Brigadir Polisi Karel Sadsuitubun yang telah gugur sebagai akibat petualangan dari apa yang menamakan dirinya "Gerakan 30 September".
- Mengingat** : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 142 Tahun 1963.
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 226 Tahun 1963.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 33 Tahun 1964.
4. Peraturan Pemerintah No. 202 Tahun 1961 (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 241).
5. Undang-Undang No. 21 Tahun 1952 (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 76).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan**
Pertama : Memberikan pangkat Adjun Inspektur Polisi Tingkat II Anumerta dan Gelar Pahlawan Revolusi kepada Brigadir Polisi Karel Sadsuitubun yang telah gugur dalam peristiwa "Gerakan 30 September".
- K e d u a** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan tjatatan, bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat

kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan
seperlunja.

Ditetapkan di : Jakarta.
Pada tanggal : 5 Oktober 1965.

PRESIDEN/PANGLIMA TERTINGGI
ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA/
KOMANDO OPERASI TERTINGGI,
ttd.

SUKARNO

Salinan sesuai dgn aslinja
KOMANDO OPERASI TERTINGGI
KL. II SEKRETARIS UMUM
tjap/ttd.

MICAM ZAGUDIAN
KOLONEL LAUT

Salinan disjahkan oleh :
MPRS BRIGADE MOBIL
a.n. **PANGLIMA**
ASISTEN III

Salinan sesuai dengan bunjinya
oleh
ttd.

SUKARNO
Brigadir Polisi

Kep. Depart. Angkt. Kepol.
ttd.

Disalin sesuai dengan bunjinya
oleh
ttd.

(**SAIFULLAH QOHARY**)
Komisaris Polisi tk. II

MENGETAHUI DAN MENGESJAHKAN :
BATALJON 11239 KORPS BRIGADIR MOBIL
KOMANDAN
Ub. KEPALA SEKSI III
ttd.

SOERADJIMAN
Brigadir Polisi

Disalin sesuai dengan bunjinya
aslinya dari salinan

— **ADJI SOEROSO**—
Inspektur Polisi tk. I

— **DJUHIRAN** —

Lampiran 8

**KEPUTUSAN PRESIDEN/PANGLIMA TERTINGGI
ANGKATAN BERSENDJATA REPUBLIK INDONESIA
NO. 30/BKT/Tahun 1965
TENTANG
PEMBERIAN TANDA-TANDA KEHORMATAN**

KAMI, PRESIDEN/PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN BERSENDJATA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : Bahwa sebagai penghargaan atas kesetiaan dan djasa-djasa-
nja jang luar biasa terhadap Negara, Bangsa dan Revolusi
Indonesia para Pahlawan Revolusi jang telah gugur sebagai
akibat perbuatan kaum kontra Revolusi jang menamakan
dirinja "Gerakan 30 September" di Djakarta.

Mengingat : 1. Pasal 15 dan pasal II Aturan Peralihan Undang-undang
Dasar Republik Indonesia.
2. Pasal 1 ayat (1) dan pasal 7 ayat (2) dan (3) Undang-
Undang Drt. No. 4 Tahun 1959 (Lembaran Negara Ta-
hun 1959 No. 44).
3. Undang-undang Drt. No. 5 Tahun 1959 (Lembaran Ne-
gara Tahun 1959 No. 45)

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
Memberikan kepada mereka jang nama-namanja tersebut dalam Lampiran
Surat Keputusan ini Tanda Kehormatan seperti yang disebut dibelakang
nama mereka masing-masing, atas djasa-djasa-nya jang luar biasa terhadap
Negara, Bangsa dan Revolusi Indonesia.

Ditetapkan di DJAKARTA
pada tanggal 10 Nopember 1965

**PRESIDEN/PANGLIMA TERTINGGI
ANGKATAN BERSENDJATA REPUBLIK INDONESIA,**

S U K A R N O

Lampiran 9

S A L I N A N

LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN/PANGLIMA TERTINGGI
 ANGKATAN BERSENDJATA REPUBLIK INDONESIA
 NO. 30/BKT/TAHUN 1965

TENTANG

PEMBERIAN TANDA-TANDA KEHORMATAN

Nama	Pangkat/Djabatan	Tanda Kehormatan dianugerahkan
A. Y A N I	Djenderal Anumerta	Bintang Republik Indonesia Kls. II.
S U P R A P T O	Letnan Djenderal Anumerta	s.d.a.
M.T. HARJONO	Letnan Djenderal Anumerta	s.d.a.
S. P A R M A N	Letnan Djenderal Anumerta	s.d.a.
D.I. PANDJAITAN	Major Djenderal Anumerta	s.d.a.
S U T O J O	Major Djenderal Anumerta	s.d.a.
PIERE TENDEAN	Kapten CEI Anumerta	s.d.a.
K A T A M S O	Brigadir Djenderal Anumerta	s.d.a.
S U G I J O N O	Kolonel Anumerta	s.d.a.
KAREL SADSUI-	Brimob Men. I Jon I 12	s.d.a.
TUBUN	Anumerta	

Djakarta, 10 Nopember 1965

PRESIDEN/PANGLIMA TERTINGGI
 ANGKATAN BERSENDJATA REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

S U K A R N O

Disalin sesuai dengan
 aslinja jang menjalin

KEPALA BAGIAN VII DIREKTORAT PERSONIL
 DEPAK.

Lampiran 10

DAFTAR RIWAYAT PEKERDJAAN

PERTELAAN Masing2 pekerjaan jang telah didjalankan oleh: Adjun Inspektur Polisi Tk. II Anumerta *KAREL SADSUITUBUN.* :

No. Urut	SURAT KEPUTUSAN Dari ... Tgl. & No.	Uraian	Ms. kerdja terhitung	Gadji Pokok
1.	KPPBOP.M Buku. 1-8-1951 68/B/Prop/Mol.	Masuk pendidikan Tjalon Agen Polisi pd SPN Ambon.	1-8-51 nihl	Rp 82,50
2.	sda. 9-2-1952 41/B/prop.mel.	Diangkat Agen Polisi II pd Mobrig DMS Ambon.	1-2-52 nihl	97,50
3.	Pad. Ment. 23-9-1952 6/118/22	Dipindahkan pd Mobrig D.K.N. di Djakarta.		
4.	D.K.N. 1-9-1953 2453/4/53/UP	Kenaikan Gadji.	1-2-53 1 th.	122,50
5.	sda. 30-4-1954 4740/7/54/UP	Kenaikan pangkat menjadi Ap. I (Hersch).	1-4-54 2 th. 2 bl.	137,-
6.	sda. 11-12-1954 4740/7/54/UP	Sekolah Mobrig 3 bl pd SPN Tjab. Megamendung.	3-1-54	137,-
7.	sda. 18-2-1955 147/7/54/UP	Dipekerdjakan untuk smtr. dlm 3 bl. pd. Kp. Prop. Sum. Utr. (Atjeh).	18-2-55	137,-
8.	sda. 17-6-1955 2608/7/55/UP	sdn. diperpanjang waktunja dlm. 3 bl.	18-5-55	137,-
9.	sda. 30-9-1955 3841/4/55/UP	Kenaikan Gadji.	1-2-55 3 th.	142,50
10.	sda. 12-8-1956 4109/2/59/UP	Inpasing PGPN 1955.	1-10-55 3 th. 3 bl.	161,50
11.	sda. 30-6-1956 5914/2956/UP	Diangkat sebagai Pegawai Negeri Tetap.	1-6-56 4 th. 4 bl.	142,50
12.	sda. 9-10-1956 5249/7/56/UP	Dipekerdjakan utk smtr dlm 3 bl. di Sumut (Atjeh).	2-6-56	161,50
13.	sda. 10-7-1957 3211/4/57/UP	Kenaikan Gadji.	1) 1-2-56 4 th 2) 1-2-57 5 th	160,- 176,50
14.	Pangak 1-8-1958 3618/4/58/UP	Kenaikan Gadji.	1-2-58 6 th	184,-
15.	sda. 24-9-1958 4851/7/58/UP	Dipekerdjakan utk smtr dlm 6 bl. di Sulawesi.	23-7-58	184,-
16.	sda. 7-9-1959 3961/2/59/UP	Kenaikan pangkat menjadi angg. Pol. Kep. I.	1-9-59 7 th. 7 bl	337,-
17.	sda. 12-3-1960	Dipekerdjakan utk smtr	2-11-60	337,-

18.	sda.	869/7/60/UP 8-8-1960 3490/4/60/UP	dlm 6 bl. di Sum. Bar. Kenaikan Gadji.	1-2-60 8 th	367,-
19.	sda.	7-9-61 1179/7/61/UP	Dipekerdjakan utk smtr dlm 6 bl di Sum. Bar.	2-11-60	367,-
20.	sda.	11-9-1963 8942/2/b/III/63/Pers	Kenaikan Gadji.	1-3-62 10 th.	673,-
21.	sda.	—	Tugas Trikora dlm 10 bl. di perbatasan Irian Barat.	16-3-63	673,-
22.	sda.	25-11-1965 1231/2/b/III/63	Kenaikan pangkat men- jadi Brigadir Polisi.	1-11-63 8 th.9bl	739,50
23.	sda.	14-8-1965 962/2/b/III/65/Pers	Kenaikan Gadji.	1-2-65 10 th.	798,50

PRESIDEN/5-10-1965
PANGTI ABRI/114/KOTI/1965
KOTI

Pada tgl. 1-10-1965 te-
lah gugur dlm peristiwa
G. 30. S dlm. bertugas penga-
walan ditempat Kediaman
J.M. WAPERDAM II Dr. J. Leimena
di Djakarta

Diberikan pangkat Adjun Insp. Pol. II Anumer-
ta dan Gelar PAHLAWAN REVOLUSI karena
gugur dlm. peristiwa Gerakan 30 September.

Djenazahnya dikebumikan di Makam Pahlawan Kalibata Djakarta.

KEDUNGHALANG/BOGOR, 1 April 1966

Menjetudjui & Mengesjahkan :
BATALYON 1120 KORPS BRIGADE MOBIL

K O M A N D A N

Tjap. ttd.

(S A C H R I)

Adjun Komisaris Polisi,

Salinan sesuai dengan aslinja
oleh

(S. ROSINAH)

Diisi dengan sebenarnya sesuai dengan Bukti2 jang ada. Oleh:
Anggauta Staf Bataljon 1120 Korps Brigade Mobil.

ttd.

(HSJIM PRAWIRO)

aip. tk. II.

Mengetahui :

Bahwa salinan ini sesuai dengan jang disalin.

Trijono

lptu

Lampiran 11

KARTU – PEGAWAI
DEPARTEMEN ANGKATAN KEPOLISIAN

1. Nama Pegawai: Ka. Sadsuitubun	2. Nomor Pokok :
3. Kelahiran tgl: 14-10-1928. Tempat: Rumadian Tual Mal. Tengg.	4. Agama: Islam /Roma-Katholik/ Protestan /Hindu -Budha /Lain- lain
5. Kebangsaan: Indonesia Asli / W.N.I. / Asing.	6. Djenis kelamin: Laki-laki / Pe- rempuan.
7. Tjiri-tjiri badan : tinggi (tanpa sepatu): 160. rambut : Biasa/pendek. mata: Biasa. tjiri-tjiri chas lainnja:	8. Golongan darah: A. 9. Ukuran pakaian Seragam: tutup kepala : 54 djas (kemedja) : 15 tjelana : 32/30 sepatu : 25
10. Bahasa2 jang dikuasai : 1) Bahasa Asing :	
2) Bahasa Daerah: Sunda pasif Tj. Kay.	
11. Pangkat: Brigadir Polisi ditetapkan dengan Sk. dari M. Pangale No. Pol.: 124/4/4042 Tgl. 25-11-1965 terhitung mulai tgl. 1-11-1963 djadi dalam pangkat tsb. sudah th. 5 bl.; Sk. tsb. sudah/belum diterima.	
12. Masa kerdja : 1) dalam Kep. 12 th. 2 bl. terhit. mulai tgl 1-2-52. 2) seluruhnja 12 th. 2 bl. terhit. mulai tgl. 1-2-52. 3) sebagai Masa-bakti – th. – bl.	
13. Djabatan: (Sebelum djabatan sdr) Pasukan Tan Kompi C/1129 Korps Brimob Kedunghalang Bogor sudah 4 th. bl.	
14. Penempatan di: Kesatuan/Kantor Kepolisian: Propinsi Maluku sudah th. 9 bln. termasuk Dinas/Korps/Bag. Brigade K.K.N. sudah 14 th. 5 bln.	

Nama anak-anak	Tempat dan tanggal lahir	Lahir dari Suami/Isteri nomor berapa	Sebagai anak			
			Nomor Kandung K	Tiri Angkat		Adopsi Ad
				T	A	
1) Philipus Sumarna	1) Kedunghalang, 19-5-60	1)	1)	
2) Petrus Waluyo	2) Kedunghalang, 1-5-62	2)	2)	
3) Paulus Suprpto - Prapto	3) Kedunghalang, 29-4-64	3)	
4)	4)	4)	
5)	5)	5)	
6)	6)	6)	
7)	7)	7)	
8)	8)	8)	
9)	9)	9)	
10)	10)	10)	
11)	11)	11)	
12)	12)	12)	

Disebut kedudukan menurut salah satu keterangan tersebut di bawah ini :

- a. pegawai negeri
- b. pegawai negeri pensiunan : on
- c. pegawai negeri lokal : pl
- d. pegawai militer : pl
- e. kawin dengan seorang jang tidak termasuk a s.d. d : l

Tjataan :

- 1) tjoret jang tidak perlu.
- 2) isi dimana perlu.

21. Nama dan alamat orang tua/wali :

- 1) dari pegawai : Fransina thaiwutun Debut Tual Mal. Tengg.
.....
- 2) dari (suami/isteri) pegawai : ada

<p>25. Tanda djasa jang dimiliki: X.</p>	<p>26. Keterangan/keahlian/pudjian jang dimiliki :</p>
<p>1) S.K. Veteran: tgl. No.</p>	<p>1) Apresiasi Sumatera Barat.</p>
<p>2)</p>	<p>2) Ganefo I</p>
<p>3)</p>	<p>3)</p>
<p>4)</p>	<p>4)</p>
<p>5) Gam. III. V. VII</p>	<p>5)</p>
<p>6) Trikora</p>	<p>6)</p>
<p>7) Sapta Marga</p>	<p>7)</p>
<p>8) Pantja Warsa</p>	<p>8)</p>
<p>9)</p>	<p>9)</p>

Djika telah mengajukan permohonan salah satu tanda djasa dan belum mendapatkan surat keputusannya harap diisikan pula dan dibelakangnja diberi tanda V dan tanggal mengadjukannya.

Tjataan :

-) tjoret jang tidak perlu.
-) isi dimana perlu.
-) beri tanda V dimana perlu.

DJENDJANG KARIER

27. Urutan Kenaikan pangkat: (sebutan mulai dari pangkat permulaan dan tanggal terhitung mulainja; djuga ditjatat bila ada penurunan pangkat dan pemberhentian usw).

- | | | |
|--------------------|-----------|-----------|
| 1) Agen Pol tk. II | 6) | 11) |
| 2) Aktip 1-2-1952 | 7) | 12) |
| 3) Bteg Pol 1-1-59 | 8) | 13) |
| 4) 1-1-63 | 9) | 14) |
| 5) | 10) | 15) |

28. Urutan Djabatan: (sebutan mulai dari djabatan pertama dan tanggal terhitung mulainja)

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1)Pasukan 1-3-1952 | 6) |
| 2) | 7) |
| 3) | 8) |
| 4) | 9) |
| 5) | 10) |

29. Urutan kepindahan (sebutkan mulai dari penempatan pertama, tiap kepindahan ke Kesatuan Kepolisian (Daerah) lain, paling rendah Kepolisian Resort; dan tanggal terhitung mulainja)

- | | |
|---------------------------------|-----------|
| 1) Kepolisian Maluku DKN 1-2-52 | 6) |
| 2) ke Kompi s160 DKN 1-2-52 | 7) |
| 3) Kompi s160 DKN ke Kompi | 8) |
| 4) s130 DKN tgl. 10-9-1959 | 9) |
| 5) | 10) |

Keterangan² tersebut diatas saja isi menurut keadaan sebenarnya, dengan berani angkat sumpah bilamana perlu. Saja menginsafi sepenuhnya bahwa kalau dikemudian hari ternyata saja sengadja memberikan keterangan palsu, akan dapat dituntut dimuka Hakim.

....., 19....
PEGAWAI JANG BERSANGKUTAN

ttd.

(K. Sadsuitubun)

DAFTAR SUMBER

Sumber Tertulis

1. A.J. Bevershuis dan Gieben, A.H.C. Mr. *Het Gouvernement der Malukken*, Weltevreden, 1929, hal. 101-120.
2. Baron van Hoevel, G.W.W.C., *Over de middelen tot herstel van de welvaart en tot ontwikkeling der Ambonsche Eilanden*, de Indische Mercur van 30 Januari, 1897.
3. *Corpus Diplomaticum Neerlandico Indicum*, hal. 356-359.
4. Naidah, *Sejarah Ternate*, diterbitkan oleh D.N. Grab, tahun 1878, dan *Kronik Bacan* diterbitkan oleh Coolhaas tahun 1924.
5. Catatan tertulis dari Keadaan Ternate, *Struktur Pemerintahan Adat Kesultanan Ternate*.
6. Rijali, *Hikayat Tanah Hitu*, diringkas oleh Valentijn dalam *Oud en Nieuw Oost Indie*, II 2, 1-14.
7. *Gedenkschrift Marasaoli*, diringkas oleh Valentijn dalam *Oud en Nieuw Oost Indie*, I, 3.
8. Penyelidikan Geologi di Daerah Maluku yang dilakukan oleh Dr. F.D. Verbeek pada akhir abad ke-19, *Catatan tentang gempa bumi di Maluku*, hal. 159-161.
9. Frans Hitipeuw, Drs., "Maluku dari abad ke abad", *Majalah Maluku Membangun*, Humas Kantor Gubernur Maluku, Ambon 1971.
10. Kopkamtib, *Buku Putih Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia (G 30 S/PKI)*, Jakarta, Mei 1978.

11. Inkopak, *20 Tahun Perkembangan Angkatan Kepolisian Republik Indonesia*, Jakarta 1967.
12. Memet Tanumidjaja, S.H., Inspektur Jenderal Polisi, *Sejarah Perkembangan Angkatan Kepolisian*, Departemen Hankam, Pusat Sejarah ABRI, Jakarta 1971.
13. Panitia Jakarta Fair 1970, Stand Maluku, *Maluku*, Ambon 1970.
14. Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya, Departemen P dan K, *Sejarah Daerah Maluku*, Jakarta 1976/1977.
15. Proyek Monumen Pancasila Cakti, *Buku Monumen Pancasila Cakti*, Jakarta, hal. 343-347.
16. Drs. S.P.H. Leatemala, *Hasil Sensus dan Statistik Daerah Maluku*, Ambon, 1970, 1976 dan 1978.
17. Frans Hitipeuw, Drs., *Cengkeh dan Pala Membawa Berkat dan Bencana bagi Daerah dan Rakyat Maluku*, Hasil-hasil Materi Seminar Sejarah Maluku I, Ambon, 1972, hal. 351-363.
18. Holleman, F.D.J., Mr., *Het Adat Grondenrecht Van Ambon en de Oeliasers*, Amsterdam, 1923.
19. Sartono Kartodirdjo dkk., *Sejarah Nasional Indonesia*, Jakarta, 1976.
20. Gregory, F.A.A., *De Moluksche Archipel*, Uitgegeven door Jacob Swarte Amsterdam, By de Wed, G. Hulst Van Kenlen, 1853.
21. Olivier Z.J., *Reizen in de Moluksche Archipel*, By G.J.A. Deyerink, te Amsterdam, 1873.
22. *Sejarah Militer Kodam VI Siliwangi, Siliwangi dari Masa ke Masa*, Penerbit Fakta Mahjuna, Jakarta, 1968.

Sumber Lisan

23. Wawancara dengan Kepala Kepolisian Negara RI cq. Kajamin Pers Mabak via Deputy Kapolri, Jakarta, 9 Juli 1979.
24. Wawancara dengan Brigadir Jenderal Polisi Drs. Istambah, Kadapol XX Maluku, Ambon, 20 Juli 1979.
25. Wawancara dengan Sdr. Johannes Claudius Onny bin Alfons Letsoin, Ambon, 30 Juli 1979.

26. Wawancara dengan Letkol Polisi Tahapary, Komandan Brigadir Mobile, Daerah Kepolisian XX Maluku, Ambon 30 Juli 1979.
27. Wawancara dengan ex Bupati KDH Maluku Tenggara Drs. D.C. Far-Far, Ambon, 1 Agustus 1979.
28. Wawancara dengan Kapten (AD) Purnawirawan Johny Yudo, Jakarta, 10 Agustus 1979.
29. Wawancara dengan Ny. Margaretha Waginah Sadsuitubun, Jakarta 12 Agustus 1979.
30. Wawancara dengan Saudara Lussy, Anggota Brigade Mobile Purnawirawan, Kedunghalang Bôgor, 14 Agustus 1979.

